

Pengabdian
Prof. (Em) Soekirman
Sebagai Ahli Gizi
1961 - Sekarang



88 tahun Prof. Soekirman

Pengabdian Prof. (Em) Soekirman Sebagai Ahli Gizi 1961 – Sekarang

Prof. (Em) Soekirman, MPS-ID, PhD



**Pengabdian Prof. (Em) Soekirman
Sebagai Ahli Gizi 1961 – Sekarang**

Penulis : Prof. (Em) Soekirman, MPS-ID, PhD
Editor : Abraham Raubun
Idrus Jus'at
Nur Rahmah Utami
Hanifah Hana Pertiwi
Layouter : Ongky Arisandi

Hak Cipta dilindungi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 "Dilarang mengutip atau memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit"

Cetakan Pertama, 3 Agustus 2024

Cetakan Kedua, Oktober 2024

Iviii + 119 Halaman; 10 Bab; 14,8 x 21 cm

Copyright © 2024

Diterbitkan Oleh

Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi)

Grand Centro Bintaro, Blok B2, Jl. Raya Kodam Bintaro Sekretariat

Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia (DPP Persagi)

Jakarta Selatan

E-mail : persagidpp@gmail.com

KATA PENGANTAR

*Sebuah tujuan tanpa perencanaan hanya akan menjadi harapan
(Un objectif sans plan n'est qu'un souhait: Antoine de Saint-
Exupery, Penulis Perancis 1900-1944)*

*"Awalilah setiap kegiatan dengan perencanaan yang baik, karena
gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan"
(Abdulah Gymnastiar)*

Gizi salah, baik berupa gizi lebih maupun gizi kurang telah lama diketahui berdampak besar bukan hanya pada masalah kesehatan, tetapi juga pada pembangunan ekonomi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Peran gizi terhadap produktivitas kerja, kecerdasan, imunitas dan kualitas SDM sudah terdokumentasi dengan baik. Dalam publikasinya yang berjudul *"Repositioning Nutrition as Central to Development: A Strategy for Large-Scale Action"* tahun 2006, Bank Dunia mengulas tuntas tentang hal itu. Menariknya buku ini juga menyatakan bahwa sebenarnya sebagian besar komunitas internasional dan pemerintahan negara-negara berkembang telah mengetahui pentingnya peranan gizi dalam pembangunan dari banyaknya publikasi keberhasilan praktek baik di beberapa negara. Namun demikian tidak banyak pemerintahan yang belajar dan menggunakan pendekatan yang telah teruji tersebut dalam perencanaan strategi dan implementasi di negaranya.

Pernyataan Bank Dunia dalam publikasinya tahun 2006 tersebut sebenarnya merupakan penegasan kembali dari publikasi sebelumnya yang berjudul *"Combating Malnutrition: Time to Act"* yang terbit tiga tahun sebelumnya. Pada publikasi ini diingatkan bahwa gizi salah merupakan penyebab dari setengah

kematian anak, munculnya berbagai jenis Penyakit Tidak Menular (PTM), keterbelakangan kognitif, dan kerugian ekonomi yang besar. Buku ini juga menyajikan berbagai fakta praktek baik dan pembelajaran yang dapat dipetik (*best practices and lessons learned*) yang mengurai keberhasilan dan kegagalan program gizi di berbagai negara. Satu hal yang juga penting dari buku ini adalah judulnya yang provokatif bahwa strategi mengatasi masalah gizi seperti strategi menghadapi peperangan. Kemenangan akan mendatangkan kebaikan, kemakmuran serta kesejahteraan, dan kekalahan akan membawa kehancuran.

Dengan tersedianya informasi begitu banyaknya bukti empiris pembelajaran tentang keberhasilan dan kegagalan program gizi, maka yang diperlukan sekarang adalah tindakan nyata (*time to act*) belajar dari keberhasilan dan kegagalan sebelumnya. Oleh karenanya belajar dari sejarah keberhasilan dan kegagalan masa lalu juga menjadi bagian yang sangat penting dalam mengembangkan program gizi di suatu negara. Jangan sampai negara gagal karena tidak mau belajar, seperti ditekankan oleh George Santayana, seorang filsuf dan tokoh kemanusiaan yang hidup pada tahun 1863-1958: "Mereka yang tidak mengambil pelajaran dari sejarah, maka mereka ditakdirkan untuk mengulangnya". Bila itu yang terjadi, bukan tidak mungkin ke depan bisa saja terjadi masalah gizi kurang yang pernah ada (*re-emerging malnutrition problems*), seperti kurang vitamin A (KVA), Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) atau masalah gizi lainnya yang sudah dianggap selesai tuntas. Kembalinya masalah gizi ini adalah bentuk ketidakwaspadaan dan buruknya antisipasi karena tidak berjalannya sistem isyarat dini dan surveilans gizi untuk terus memantau perkembangan masalah berdasarkan pengumpulan data secara berkesinambungan, dan menjadikannya instrument untuk membantu mengambil kebijakan dan perencanaan program gizi.

Membaca buku terbaru Prof. Soekirman yang berjudul "Pengabdian Prof (Em) Sebagai Ahli Gizi (1961-Sekarang)" ini

sangat menarik karena isinya menyajikan kembali (dengan beberapa tambahan) tentang “Gizi dan Pembangunan”, “Perencanaan Gizi” dan “Sejarah Ilmu dan Kelembagaan Gizi” yang ditulis berdasarkan kiprah beliau selama menjalankan tugas dan profesi di Bappenas khususnya dengan latar belakang profesi gizi. Meski sifatnya rangkuman dari berbagai buku atau tulisan lepas sebelumnya, namun membaca secara keseluruhan buku ini seperti membaca sebuah jawaban atas pengantar prakata yang saya tulis di depan tentang luasnya dampak gizi dalam berbagai aspek kehidupan dan pentingnya integrasi gizi dalam perencanaan Pembangunan serta pengambilan kebijakan berdasarkan bukti ilmiah dari data terpercaya yang dikumpulkan secara berkala.

Bagi pembaca yang belum pernah membaca tulisan-tulisan Prof. Soekirman sebelumnya, membaca buku ini sekaligus serasa mendapat “suplemen multivitamin” yang dapat memperkuat dan meningkatkan wawasan tentang berbagai hal yang saya sebutkan di atas secara komprehensif. Menariknya adalah sebenarnya Prof. Soekirman mulai menyampaikan beberapa hal penting di atas sejak era 1970an, bukan tahun 2000an. Meski “Gizi dan Pembangunan” mungkin bukan ide orisinal Prof. Soekirman karena ide awalnya diperkenalkan oleh Alan Berg, seorang tokoh gizi internasional, dalam bukunya yang berjudul *“The Nutrition factor its Role in National Development”* tahun 1970-an namun kelebihan Prof. Soekirman adalah memperkaya tulisannya dengan pengalaman beliau secara langsung sebagai birokrat saat bertugas di Bappenas, maupun pengalaman lapangan ketika pertama kali bertugas di Aceh. Bukan hanya itu, pengalaman Prof. Soekirman sebagai Dosen di IPB, UNHAS, UKI-Jakarta, dan Akademi Gizi Jakarta (Sekarang Poltekkes Jakarta) serta sebagai pendiri dan aktivis program fortifikasi pangan di Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia (KFI) yang didirikannya pada tahun 2002 juga sangat mewarnai berbagai tulisan beliau. Sehingga dalam buku ini apa yang disampaikan bukan hanya teori, tetapi juga berisi rangkaian

pengalaman praktis serta pemikiran ke depan berdasarkan kajian akademis yang didukung oleh bukti-bukti empiris.

Dalam buku Prof. Soekirman ini dibahas pula tentang pentingnya profesi gizi yang berkualitas dan berorientasi ke depan yang didukung oleh organisasi profesi gizi yang kuat, serta institusi pendidikan gizi yang seharusnya *agile* (lincah) menghadapi perubahan cepat, apalagi pasca Revolusi Industri 4.0 yang mengharuskan kita adaptif dan lincah serta berani menghadapi “peperangan” sesungguhnya untuk mengatasi kompleksitas masalah gizi kurang dan gizi lebih, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat (*micronutrient deficiency/hidden hunger*).

Membaca buku ini kita juga seperti diajak memasuki “lorong waktu”, yang di koridornya juga terdapat diorama sejarah ilmu maupun tokoh-tokoh gizi berpengaruh. Oleh karenanya buku ini bernilai inspirasi yang kuat yang akan sangat bermanfaat bagi seseorang yang mempunyai jiwa “pembelajar” (*learner*). Seorang pembelajar mendapatkan begitu banyak ilmu bukan hanya dari apa yang dibaca, tetapi dari inspirasi yang diperolehnya ketika membaca buku ini.

Yang juga sangat menarik adalah buku ini diterbitkan dalam rangka ulang tahun ke-88 Prof. Soekirman, usia yang sebenarnya bagi sebagian besar orang bukan usia produktif. Buku ini tentu bisa menjadi contoh gamblang bahwa sebagai “orang gizi” kita memang harus bermental pejuang dan siap masuk dalam medan pertempuran sampai kapanpun. Oleh karena itu, seandainya saya harus memberikan masukan terhadap buku ini, saya berharap Prof. Soekirman masih terus diberi sehat dan produktif, sehingga di ulang tahun ke-90 nanti akan menambahkan tulisan yang lebih banyak lagi memberikan bukti-bukti empiris bahwa jika kita membuat perencanaan yang baik, maka hasilnya akan baik. Jika kita belajar dari sejarah, maka kegagalan yang tercatat dalam sejarah tidak akan terulang lagi. Juga contoh-contoh bagaimana keberhasilan kerjasama

lintas sektor akan mempercepat upaya mengatasi masalah gizi, sekaligus memberikan *multiplier effect* bagi kemajuan sektor lainnya. Penyelesaian masalah gizi memerlukan pendekatan lintas disiplin keilmuan dan lintas sektor. Permasalahan gizi tidak bisa diatasi dengan sikap soliter dan berpretensi hanya orang gizi yang tahu segalanya.

Di penghujung lorong waktu kita berharap kesuksesan dari pendekatan lintas sektor lintas disiplin tersebut dapat dielaborasi lebih lanjut. Misalnya saat ini telah terbangun *large-scale fortification forum* (LSFF) dan peran KFI dalam pengembangan forum tersebut telah menjadi bagian yang disampaikan dalam buku ini, bagaimana dampaknya ke depan semoga dapat diulas dalam edisi berikutnya. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu gizi juga terus berkembang secara pesat. Maka dari itu, tulisan dan pembahasan gizi pembangunan sudah sewajarnya terus dikembangkan agar dapat tetap relevan dengan perkembangan zaman dan tantangan masa depan. Buku ataupun kajian-kajian terkait gizi pembangunan ke depan diharapkan dapat berfokus pada strategi dan aksi penanggulangan masalah gizi seperti *best practices* dan *leason learned* gizi pembangunan dalam mengatasi stunting, obesitas, defisiensi zat gizi mikro, dan lain-lain di Indonesia yang terbukti efektif. Dengan kemajuan teknologi informasi, mengumpulkan berbagai *best practices* dan *lesson learned* penanggulangan masalah gizi di Indonesia sekarang menjadi lebih cepat dan mudah. Dengan demikian pengembangan kebijakan di bidang gizi untuk mendukung pembangunan nasional benar-benar berbasis bukti.

Selain itu, di edisi mendatang diharapkan juga membahas mengenai *time to act* dalam menyelesaikan masalah-masalah gizi saat ini dan masalah-masalah yang mungkin muncul masa mendatang, atau bahkan kemungkinan *re-emerging malnutrition* seperti saya sebutkan di bagian awal. Edisi mendatang diharapkan fokus menyajikan "*Future Practices in Nutrition and Development*"

di era teknologi maju, menggambarkan bagaimana pendekatan program gizi pada era Society 5.0. Di era ini peranan teknologi robotic, *artificial intelligent* dan *Internet of Things* (IoT) akan semakin masif dalam menyelesaikan pekerjaan maupun menjawab aneka masalah yang dihadapi masyarakat. Menarik untuk ditanyakan adalah apakah pendekatan perencanaan masalah gizi di masa depan masih akan sama dengan masa lalu, dikala kita bisa banyak bertanya kepada ChatGPT dengan menggunakan AI untuk mencari solusi cepat sekaligus tepat dari aneka masalah gizi yang dihadapi di masa mendatang.

Nampaknya transformasi digital yang terjadi dan mempengaruhi berbagai sendi kehidupan termasuk berpengaruh terhadap wujud masalah gizi sekaligus solusi permasalahannya akan mempengaruhi pendekatan perencanaan gizi di masa mendatang. Kecepatan analisis situasi dan alternatif mencari solusi yang bisa diperankan oleh AI mungkin juga akan mempengaruhi bagaimana pendekatan kita mencari solusi terbaik dari masalah gizi di masa mendatang. Dukungan kualitas SDM yang memiliki kapabilitas untuk mengantisipasi dan mengoperasikan teknologi maju ini menjadi suatu keharusan. Sub bab tentang peran ahli gizi, organisasi profesi gizi dan kelembagaan gizi serta pendekatan perencanaan gizi untuk pembangunan nasional di masa mendatang juga mungkin perlu direformulasi. Kita tunggu tulisan dan ulasan mengenai hal-hal ini di edisi berikutnya.

Selalu sehat dan terus produktif Prof Kirman.....

Bogor, 5 Juli 2024

Prof. Dr.Ir. Drajat Martianto, M.Si

Guru Besar Ilmu Gizi Masyarakat IPB

*Kepala Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi dan Kesehatan
Co-Director KFI*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	ix
SAMBUTAN	xii
KESAN-KESAN	xxxvi
UCAPAN TERIMA KASIH.	xlii
PENDAHULUAN	1
I. RINGKASAN DAN “UPDATING” BUKU GIZI PEMBANGUNAN (2016)	3
Menjalankan Tugas Program Gizi dalam Perencanaan Pembangunan Nasional (1975-1996)	3
II. MEMPERKENALKAN KONSEP GIZI DAN PEMBANGUNAN.	14
Dimulai di tanah Rencong, Aceh (1961-1965)	14
Menulis Makalah tentang Gizi dan Pembangunan di Majalah LIPI.	15
Dimensi Gizi dalam Pembangunan Nasional	15
III. MEMBERI CONTOH PERENCANAAN PROGRAM GIZI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (1974)	30
Priorities in Dealing with Nutrition Problems in Indonesia	30
Economic Growth, Equity and Nutritional Improvement in Indonesia.	32
Membangun Sistem Kewaspadaan Gizi (Nutrition Surveillance)	34
Food and nutrition security and the economic crisis in Indonesia ..	36
Merancang PMT-AS Tahun 1996.	37
IV. MENGENALI SEJARAH 3 TOKOH GIZI NASIONAL –EIJKMAN, POERWO SOEDARMO, WIDJOJO NITISASTRO- DAN ALAN BERG TOKOH GIZI INTERNASIONAL	40
Menulis tentang Prof. Eijkman	40
Menulis tentang Prof. Poerwo Soedarmo	40
Menulis tentang Prof. Widjojo Nitisastro: “Sejak Awal Yakin Pembangunan Nasional Tidak Identik dengan Pembangunan Ekonomi”	42
Mengenal Alan Berg, Ahli Gizi Bank Dunia	47

V. MENGINGATKAN SEJARAH GIZI DAN KELEMBAGAAN SERTA KAITANNYA DENGAN BEBERAPA ASPEK SOSIAL POLITIK DAN EKONOMI	52
Program Gizi Memerlukan Perencanaan Holistik	54
Pembangunan manusia	56
Sejarah Asal Kata "GIZI" Sebagai Terjemahan dari Kata "NUTRITION"	58
Sejarah Asal Kata/Istilah "Gizi" Sebagai Terjemahan Kata Inggris "Nutrition"	59
Sejarah Perkembangan Gizi Seimbang di Indonesia	62
Pendahuluan	62
Dari Basic Four, Empat Sehat Lima Sempurna, ke Gizi Seimbang ..	63
Gizi Seimbang Era Repelita	65
Gizi Seimbang Pasca Repelita	66
Logo Gizi Seimbang Dunia	69
Status Gizi dan Masyarakat yang Demokratis	72
Gizi Buruk, Kemiskinan, dan KKN.	74
Kemiskinan	77
Kemiskinan dan gizi buruk	78
Gizi adalah Juga Isu Ekonomi	80
Mengkritisi Susu untuk Anak Sekolah di Pedesaan	84
Kelebihan Gizi Ancam Golongan Menengah Ke Atas	87
VI. MENJELASKAN MASALAH GIZI DAN PEMECAHANNYA	88
Masalah Kelaparan Tersembunyi	88
Biofortifikasi	89
Masalah Kekurangan Vitamin A : Meluncurkan Proyek Fortifikasi Vitamin A pada Minyak Goreng	91
Launching of the Vitamin A Project	91
VII. MEMPERJUANGKAN PEMECAHAN MASALAH GIZI	94
Soekirman Berjuang Memenuhi Gizi Rakyat	94
Fighting the fight for nutrition as key to economic and social development	98
VIII. BIOGRAFI	102
Pengalaman Kerja sebagai Tenaga Kesehatan Masyarakat	103
Kegiatan di Forum Internasional	105
IX. KESIMPULAN, PENUTUP, DAN HARAPAN	109
X. TENTANG PERSAGI, KFI, DAN AIPVOGI	112

BEDAH BUKU GIZI PEMBANGUNAN

Kumpulan Tulisan Prof. Soekirman (1961 – 2015)



*Penyerahan Mockup buku Gizi Pembangunan (GP) kepada almarhum Bapak Prof. Sumarlin Menteri
Ketua Bappenas (1978-1983) pada acara peluncuran buku dan ulang tahun
Prof Soekirman ke-80 (2016) di Jakarta*

SAMBUTAN

PELUNCURAN BUKU “PENGABDIAN PROF. SOEKIRMAN SEBAGAI AHLI GIZI”

Oleh : Ir. Franky Welirang

Ketua Dewan Pengawas KFI

Mengenal Profesor Soekirman sungguh sebuah kesempatan yang langka dan sangat berharga. Bahkan sampai saat ini, sudah 30 tahun saya kenal Profesor Soekirman tetap menjadi sosok yang sama yakni seorang “Pejuang Gizi” yang tak kenal lelah. Pejuang gizi seumur hidup yang terus peduli dan menjadi lokomotif bagi dunia industri dalam hal gizi.

Pertama kali mengenal beliau, saya masih tergolong belia usia 40-an. Masa muda dimana saya belum paham banyak soal gizi. Hanya sebatas pemahaman bahwa manusia itu butuh vitamin. Tapi perlahan dan bertahap, dari Prof Soekirman saya jadi lebih paham secara detail akan jenis dan manfaat dari vitamin dan gizi. Bahkan dampak atau risiko yang terjadi bila kekurangan gizi.

Dalam dunia ekonomi, ada istilah soko guru ekonomi. Maka Prof Soekirman adalah soko guru gizi Indonesia. Gizi bagian dari peradaban manusia, karena gizi menyangkut pertumbuhan dan perkembangan manusia.

Satu hal fundamental yang dapat dipelajari dari Prof Soekirman adalah belajar akan istilah kelaparan tersembunyi. Lapar akan makanan adalah hal yang jelas kelihatan. Tapi apakah makanan yang dikonsumsi sudah mengandung zat gizi dan kaya akan gizi? Kalau tidak, maka itulah namanya “kelaparan tersembunyi”.

Inilah yang membuat saya semakin tertarik untuk saat diajak beliau untuk terjun langsung dalam mengatasi kekurangan gizi atau lapar yang tersembunyi itu. Sebagai bagian dari

pelaku industri di sektor bahan makanan tepung terigu, tentu mengundang perhatian khusus dan serius.

Di tahun 1997, tepung terigu sebagai bahan pangan yang bisa diolah untuk beragam jenis makanan dan digemari seluruh kalangan, mulai dilirik sebagai peluang besar dan strategis untuk menjadi sumber gizi. Maka muncullah gagasan dari Prof Soekirman yang namanya fortifikasi tepung terigu. Tahun 2000 proyek fortifikasi tepung terigu semakin diintensifkan dan menjadi langkah strategis dalam mengatasi kelaparan tersembunyi.

Pengentasan masalah gizi menjadi wujud nyata komitmen kebangsaan Prof Soekirman. Bahkan di usia yang sudah lanjut memasuki 88 tahun, ia tak pernah lelah menggagas dan berbuat tentang masalah gizi. Apalagi kebutuhan gizi bukan sejak manusia itu lahir, tapi justru sejak si bayi masih berada dalam rahim sang ibu. Dari sinilah kita mengenal yang namanya 1000 Hari Kehidupan. Kehidupan yang sesungguhnya sudah ada sejak masa-masa kehamilan.

Dalam perjalanan perjuangannya seputar kebutuhan gizi anak bangsa, Prof Soekirman menjadi jendela bagi kita untuk mengenal lebih dalam akan kondisi sesungguhnya para murid di taman kanak-kanak hingga tingkat sekolah dasar di desa-desa. Menelusuri keadaan anak-anak di desa-desa membuat kita semakin melek akan yang namanya kelaparan tersembunyi.

Jadi, sungguh banyak pembelajaran berharga dari setiap momen perjuangan bersama Prof Soekirman. Dan di masa lanjut usia beliau, tentu kita rindu akan kehadiran pejuang-pejuang gizi anak bangsa. Kiranya buku edisi terbaru ini tak hanya menjadi memperkaya gagasan, tetapi juga menguatkan komitmen dan semangat baru bagi setiap pembacanya untuk terus ikut berkarya agar tak lagi ada bahaya kelaparan tersembunyi.

PAK KIRMAN YANG SAYA KENAL

Oleh : Prof. dr. Fasli Jalal, Sp.GK, Ph.D

*Rektor Universitas YARSI dan pernah menjabat sebagai Dirjen
PLSP, Dirjen PMPTK, Dirjen Dikti dan Wakil Menteri Pendidikan
Nasional serta Kepala BKKBN RI.*

Bagi saya Pak Kirman adalah segala-galanya. Beliau yang membukakan pintu bagi saya, seorang anak desa dari kaki Gunung Sago Sumatera Barat, bisa berkarir di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang “powerful” dan prestisius di masa Orde Baru. Pak Kirman adalah atasan yang sekaligus guru, fasilitator, mentor, ayah dan mitra berdiskusi tentang karir dan kehidupan. Beliau juga menjadi “role model” saya dalam menjalankan tugas sebagai akademisi yang diberi amanah sebagai birokrat atau waktu itu dikenal sebagai teknokrat.

Di awal tahun 1990 saya ditawari Pak Kirman membantu beliau di Bappenas. Waktu itu saya baru saja menyelesaikan penelitian lapangan selama satu tahun di Sumatera Barat dan sedang menyelesaikan tahun keempat program doktor (Ph.D) di Universitas Cornell, Ithaca, New York, Amerika Serikat. Secara teori masih diperlukan satu tahun lagi mendapatkan gelar Ph.D. Tantangan saya cukup berat karena bila saya tidak lulus untuk program doktor maka saya juga tidak mendapatkan gelar master disebabkan saya memilih program Ph.D langsung tanpa melalui program master. Dari 56 orang penerima beasiswa master dari USAID melalui BKKBN, yang waktu itu dipimpin Prof. Haryono Suyono, dimungkinkan bisa dibiayai sampai Ph.D bila diterima oleh perguruan tinggi di Amerika Serikat melalui program Ph.D langsung. Setelah melalui perjuangan cukup berat akhirnya saya bisa diterima program langsung Ph.D ini di Universitas Cornell, Dr. Triono Sundoro di Universitas Yale dan Dr. Hari Kusnanto serta Dr. Hari Purnomo di Universitas Johns Hopkins.

Saya salut dengan Pak Kirman karena kesabaran dan komitmen beliau yang bersedia menunggu satu tahun sebelum saya bergabung ke Bappenas. Beliau lah yang membela saya sewaktu dicek ternyata pangkat saya tidak memenuhi syarat diusulkan menjadi Kepala Biro (sekarang disebut Direktur) Kesehatan dan Gizi Bappenas. Syarat pangkat minimal menduduki jabatan Kepala Biro atau Eselon II adalah IV/c, berdasarkan peraturan Presiden, sedangkan pangkat saya baru III/b. Tahun 1991 saya sebetulnya sudah 9 tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun karena kami para dokter yang menjadi dosen sering tidak memerhatikan kenaikan pangkat dan selama 4 tahun menjalani Pendidikan doktor saya tidak bisa naik pangkat, maka pangkat saya baru III/b. Pak Kirman tetap mengusulkan saya sebagai Kepala Biro Kesehatan dan Gizi pada Prof. Saleh Afif, Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Saya dan Prof. Mustophadijaya, Deputy Kepala Bappenas Bidang Administrasi, dipanggil menghadap Bapak Saleh Afif. Pak Mustopha menjelaskan panjang lebar tentang adanya Peraturan Presiden yang baru saja dikeluarkan yang mengatur pangkat minimal dari PNS bisa diangkat menjadi pejabat struktural seperti Kepala Biro/Direktur atau Deputy/Direktur Jenderal. Saya masih ingat bagaimana Pak Saleh Afif mengatakan dengan tegas, "Mus, Fasli Jalal harus menjadi Kepala Biro Kesehatan dan Gizi, Bappenas. Agar diselesaikan administrasinya". Akhirnya saya menjadi kepala biro termuda (37 tahun) dengan pangkat terendah (III/b).

Begitu diterima di Bappenas, Januari 1991, saya langsung dibimbing secara spartan oleh Pak Kirman menjadi seorang perencana. Prinsipnya kita harus siap bekerja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Saya sering bermalam di kantor dan tidur beralaskan sajadah. Kerja, kerja, kerja dan kerja adalah jargon Pak Kirman yang harus kami turuti dengan sepenuh hati. Saya masih ingat petuah Pak Kirman pada kami bahwa sebagai perencana di Bappenas jangan sekali-kali menanyakan pada atasan bila

diberi tugas kapan harus selesai. Karena pasti jawabannya adalah, “Ya kemarin!”.

Pak Kirman mendidik kami bukan dengan kata-kata, bukan dengan aturan-aturan dan bukan dengan menunjukkan posisi sebagai atasan. Beliau mendidik kami dengan contoh, perbuatan, ketauladanan dan dengan kekeluargaan. Beliau datang paling pagi walaupun berpangkat paling tinggi di Kedeputan Sosial Budaya Bappenas. Dia juga pulang paling akhir sehingga kami berupaya mencari alasan agar bisa pulang lebih dahulu dari beliau walaupun waktunya sudah jauh melewati jam kerja kantor. Tidak jarang kami harus bekerja di hari libur. Pak Kirman sudah datang lebih awal dan sudah mulai bekerja sebelum kami datang. Bagi beliau kita harus menguasai bidang yang kita pegang karena itu belajar dari buku, jurnal-jurnal hasil penelitian, publikasi atau monograf yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga bilateral dan multilateral sangat dianjurkan dan difasilitasi beliau. Sering Pak Kirman mempertemukan kami dengan tokoh-tokoh dunia yang bukunya sering saya temui berjejer di toko buku di Changi International Airport, Singapura. Proses penguatan kapasitas pribadi kami sebagai perencana yang membuat kami percaya diri hadir di berbagai rapat-rapat di Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan bila memimpin rapat-rapat perencanaan di Bappenas. Taktik dan strategi bekerjasama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota juga diajarkan beliau. Dengan modal itulah saya percaya diri memimpin berbagai delegasi Indonesia membahas berbagai kerjasama pembangunan antara lain dengan Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, UNICEF, UNESCO, WHO dan USAID (Amerika Serikat), GTZ (Jerman), JICA (Jepang), dan AUSAID (Australia).

Satu hal yang saya kagumi dari Pak Kirman adalah sikap beliau yang sangat anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Saya menyaksikan bagaimana seorang Pak Kirman, yang lemah lembut, terbuka dan selalu ramah dalam berhubungan

berubah menjadi seorang yang sangat keras, tegas dan tanpa kompromi kalau sudah menyangkut KKN. Pak Kirman sampai merah mukanya dan bergetar bibirnya kalau mendengar atau membicarakan ada korupsi atau kecurigaan korupsi dari proyek-proyek yang direncanakan dan dianggarkan Bappenas. Saya melihat sendiri betapa seorang pejabat yang sering diperbincangkan “kurang bersih” dari KKN tidak diterima Pak Kirman di Bappenas walaupun telah berkali-kali berharap ingin bertemu. Selama lima tahun menjadi bawahan langsung beliau saya tidak pernah sekalipun disuruh menemui pengusaha atau mendorong sebuah proyek tertentu atau memfasilitasi keluarga Pak Kirman. Tentu hal ini dipengaruhi oleh keyakinan beliau sebagai seorang Kristiani yang taat namun selalu menghargai dan memberikan kemudahan bagi kami, bawahan beliau, yang sebagian besar adalah penganut Islam. Di mata saya Pak Kirman seorang yang luhur dan berbudi mulia yang jauh lebih pantas ketimbang saya menerima Bintang Mahaputera Utama RI. Semoga di akhirat nanti Pak Kirman menerima imbalan yang jauh lebih besar dari yang beliau terima di dunia. Aamiin.

Bagi saya Pak Kirman adalah Bapak Gizi Pembangunan. Banyak bukti yang mendukung pendapat saya. Pertama, Pak Kirman telah berhasil menerjemahkan keinginan Bapak Prof. Wijojo Nitisastro, Menteri PPN dan Kepala Bappenas yang legendaris, agar pembangunan ekonomi harus menurunkan dan mencegah kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal itu dimasukkan ke dalam Bab Pangan dan Gizi dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang menjadi salah satu Bab penting dan dirujuk dalam pembangunan nasional dan daerah. Dalam Bab ini digandengkan sektor pangan (sebagai salah satu sektor dari Bidang Ekonomi) yang besar, karena terdiri dari tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan, dengan sub sektor gizi, yang sebetulnya adalah bagian (kecil) dari keseluruhan sektor Kesehatan (salah satu sektor di Bidang Sosial). Oleh karena itu setiap perencanaan

pangan harus diikuti dengan perencanaan gizi, yang akhirnya dipakai menjadi indikator pembangunan nasional dan daerah. Tidaklah berhasil pembangunan bila keberhasilan di sektor pangan tidak diiringi dengan perbaikan gizi masyarakat.

Banyak pihak mempertanyakan kenapa gizi disatukan di Bab Pangan dan Gizi, bukan menjadi bagian dari sektor Kesehatan. Tentu tidak mudah bagi Pak Kirman meyakinkan pimpinan Bappenas kenapa Bab Pangan dan Gizi tetap harus digandengkan. Keputusan Bappenas menyatukan Pangan dan Gizi dalam satu Bab perencanaan diapresiasi oleh berbagai pakar pembangunan di tingkat dunia, terutama yang bertugas di Bank Dunia.

Cukup banyak pihak yang mencoba memisahkan Bab Pangan dari Gizi dan mendorong agar gizi dimasukkan ke Bab sektor Kesehatan karena selama ini dipahami bahwa gizi adalah bagian dari Kesehatan dan lebih terkenal sebagai bidang kesehatan yang mengurus makanan pasien di rumah sakit. Pak Kirman selalu menjadi palang pintu terdepan yang mencegah pemisahan tersebut. Saya menyaksikan betapa fasihnya Pak Kirman menjelaskan konsep Gizi Pembangunan pada berbagai pertemuan lintas sektor dan pada pertemuan dengan jajaran pemerintah daerah baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Di Bappenas hubungan antara Biro Pertanian, di bawah Deputy Ekonomi, sangat erat dengan Biro Kesehatan dan Gizi di bawah Deputy Sosial Budaya, karena saling isi mengisi dalam membuat perencanaan dan memonitor pelaksanaan serta melaporkan bersama hasil program-program pangan dan gizi dalam Laporan Presiden kepada DPR RI setiap bulan Agustus.

Kedua, adalah perhatian Pak Kirman yang besar pada penyiapan tenaga ahli gizi dalam berbagai jenjang Pendidikan, mulai dari D1 Gizi (dulu sekali), diikuti D3, S1, dan S2 serta S3 Gizi dari berbagai Lembaga Pendidikan gizi di Indonesia, baik dari rumpun gizi dan dietetik atau rumpun kesehatan ataupun rumpun pertanian.. Pak Kirman berhasil mendapatkan dukungan yang

besar dari Bank Dunia peningkatan jumlah dan mutu Lembaga pendidikan ahli gizi. Di bawah kepemimpinan Pak Kirman dibangun berbagai Akademi Gizi (sekarang bertransformasi menjadi Politeknik Kesehatan Negeri) dan didukung berbagai program pengembangan SI ilmu gizi di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) di berbagai perguruan tinggi negeri.

Pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu gizi juga dikembangkan, seperti Puslitbang Gizi, Kementerian Kesehatan di Bogor dan di Fakultas Gizi Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga di IPB. Penelitian-penelitian dari Indonesia menjadi rujukan dunia, terutama Gangguan Akibat Kekurangan Yodium, Anemia Kekurangan Zat Gizi Besi dan Defisiensi Vitamin A serta Kurang Energi Protein. Kita bangga sebagai ahli gizi dari Indonesia saat hadir di forum-forum besar dunia yang menjadi pembicara kunci adalah peneliti Indonesia dan menyampaikan hasil-hasil penelitian di Indonesia. Program pembangunan pangan dan gizi didasarkan pada pembuktian ilmiah (*evidence-based policy formulation and planning*). Setiap lima tahun dilaksanakan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPNG), yang diadakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Bersama Bappenas dan Kementerian serta Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait, perguruan tinggi dan organisasi profesi. Hasil dari WKNPG ini dijadikan dasar penyusunan bab pangan dan gizi REPELITA selanjutnya. Pak Kirman adalah salah satu tokoh kunci dalam perencanaan dan pelaksanaan WNPNG serta pemanfaatan hasil-hasilnya penyusunan program pangan dan gizi nasional.

Ketiga, pada waktu Bapak Ginanjar Kartasasmita menjadi Menteri PPN/Kepala Bappenas, dilahirkan Program Instruksi Presiden Desa Tertinggal (Program IDT). Program ini memberikan bantuan tunai langsung sebesar Rp20 juta per desa selama 3 tahun kepada lebih dari 20.000 desa tertinggal di Indonesia. Tujuannya adalah mempercepat pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan menaikkan produktivitas serta

kesejahteraan warga desa yang diberi modal, sesuai dengan kebutuhan mereka, dari dana IDT.

Saya meneliti tentang dampak dari makanan tambahan pada anak usia bawah lima tahun (balita) yang terinfeksi cacing. Makanan yang diberikan adalah yang kaya sumber vitamin A dari nabati dan kaya lemak. Kepada anak yang terinfeksi cacing, baik cacing usus, cacing tambang maupun cacing kremi, diberikan obat cacing memperbaiki penyerapan makanan di usus anak. Makanan diberikan selama satu bulan setiap hari berupa makanan jajanan atau "*snack*" setara dengan kecukupan kebutuhan vitamin A anak satu hari. Setelah satu bulan kadar vitamin A dalam darah anak dibandingkan kenaikannya dengan anak kelompok kontrol. Hasilnya sangat menggembirakan bahwa bila anak mendapatkan makanan tambahan yang kaya sumber vitamin A, walaupun dari nabati/tumbuh-tumbuhan, dan ditambah dengan makanan sumber lemak maka status gizinya semakin membaik.

Dalam sebuah perjalanan kami ke Provinsi NTT, melihat kondisi gizi anak sekolah, di provinsi yang waktu itu memiliki tingkat kekurangan gizi tertinggi di Indonesia, kami menemukan bahwa sejumlah anak ketiduran di kelas selama jam pelajaran. Oleh guru dilaporkan hal itu, karena anak tidak makan pagi sebelum berangkat sekolah. Dan penelitian saya di Sumbar menunjukkan bahwa cukup banyak anak yang belajar di PAUD makan terakhir jam 5:00 sore di hari sebelumnya. Oleh karena itu mereka sering ketiduran dan tidak bergairah mengikuti pelajaran apalagi mengikuti kegiatan-kegiatan yang membutuhkan energi besar seperti bersenam atau berolah raga.

Dari dua fakta tersebut Pak Kirman memimpin Tim merencanakan Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS). Rencana ini diajukan pada Pak Ginanjar sebagai program pendukung Program IDT. Dukungan ekonomi diberikan kepada masyarakat pedesaan melalui Program IDT sedangkan perbaikan gizi dan kesehatan serta pemberdayaan masyarakat

didukung dengan Program PMTAS. Pak Ginanjar menyetujui ide dari Program PMTAS sebagai pendamping dari Program IDT. Namun beliau menugaskan kami menyiapkan konsep ini secara matang agar bisa disajikan di depan 7 menteri kabinet yang lain mendapatkan komentar buat perbaikan dan akhirnya mendapatkan persetujuan. Sebagai Kepala Biro Kesehatan dan Gizi Bappenas saya ditunjuk menjadi Ketua Tim Teknis Persiapan Program PMTAS.

Pada hari yang disepakati, atas undangan Pak Ginanjar, hadirilah 7 menteri di Bappenas, yaitu Menteri Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Agama, Sosial, Pertanian, Pangan, Dalam Negeri dan Keuangan. Ide dasar PMTAS adalah meningkatkan status kesehatan dan gizi anak sekolah dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI). baik negeri maupun swasta di semua desa tertinggal, serta pembiasaan pola hidup bersih dan sehat sejak dini. Makanan tambahan diberikan berupa makan jajanan (snack) sebanyak 3 hari setiap minggu. Makanan disiapkan menunya oleh ahli gizi di Puskesmas dan harus menggunakan bahan pangan setempat atau sumber makanan lokal. Paling jauh sumber makanan lokal tersebut boleh di beli di pasar kecamatan, bila desa tidak bisa menghasilkan sendiri secara cukup. Makanan tambahan tersebut harus memberikan kontribusi paling sedikit 5 gram protein dan 15 persen dari kebutuhan kalori anak per hari. Setiap 6 bulan diberikan obat cacing. Dana PMTAS dikirim langsung ke rekening sekolah dengan dua penanggung jawab yaitu kepala sekolah dan perwakilan orang tua. Yang menyiapkan makanan tambahan, mulai dari membeli bahan, memasak, membagikan dan mencatat konsumsi anak adalah PKK Desa bersama ibu-ibu dari anak sekolah. Jadwal dibuat agar setiap komponen pendukung PMTAS mendapat tugas berperan sehingga meningkatkan kepelikikan dari PMTAS. Secara berjenjang diberikan penguatan tentang Pendidikan gizi dan Kesehatan kepada PKK desa dan orang tua murid.

Pak Kirman diminta Pak Ginanjar menyampaikan ide dasar dari rencana Program PMTAS dan meminta masukan dari

para Menteri yang hadir. Dengan meyakinkan Pak Kirman menyampaikan program ini secara rinci dan dengan tangkas menjawab pertanyaan para Menteri. Diujung dari diskusi akhirnya semua Menteri sepakat mendukung Program PMTAS karena menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan program ini akan meningkatkan derajat kesehatan dan gizi anak sekolah SD/MI baik negeri maupun swasta, meningkatkan kapasitas belajar dan mencegah anak dari putus sekolah atau “drop out” sehingga bisa menyelesaikan wajib belajar. Menteri agama juga menyampaikan hal sama. Menteri Pertanian mengemukakan bahwa program PMTAS sangat cocok dengan upaya meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas dan pendapatan petani karena tersedianya “*offtaker*” dari produksi masyarakat desa tertinggal berkat adanya dana PMTAS. Menteri Pangan (waktu itu) mendukung karena PMTAS dapat memperkuat program diversifikasi pangan dan gizi terutama dengan menggunakan makanan lokal. Menteri Sosial melihat PMTAS sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Menteri Dalam Negeri menyampaikan PMTAS adalah contoh pemberdayaan masyarakat desa melalui penguatan kualitas sumber daya manusia yang amat diperlukan oleh desa-desa tertinggal. Dan Menteri Keuangan setuju dengan PMTAS karena dana yang disalurkan langsung ke rekening sekolah melalui Bank Rakyat Indonesia, akan memperkuat sumber pembiayaan pembangunan di desa-desa tertinggal. Setelah mendapat persetujuan 7 menteri maka dana PMTAS meningkat pesat dari Rp24 miliar tahun pertama, menjadi Rp126 miliar tahun berikutnya dan meningkat lagi menjadi Rp254 miliar. Sebuah angka yang sangat besar waktu itu.

Keempat, Presiden Soeharto sangat peduli dengan Kesehatan ibu dan anak. Di awal tahun 1990-an Angka Kematian Ibu (AKI) masih sekitar 390 per seribu kelahiran hidup. Begitu juga dengan Angka Kematian Bayi (AKB), yang besarnya lebih dari 71 per seribu kelahiran hidup. Oleh karena itu sejak tahun 1980-an sudah dibangun dan dikembangkan pos pelayanan

terpadu (posyandu) yang menjadi ujung tombak memberikan pelayanan bagi ibu hamil dan anak balita. Menurut meta analisis berbagai studi internasional dibuktikan bahwa lebih dari 50 persen kematian berhubungan dengan kekurangan gizi. Oleh karena itu pemeriksaan gizi ibu hamil dan pertumbuhan anak balita menjadi salah satu fokus di posyandu. Menyiapkan dan membimbing kader diperlukan tenaga kesehatan profesional. Baru sedikit desa yang memiliki puskesmas pembantu (pustu), dipimpin oleh seorang perawat, sementara bidan desa baru dimiliki oleh sebagian kecil desa. Akibatnya dukungan terhadap posyandu diberikan oleh tenaga kesehatan di puskesmas, yang tentu cukup jauh jaraknya.

Presiden Soeharto menginstruksikan agar direncanakan Program Bidan di Desa dengan tujuan menyediakan satu bidan di setiap desa. Bappenas ditugaskan membuat perencanaan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan. Sebagai Kepala Biro Kesehatan dan Gizi Bappenas saya ditugaskan oleh Pak Kirman menyiapkan perencanaannya. Di tahun 1992 jumlah desa sekitar 54 ribu. Sebagian sudah memiliki Puskesmas yang berlokasi di desa tersebut dan sudah mempunyai bidan. Sebagian desa lagi dapat dilayani oleh bidan yang bertugas di puskesmas. Setelah dihitung ada sekitar 36 ribu desa yang memerlukan bidan baru mencapai tujuan "satu desa satu bidan". Menurut Pak Harto program ini harus selesai dalam tiga tahun. Artinya setiap tahun, secara rata-rata diperlukan 12 ribu lulusan pendidikan bidan yang begitu lulus siap ditempatkan sebagai Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan kontrak dan fasilitas yang sangat memadai. Kementerian Keuangan menjamin tidak ada hambatan formasi Bidan PTT dan semua biaya mendidik dan menempatkan serta membayar kesejahteraan mereka disiapkan anggarannya oleh Bappenas bersama Kementerian Keuangan.

Ditingkat teknis saya berkoordinasi dengan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan (Pusdiknas). Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan secara detail bagaimana mendidik

36 ribu bidan baru dalam 3 tahun. menjadi bidan lulusan SMP atau sederajat dididik selama 3 tahun untuk menjadi perawat kemudian baru ditambahkan pendidikan bidan selama satu tahun. Jadi lama pendidikan adalah 4 tahun. Kapasitas pendidikan waktu itu sekitar 4 ribu. meningkatkan kapasitas menjadi 12 ribu pertahun dibutuhkan tiga cara: pertama, menambah kapasitas dari sekolah bidan yang sudah ada; kedua, mengembangkan kemampuan mendidik bidan dari sekolah-sekolah pendidikan keperawatan yang dianggap mampu; dan ketiga, dengan mendidik bidan cara baru, yaitu tanpa melalui pendidikan keperawatan selama 3 tahun tapi langsung menjalani pendidikan selama 3 tahun. Cara ini diperlukan di daerah-daerah yang tidak punya SPK atau sangat sedikit SPK bermutu yang dimiliki, seperti di Provinsi Papua. Selama 3 tahun pendidikan bidan khusus ini siswa bidan dididik setiap tahun sampai tamat dengan cara belajar bergantian satu semester di rumah sakit kabupaten, yang ada dokter ahli kebidanan dan dokter ahli anak, dan satu semester di puskesmas mendapatkan pengalaman lapangan di bawah bimbingan bidan dan dokter puskesmas. Melakukan penjaminan mutu dan penguatan kapasitas dari Lembaga-lembaga yang terlibat dibentuk konsorsium beranggotakan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Ahli Obstetri dan Ginekologi (POGI), Ikatan Dokter Ahli Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dan Yayasan PERINASIA, sebuah Yayasan Nirlaba yang bergerak memajukan kesejahteraan ibu dan anak di Indonesia.

Di Tingkat kebijakan Pak Kirman membawa saya menemui dr. Adhyatma, M.P.H Menteri Kesehatan waktu itu. Pak Adhyatma mempertanyakan apakah mungkin menaikkan kapasitas pendidikan bidan sebesar itu, padahal bidan adalah tenaga kesehatan yang melayani manusia, bukan hewan, tumbuhan, barang atau jasa. Pak Kirman menjelaskan bahwa secara teknis sudah dianalisa kebutuhan dan disiapkan rencana detail dari input serta proses yang diperlukan menyukseskan Program Bidan di Desa sesuai instruksi dari Pak Harto. Dengan teliti Pak

Adhyatma mempelajari data-data tersebut dan setelah yakin dengan perencanaan yang disusun Bappenas ditambah dengan adanya konsorsium organisasi profesi yang mendukung penuh Program Bidan di Desa akhirnya memberikan persetujuan beliau. Menjalankan program ini, anggaran Pembangunan Puskidnakes dinaikkan 3 kali lipat.

Di sini saya melihat visi jauh Pak Kirman yang yakin masalah Kesehatan dan gizi Masyarakat harus didekati dengan mengutamakan preventif dan promotif serta terus menerus memberdayakan keluarga melalui komunikasi perubahan perilaku. Hal ini membutuhkan strategi Pendidikan Kesehatan dan Gizi yang komprehensif dan efektif serta efisien. Dari pengalaman panjang Pak Kirman di Provinsi Aceh, di awal berkarir sebagai ahli gizi masyarakat, pak kirman sudah membuktikan bahwa program-program yang melibatkan masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan kemanfaatan sebesar-besarnya buat masyarakat, terutama yang paling rentan, yaitu anak-anak dan perempuan, adalah investasi terpenting membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Posyandu adalah contoh sebuah program yang memenuhi kriteria ini. Dan bidan desa diharapkan menjadi tenaga kesehatan terdepan meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat.

Dari 4 contoh peran Pak Kirman dalam memposisikan gizi sebagai masalah pembangunan bangsa, yang secara konsisten beliau perjuangkan sepanjang karir beliau, terutama selama 20 tahun menjadi perencana dan kemudian Deputy pimpinan Kementerian PPN/Bappenas, Pak Kirman sangat pantas dinobatkan menjadi Bapak Gizi Pembangunan. Saya berharap semoga PERSAGI, yang dulu telah menobatkan Prof. Poerwo Sudarmo sebagai Bapak Gizi Indonesia, maka sudah waktunya PERSAGI menjalankan tugas sejarahnya menobatkan Prof. Soekirman SKM., MPS., Ph.D, sebagai Bapak Gizi Pembangunan. Insya Allah.

HUBUNGAN ERAT ANTARA DEMOKRASI DAN STATUS GIZI MASYARAKAT

*Oleh: Ninuk Mardiana Pambudy,
Redaktur Senior Harian Kompas (2020–sekarang)
Pemimpin Redaksi Harian Kompas (2018–2020)*

Ketika Prof. (Em) Soekirman mengirim pesan meminta saya ikut menulis di dalam buku menandai 88 tahun usianya, yang segera terlintas di pikiran adalah sosok seorang ahli gizi mumpuni yang konsisten, terus berkembang, tidak lekang oleh waktu.

Pada usia 88 tahun Prof Soekirman masih memperhatikan perkembangan kegizian di Indonesia dan dunia internasional. Dia mengikuti perkembangan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi andalan presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka. Program ini memberi makan bergizi gratis bagi anak usia dini yang bersekolah hingga siswa sekolah menengah atas. Program ini juga memberi makan bergizi gratis bagi ibu hamil dan anak balita.

Apa yang dipikirkan Prof. Soekirman dan diupayakan terwujud selama puluhan tahun menggeluti dunia kegizian akhirnya mulai menunjukkan tanda akan dilaksanakan pemerintah. Perbaikan gizi anak sekolah dan ibu hamil serta anak usia kurang dari tiga tahun dengan memberi makanan bergizi gratis menjadi jalan menyelesaikan kemiskinan. Bila program ini nantinya berjalan baik seperti janji presiden dan wakil presiden terpilih, apa yang menurut dia ada hubungan erat antara kecukupan gizi dan demokrasi yang berjalan baik akan terbukti.

Prof. Soekirman masih rajin mengirim saya berbagai bahan mengenai gizi. Mulai dari penggunaan kata gizi adalah lebih tepat daripada nutrisi untuk menjelaskan pangan manusia hingga beberapa artikel dari fora internasional mengenai gizi, termasuk mengenai makan bergizi gratis bagi anak sekolah di sejumlah negara.

Saya pertama kali mewawancarai Prof. (Em) Dr. Soekirman MPS-ID pada tahun 2002 dan setelah itu mengikuti perkembangan aktivitasnya, meski tidak seintens 20 tahun lalu. Wawancara pertama saya tersebut terbit di Harian Kompas pada Senin 17 Juni di halaman 16, di halaman sampul belakang dalam rubrik yang memuat sosok orang-orang yang memiliki sumbangan atau pengaruh besar di masyarakat. Wawancara tersebut saya beri judul "Status Gizi dan Masyarakat yang Demokratis", menjelaskan pemikiran Prof Soekirman mengenai pentingnya demokrasi dijalankan untuk membangun manusia secara setara dan berkeadilan.

Ketika membaca kembali hasil wawancara saya tersebut, saya merenung. Apa yang dipikirkan Prof. Soekirman lebih 20 tahun itu masih relevan hingga kini. Setelah krisis keuangan Asia 1998 yang berakibat bergantinya pemerintahan Soeharto dan Orde Baru, masyarakat internasional menyebut Indonesia sebagai negara yang berhasil bertransformasi menjadi negara demokrasi penuh. Memang, sejak lima tahun terakhir muncul sejumlah kritik mengenai kualitas demokrasi Indonesia, beberapa bahkan mempertanyakan apakah demokrasi kita mengalami stagnasi atau bahkan mundur (*backslide*). Meski demikian, Indonesia dijadikan contoh negara yang berhasil bertransformasi menjadi negara demokratis. Melihat perjalanan setelah tahun 1998 dan kualitas demokrasi Indonesia mau tidak mau muncul pertanyaan, apakah demokrasi Indonesia sudah berkualitas dan apakah setiap orang, setiap warga negara diuntungkan oleh demokrasi yang kita jalankan?

Prof. Soekirman sudah melihat bahwa demokrasi di suatu negara bila dijalankan secara konsisten akan membawa kemakmuran. Fungsi kontrol di lembaga-lembaga yang ada bila berjalan akan menjamin setiap warga negara memperoleh hak dan menjalankan kewajibannya. Termasuk memperoleh hak hidup layak yang salah satunya dicerminkan oleh kecukupan pangan dengan gizi seimbang. Pemenuhan pangan bergizi

dalam jumlah cukup bagi setiap orang adalah bagian dari pemenuhan hak asasi yang diakui secara universal dan di Indonesia hak tersebut dijamin Undang-Undang Dasar 1945.

Empat tahun setelah reformasi, Prof. Soekirman risau, terusik hatinya. Dia tidak melulu berkeluh kesah melainkan bertindak untuk memastikan hak asasi itu terpenuhi. Dalam wawancara pada Juni 2002 tersebut Prof. Soekirman sudah mendesak agar keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya diukur dari indikator-indikator makro, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan gini rasio, tetapi juga ukuran yang menyangkut kesejahteraan manusia. Ukuran keberhasilan pembangunan Indonesia sudah memasukkan angka kematian bayi, ibu melahirkan, dan penurunan jumlah anak stunting. Tetapi, apa yang diargumentasikan Prof. Soekirman 22 tahun lalu tetap relevan, yaitu keberhasilan pembangunan harus juga dapat menyelesaikan kekurangan gizi pada anak.

"Kekurangan gizi pada anak sebenarnya adalah bentuk dari kelaparan tak kentara. Itu salah satu ukuran kesejahteraan, selain kesehatan dan pendidikan," kata Prof Dr Soekirman MPS-ID (Harian Kompas, 17 Juni 2022). Lebih jauh laki-laki kelahiran Baureno, Bojonegoro (Jawa Timur), 2 Agustus 1936 itu mengatakan, pengalamannya selama 40 tahun saat itu memperlihatkan, selama masyarakat belum demokratis dan transparan, selama masih ada KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), masalah kekurangan gizi tidak akan bisa diatasi. Apa yang dikatakan Prof Soekirman banyak benarnya. Kita sering mendengar bagaimana beras bantuan sosial bagi keluarga miskin sering dikorupsi dengan berbagai cara, langsung dan tidak langsung. Mulai dari kualitas beras tidak memadai hingga kuantitas tidak terpenuhi.

Kekurangan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan sejak dari pembentukan kehidupan janin di rahim ibu hingga usia anak sekitar tiga tahun akan menentukan kualitas fisik, mental, dan kecerdasan anak hingga nanti dewasa. Kita tahu melalui berbagai penelitian longitudinal di sejumlah negara anak-anak

yang kekurangan gizi sejak awal kehidupan akan tumbuh tidak optimal fisik, kecerdasan, dan mentalnya sehingga memengaruhi daya saing di pasar tenaga kerja. Bila masalah ini terjadi pada 30 persen anak Indonesia, daya saing Indonesia sebagai bangsa akan terpengaruh secara nyata. Belum lagi biaya kesehatan yang harus dikeluarkan karena anak berpotensi mengalami penyakit degeneratif saat dewasa. Selain itu, sumber daya manusia yang tidak berkembang optimum dapat menimbulkan masalah sosial, budaya, dan politik seperti terjadi di sejumlah negara. Semua itu selalu mengusik Prof Soekirman sampai hari ini.

Konsisten dengan keyakinannya bahwa kecukupan pangan bergizi bagi setiap orang adalah cermin berjalannya demokrasi, Prof. Soekirman ikut menggagas Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) pada tahun 1996. Keyakinan bahwa terlaksananya demokrasi berkaitan erat dengan kualitas manusia dibuktikan ketika itu. Dana untuk program tersebut dikirimkan langsung ke desa melalui rekening desa di Bank Rakyat Indonesia atau melalui kantor pos. Dia meyakini, masyarakat desa tidak akan melakukan korupsi. Ternyata dia salah. Hasil evaluasi memperlihatkan ada desa yang menyalahgunakan dana itu. Demokrasi dalam arti partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi program tidak berjalan karena berbagai sebab.

Menulis mengenai sumbangan dan peran Prof. Soekirman tidak akan ada habisnya. Banyak hal telah dia lakukan, termasuk sebagai Ketua Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Nasional ikut gencar mengampanyekan penganekaragaman pangan. Bukan hanya untuk mengurangi tekanan terhadap produksi beras, tetapi juga untuk menjamin asupan gizi lebih seimbang dan bermutu.

Sayangnya upaya penganekaragaman pangan hingga saat ini belum berhasil mengurangi tekanan terhadap beras. Indonesia bahkan dipaksa mengimpor lebih dari tiga juta ton beras tahun lalu ketika fenomena iklim El Nino yang menyebabkan kekeringan menurunkan secara nyata produksi beras nasional. Prof.

Soekirman punya pengalaman lapangan dan di birokrasi (dua kali menjabat Deputy Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (1988-1993 dan 1993-1996)), selain sebagai pendidik, secara jeli melihat bahwa penganekaragaman pangan tidak berhasil karena pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat yang kemudian disempurnakan melalui Inpres Nomor 10/1979 memakai pendekatan proyek. Selain itu ukuran keberhasilannya tidak pernah diverifikasi dan pelaksanaannya rawan penyalahgunaan dana.

Dia juga salah satu pendiri Persatuan Ahli Gizi Indonesia dan kini menjadi penasihat. Dia juga masih aktif di Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia (KFI). Dia terus memperjuangkan fortifikasi pangan sebagai cara untuk meningkatkan kualitas manusia dengan biaya ekonomis. Pemberian yodium pada garam, misalnya, terbukti efektif mencegah gondok. Fortifikasi yodium tidak menaikkan harga garam secara signifikan, tetapi manfaatnya sangat banyak. Fortifikasi asam folat yang bersama vitamin B2, besi dan seng sudah wajib pada tepung terigu, membantu perkembangan otak pada 1.000 HPK.

Melalui KFI dia masih terus berupaya agar fortifikasi vitamin A dapat diberikan melalui minyak goreng curah. Minyak goreng ini lebih murah dan konsumennya masyarakat ekonomi menengah-bawah, sementara minyak goreng kemasan sudah difortifikasi tetapi harganya lebih mahal. Bersama KFI dia mengupayakan mendapat dana untuk survei kecukupan unsur mikro dalam makanan masyarakat Indonesia sebagai dasar melakukan fortifikasi, terutama untuk pangan masyarakat ekonomi bawah. Alasan dia, sumber makanan masyarakat berpenghasilan menengah-atas sudah beragam dan makanan yang beragam itu memberi cukup unsur mikro.

Dengan segala hal yang telah dia lakukan dalam semangat tetap tinggi, penuh integritas, dan konsisten hingga usianya

88 tahun, tidak heran banyak yang menjuluki Prof. Soekirman sebagai Bapak Gizi Indonesia. Dirgahayu, Prof. Soekirman. Semoga selalu sehat, panjang usia, dan terus produktif menyumbangkan pemikiran dan tenaga bagi rakyat Indonesia. ***

PROF. SOEKIRMAN: BIROKRAT YANG ILMUWAN

Oleh: Prof. dr. Endang L. Achadi. MPH, Dr.PH

Guru Besar Purnabakti FKM UI

Ketua Stunting Resource Center FKM UI

Menceritakan sosok Soekirman yang sangat saya hormati dan sayangi, tidak mudah. Untuk saya beliau adalah seorang guru, motivator, dan bapak.

Prof. Soekirman juga adalah “teman diskusi” yang tangguh. Bagaimana tidak? Pemahaman beliau tentang gizi sangat luas, baik mengenai ilmu dasar gizi, dan penterjemahannya terhadap intervensi/program seperti Fortifikasi Gizi, Pemberian Makan Anak Sekolah (PMT-AS) saat belum banyak orang membicarakannya, Susu untuk Anak Sekolah di Perdesaan, Gizi Mikro sebagai *Hidden Hunger*, Suplementasi Vitamin A, Pedoman Gizi Seimbang, sampai pada kebijakan, baik kebijakan yang spesifik maupun kebijakan nasional dalam hubungannya dengan masalah ekonomi, sosial, budaya dan politik. Terlebih lagi, pengetahuan beliau sangat *up to date*, sehingga setiap akan berdiskusi dengan beliau saya harus mencari berbagai literatur terkini tentang isu yang akan didiskusikan agar saya bisa “*keep-up*” dalam ber-argumentasi dengan beliau. Beliau rajin mengirimkan literatur berisi perkembangan keilmuan, Program dan Kebijakan terkini tentang Gizi dan Kesehatan. Prof. Soekirman, layaknya seorang guru dan bapak, sangat generous dalam berbagi ilmu.

Sebagai birokrat, beliau tidak memberi jarak, lebih bersikap sebagai profesional terhadap kami, walaupun aura wibawa dan keseriusannya tetap terasa sangat kuat. Dalam menyampaikan pendapat beliau juga sangat terukur.

Sisi lain dari Prof Soekirman yang membuat saya terkesan adalah saat pertama kali mendengar beliau bernyanyi dengan

suara yang bagus, mengikuti irama dengan tepat. Kesempatan lain dalam memahami siapa beliau adalah saat bersama-sama Prof dan almarhumah Ibu Soekirman pergi ke Turki untuk suatu konferensi, menyempatkan berbelanja di Grand Bazaar dan makan siang dipinggir selat Bosphorus yang indah. Saya melihat sosok almarhumah ibu dan Prof yang saling *care*

Sambil tetap Ing Ngarsa Sung Tulada, menjadi teladan dan contoh, beliau selalu Ing Madya Mangun Karsa, menjadi inspirasi bagi yang lebih muda untuk mencipta .. serta Tut Wuri Handayani, tak henti-hentinya mendorong dan memotivasi ..

Semoga tetap sehat dan bermanfaat bagi masyarakat dalam Limpahan Berkah Tuhan Yang Maha Kuasa. Aamiin YRA

PROF. KIRMAN, ILMUWAN YANG ISTIQOMAH

*Oleh: Prof. Dr. dr. Abdul. Razak Thaha, MSc, SpGK
Ketua Pengurus Yayasan Inisiatif Gizi (IGI)*

Prof. Soekirman adalah salah seorang dari amat sedikit ilmuwan yang istiqomah terhadap kebenaran ilmiah. Tidak pernah ragu dan takut menyatakan kebenaran ilmiah meski harus berhadapan dengan kekuasaan dan sebaliknya tidak pernah khawatir dicemooh karena berani mendukung pikiran cerdas dari seseorang penguasa yang mungkin pada saat itu tidak disenangi oleh sebagian besar sejawatnya.

Buku ini, makin menegaskan ciri istiqomah tersebut. Buku ini mencatat cukup teliti dan mengulas cukup lengkap napak tilas seorang Soekirman sejak muda. Mulai pada awal tahun 60-an di tanah Rencong sampai saat ini pada umur yang sudah uzur, 88 tahun. Masya Allah. Prof, Kirman tidak pernah kendor semangatnya, tidak pernah pudar kecermerlangan berpikirnya, dan yang paling mencengangkan, tidak pernah tertinggal kalau tidak dapat dikatakan masih terdepan dalam perkembangan keilmuan. Bukan saja di bidang gizi dan pangan yang selama ini dilekatkan dengan dirinya tetapi juga berbagai ilmu di luar ilmu gizi dan pangan. Lebih sering Prof. Kirman yang membagikan jurnal atau artikel-artikel terbaru di bidang gizi dan bidang-bidang terkait kepada kami-kami yang jauh lebih muda.

Contoh yang paling lawas dari sikap istiqomah terhadap kebenaran ilmiah ketimbang pemihakan kepada orang per orang setinggi apa pun kekuasaannya adalah ketika Prof. Kirman di satu saat mengkritik keras Presiden terpilih, pada saat meluncurkan program pembagian susu gratis kepada balita dan anak sekolah. Tetapi tidak dalam waktu yang lama, sangat singkat, Prof. Kirman sebaliknya mendukung Presiden terpilih dengan program makan

siang gratis terutama rencana pemberian makanan (tambahan) kepada anak sekolah. Prof. Soekirman adalah satu-satunya orang yang dengan cepat menulis surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika pelaksanaan SNI wajib terhadap fortifikasi tepung terigu dihentikan.

Membaca buku ini seakan menapaki sejarah sosok seorang ilmuwan yang menjadi sumber mata air kearifan, sosok yang hidupnya sangat sederhana, ramah dan rendah hati meski pernah menjabat jabatan eksekutif dalam pemerintahan yang cukup prestisius. Sosok yang sampai saat ini tak pernah henti dihormati sebagai teladan baik oleh mantan murid-muridnya maupun mantan bawahannya. Saya merasa sangat beruntung dan bersyukur ditakdirkan menjadi muridnya, teman diskusi dan debatnya, sekaligus sahabatnya yang akrab. Selamat ulang tahun Profesor. Semoga terus istiqomah sebagai seorang ilmuwan dan bermanfaat bagi orang banyak pada sisa umur yang insya Allah masih panjang. Amin

DI CORNELL INTERNATIONAL NUTRITION, NAMA PROF. SOEKIRMAN SERING DISEBUT

Oleh: Prof. dr. Veni Hadju, MSc, PhD

Guru Besar Ilmu Gizi, FKM UNHAS

Kaprodi S2 Ilmu Gizi, FKM UNHAS

Saat diterima menjadi mahasiswa S2 dalam Bidang Gizi (*International Nutrition*) di Cornell University tahun 1989, saya mendengar nama Pak Kirman sering disebut. Beliau adalah alumni Cornell yang saat itu mempunyai peran penting di Kantor Bappenas. Program Gizi yang dijalankan di Indonesia saat itu memang tidak terlepas dari peran beliau. Saat pulang belajar dari Cornell tahun 1996, saya mengenal beliau lebih dekat lagi dan sering terlibat dalam diskusi dan implementasi berbagai program dalam meningkatkan status gizi masyarakat di Indonesia.

Mengikuti jejak langkah Prof. Kirman dari masa mudanya sampai saat ini membuat diri kami ini merasa belum ada apa-apanya. Dalam usianya hampir 90 tahun, beliau tidak pernah berhenti berbicara upaya peningkatan gizi masyarakat. Walaupun berbagai kendala termasuk masalah kesehatan yang harus beliau hadapi, semangat beliau yang terus berkobar membuat semua hambatan tidak berarti. Kadang kekecewaan tampak terlihat dari wajah beliau bila ada yang tidak sesuai dengan apa yang beliau perjuangkan, namun tidak lama setelah itu beliau kembali akan memberi semangat kepada kita semuanya untuk menghadapi semua kendala itu.

Karunia umur yang panjang yang diberikan Allah kepada beliau merupakan anugerah yang besar kepada bangsa ini yang masih menghadapi berbagai masalah gizi. Beliau terus memberikan koreksi apabila ada implementasi yang belum

berjalan dengan baik di lapangan. Umur panjang beliau juga menjadi harta yang berharga buat kami karena dari pemikiran beliau lahir gagasan-gagasan baru yang inovatif. Kami yang juga sudah beranjak menua (di atas 60 tahun), seringkali merasa malu kalau kadang berpikir ingin berhenti dalam perjuangan ini. Semangat yang diperlihatkan beliau sepertinya tidak berbeda dengan saat beliau di tahun 60-an.

Kami mengucapkan selamat kepada Prof. Kirman atas karunia umur panjang serta seluruh karya-karyanya selama ini. Juga, tidak lupa ucapan terima kasih dari kami atas segala motivasi yang telah diberikan selama ini. Perjalanan panjang dalam menyelesaikan masalah gizi ini memang belum berakhir dan mungkin sampai akhir kehidupan dunia ini. Semoga bakti yang telah diberikan memberi makna yang berharga bagi Bangsa yang besar ini.

PERNAH JADI KETUA POKJA AHLI DEWAN KETAHANAN PANGAN

Oleh: Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, MS

Peneliti Senior Bidang Pangan dan Gizi

Kepala Badan Ketahanan Pangan 2000–2004; 2008–2014.

Pada tahun 2001 pemerintah Indonesia membentuk Dewan Ketahanan Pangan (DKP), satu lembaga non struktural yang diketuai oleh Presiden RI dengan anggota para menteri dan pimpinan lembaga terkait. Tugas DKP adalah membantu Presiden merumuskan kebijakan, melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan nasional (Keputusan Presiden No. 132 2001). Aspek ketahanan pangan dalam Kepres tersebut meliputi ketersediaan, distribusi, dan konsumsi serta mutu, gizi, dan keamanan pangan. Untuk membantu tugas DKP, Menteri Pertanian Prof. Bungaran Saragih, selaku Ketua Harian membentuk Kelompok Kerja (Pokja Ahli) DKP dan menetapkan Prof. Soekirman sebagai Ketua Pokja tersebut. Pada saat itulah saya sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (DKP Kementan) yang merangkap sebagai Sekretaris DKP mulai mengenal lebih dekat dan berinteraksi intensif dengan Prof Soekirman.

Sebagai Ketua Pokja Ahli, Prof. Soekirman secara gigih, sabar dan persuasif memperkenalkan pengertian gizi secara konseptual, permasalahan yang dihadapi, dan untuk mengatasinya menekankan pentingnya perencanaan dan implementasi pembangunan pangan dan gizi secara terintegratif kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan sistem pangan. Dalam kaitannya dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia unggul, pangan dan gizi diibaratkan sebagai satu mata uang dengan dua sisi, keduanya harus ada bersamaan secara seimbang. Pemikiran Prof. Soekirman yang ditularkan dalam lingkup DKP dan BKP

Kementan mewarnai paling tidak pada tiga hal: 1) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, aspek pembangunan gizi masuk sebagai komponen penting dalam sistem pangan, disajikan dalam Bab VI Konsumsi Pangan dan Gizi; 2) dalam mempromosikan konsumsi pangan berkualitas, BKP Kementan memunculkan semboyan pola konsumsi B2SA yaitu beragam bergizi seimbang dan aman; dan 3) dalam desain Kawasan Pangan Rumah Lestari (KRPL), BKP memasukkan aspek gizi sebagai bagian dalam pemberdayaan ibu rumah tangga untuk pemanfaatan lahan pekarangan dengan tanaman sumber pangan aneka gizi. Ketiga hal tersebut, beberapa dari sekian banyak 'jejak langkah' penanda kehadiran Prof Soekirman dalam lingkup Dewan Ketahanan Pangan dan pembangunan ketahanan dan gizi berkelanjutan.

Buku "Pengabdian Prof. (Em) Soekirman sebagai Ahli Gizi (1961-sekarang)" ini dapat menjadi sumber informasi tentang kegigihan dan keteladanan Prof Soekirman dalam upayanya turut membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia unggul melalui pembangunan pangan dan gizi secara sinergis, komprehensif dan terintegratif. Berdasarkan kiprah beliau yang tiada henti sampai di usia 88 tahun tersebut, kita patut memberikan penghargaan kepada Prof Soekirman bukan saja sebagai Ahli Gizi, tetapi "Ahli Pembangunan Pangan dan Gizi". Selamat kepada Prof Soekirman, masyarakat Indonesia akan mencatat dan menghargai dengan baik jasa Bapak bagi pembangunan bangsa dan negara, utamanya di bidang pembangunan pangan dan gizi.

NUTRITIONIST HAS TO FIGHT AND FIGHT FOR NUTRITION

Oleh: Dr. Minarto, MPS

Direktur Bina Gizi Depkes 2010–2014

Ketua PERSAGI 2009–2019.

Membaca buku PENGABDIAN PROF. (Em) SOEKIRMAN SEBAGAI AHLI GIZI (1961 – sekarang), terasa mengingatkan kembali perjalanan saya dan mungkin sebagian besar Ahli Gizi, sejak tamat pendidikan sampai dengan saat ini. Buku tersebut memberikan penegasan bahwa gizi, profesi gizi, harus diperjuangkan.

Saya sangat memahami dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada beliau atas perjuangan dalam merintis dan memajukan keilmuan gizi dari masa ke masa, melalui berbagai kesempatan dimanapun beliau berada. Konsistensi beliau dapat dilihat dari apa yang beliau perjuangkan sejak mulai ditugaskan di Aceh, sebagai Pejabat Tinggi Madya di Kementerian Bappenas, maupun setelah beliau purna tugas. Kita para generasi sekarang dapat menikmati *"luxury"* atas perjuangan beliau dimasa lalu. Gizi dan masalah gizi yang pada tahun 1960-an belum dikenal namun sekarang sudah menjadi salah satu program prioritas pembangunan nasional. Semangat yang dibangun untuk generasi penerus khususnya Ahli Gizi, beliau menyampaikan pernyataan ***"The career of nutritionist is full of fighting. You have to have a very high spirit, be consistent, and persistent, and everywhere you have to fight and fight for nutrition"***.

Sambil membaca buku, saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beliau, banyak hal sangat menarik yang tidak ditulis di dalam buku. Saya mencatat ada beberapa yang perlu kita renungkan terutama untuk generasi saat ini;

“Harus bisa beradaptasi dan belajar dari yang sederhana” – dalam memperjuangkan gizi Ahli Gizi sebagai tenaga profesional harus lentur atau “*agile*” sehingga bisa *survive* dimanapun kita berada dan dalam segala kondisi.

“Semua itu ada ilmunya” – Ilmu berkembang dengan pesat, sebagai Ahli Gizi kita harus terus meng-update perkembangan terkait ilmu gizi. Sumber informasi ini ada di beberapa publikasi dan jurnal ilmiah.

“Kalau mau dikenal harus nulis” – Tulisan adalah penyambung lidah pikiran kita, semakin banyak tulisan kita, semakin banyak orang baca, semakin banyak orang mengenal kita.

“Ahli Gizi harus bisa memberikan edukasi dan konseling gizi”– Tugas utama Ahli Gizi adalah advokasi dan edukasi gizi guna meyakinkan masyarakat dan penentu kebijakan dalam berperilaku gizi yang benar, serta kepada penentu kebijakan agar berpihak pada pembangunan program gizi.

Terima kasih banyak Pak Soekirman, guru, orang tua, dan mentor kami. Buku ini sangat memberikan inspirasi terutama bagi generasi saat ini untuk bagaimana kita bisa memperjuangkan gizi secara konsisten.

MENJADI PIONIR DALAM BERBAGAI KEBIJAKAN DAN PROGRAM GIZI

Oleh: Prof. Dr. Ir. Dodik Briawan, MCN

Guru Besar Gizi Masyarakat,

Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Pengembangan dan

Kerjasama, Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) – IPB University

Dengan mengucapkan rasa syukur dan segala hormat, saya menyambut dengan penuh bangga atas inisiasi penerbitan buku “Pengabdian Prof. Soekirman Sebagai Ahli Gizi (1961–sekarang).” Buku ini terbit untuk menyambut ulang tahun Prof. Soekirman (Em) yang ke-88 tahun. Nama Soekirman saya kenal ketika mulai kuliah sebagai sarjana gizi di IPB melalui artikel, tulisan dan sesekali sebagai dosen tamu pada pertengahan tahun 1980an. Kemudian mengenal secara lebih pribadi sejak beliau menjadi bagian dari sivitas akademik dan memperoleh gelar profesor dari IPB. Dan ketika menjabat Kepala Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi (PSKPG-IPB), saya mendampingi sebagai sekretaris pusat.

Prof. (Em) Soekirman adalah sosok yang luar biasa dalam dunia gizi di Indonesia, selain sebagai teknokrat dan juga ilmuwan yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mengimplementasikannya dalam berbagai kebijakan dan program gizi di Indonesia. Beliau telah menjadi pionir dalam berbagai inisiatif kebijakan dan program gizi dalam kurun waktu 1980–1990an.

Buku ini merangkum pemikiran dan pandangan Prof. (Em) Soekirman, mulai dari awal kariernya hingga saat ini, dan bagaimana beliau dengan tekun dan penuh semangat mengabdikan dirinya untuk kemajuan ilmu gizi di Indonesia.

Melalui buku ini, kita diajak untuk mengenal lebih dekat sosok beliau, memahami prinsip-prinsip yang dipegang, serta

belajar dari pengalaman dan ilmu yang beliau bagikan. Beliau menekankan bahwa penyelesaian masalah gizi di Indonesia tidak cukup hanya pendekatan aspek kesehatan, tetapi harus komprehensif dalam sistem pangan dan gizi.

Saya berharap buku ini dapat menginspirasi akademisi, praktisi generasi muda, khususnya yang tertarik pada bidang gizi, untuk terus berjuang dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semoga semangat dan dedikasi Prof. Soekirman dapat menjadi teladan bagi kita semua.

Akhir kata, saya sampaikan apresiasi kepada tim penulis dan editor yang telah bekerja keras dalam menyusun buku ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua.

MENAPAKKAN JEJAK KEILMUWAN PADA LANGKAH KEBIJAKAN

Oleh: Dr. dr. Anang S. Otoluwa

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

Ada dua hal yang menonjol dari tulisan Prof. Soekirman (Prof. Kirman). Yakni, tentang keilmuwan (gizi) dan kebijakan. Itulah yang selalu ditemukan bersinggungan dalam kumpulan tulisan ini. Ketika menulis soal kebijakan, Prof. Kirman lebih dulu menapakkan jejak keilmuwan di bagian depan. Sebaliknya, di setiap hasil penelitian ada rekomendasi kebijakan menyusul di bagian belakang.

Dua hal ini pula yang secara konsisten saya temukan selama berinteraksi dengan Prof. Kirman. Saat masih mahasiswa, beliau turut memperkuat keilmuwan gizi saya. Selanjutnya, ketika saya menjadi Kepala Dinas Kesehatan di Banggai, beliau terus membimbing saya untuk menerapkan ilmu itu menjadi kebijakan.

Pernah, ketika tahu kalau saya baru dilantik jadi Kepala Dinas, Prof. Soekirman menulis pesan: "Pak Anang, tidak mudah mengerjakan tugas sebagai ilmuwan dan birokrat secara bersamaan. Bisa jadi, semangat keilmuwan kita akan sedikit berkurang. Tapi positifnya, ada kesempatan luas untuk menerapkan ilmu kita dalam menentukan kebijakan."

Mengasah Kemampuan Akademik

Perkenalan saya dengan Prof. Kirman dimulai saat beliau menjadi Ketua Danone Institute Indonesia (DII). Pertemuan itu terjadi karena penelitian S3 saya mendapatkan pembiayaan dari DII. Selain itu, Prof. Kirman juga menjadi penguji eksternal saya. Interaksi inilah yang seperti menjadi pintu masuk bagi saya untuk menyelami ilmu gizi, memperdalam multi gizi mikro, lalu menerapkannya ditempat kerja sampai dengan sekarang.

Gairah meng-*update* ilmu adalah kewajiban yang ditanamkan Prof. Kirman kepada mahasiswanya. Saya pun lalu termotivasi berlangganan *jurnal The Lancet*, *Nature*, dan *American Journal of Clinical Nutrition*, walaupun berbayar. Beliau juga selalu mendorong mahasiswanya untuk mengikuti seminar atau kongres. Saya pun lalu mengirimkan abstrak dan menghadiri ICN ke 19 di Bangkok, ICN ke 20 di Granada Spanyol, ACN di Yokohama (2014), dan ACN di Bali (2018). Hebatnya, di beberapa forum ilmiah itu, Prof. Kirman hadir membersamai kami, mahasiswanya.

Atas dukungan Prof. Kirman pula saya bisa menjadi pembicara di berbagai forum gizi. Momen akademik yang sulit terlupakan adalah pada 2018, saat ACN di Bali. Pada simposium yang difasilitasi Vitamin Angels, UI, dan Unhas saya jadi pembicara satu meja dengan tokoh gizi hebat seperti Robert Black, Anuraj Shankar, dan Paul Christian membahas perkembangan suplementasi multi gizi mikro untuk ibu hamil di Indonesia. Di balik cerita itu, banyak yang tidak tahu, jika Vitamin Angels bekerja sama dengan UNHAS, lalu dengan pemerintah daerah seperti Banggai itu berawal dari rekomendasi Prof. Kirman.

Semangat mengasah kemampuan akademik dicontohkan Prof. Kirman tak terbatas pada jurnal ilmiah “serius”. Berbagai tulisan beliau terbitkan di koran bereputasi seperti Kompas, Suara Pembaruan, dan Harian Merdeka agar dibaca banyak orang. Virus ini pun juga kemudian menular ke saya. Tinjauan pustaka disertasi itu saya buatkan menjadi tulisan populer sehingga dimuat di rubrik Ilmu Pengetahuan dan Teknologi harian KOMPAS. Yang membuat saya terkesan, orang pertama yang memberi kabar kalau tulisan itu dimuat adalah Prof. Kirman.

Menerapkan Ilmu dalam Kebijakan

Karena disertasi saya erat kaitannya dengan pencegahan stunting, maka sejak 2015 suplementasi multi gizi mikro (MMS) di Banggai mendapat dukungan penuh dari Bupati dan teman-

teman di DPRD. Disaat bersamaan, kami mendapat bantuan MMS dari Vitamin Angels. Maka suplementasi yang tadinya hanya terbatas pada sampel penelitian, kini bisa dilaksanakan pada semua wanita prakonsepsi dan ibu hamil. Banggai lalu menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang menerapkan kebijakan itu. Bahkan kini sudah dituangkan pada Perda, no. 13, tahun 2021, tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Proses implementasi ilmu menjadi kebijakan ini, juga tak lepas dari peran Prof. Kirman. Beberapa kali beliau datang ke Banggai untuk mengadvokasi pentingnya intervensi gizi pada 1000 HPK kepada stakeholders terkait. Beliau pun tak sungkan-sungkan terjun langsung di lapangan saat hendak 'mereposisi posyandu'. Dengan tangan yang mulai gemetaran, Prof. Kirman dengan telaten memberikan petunjuk cara pengisian KMS kepada kader. Itu beliau lakukan agar kader posyandu dapat melakukan pemantauan pertumbuhan dengan benar.

Penutup

Itulah sebagian pengabdian Prof. Kirman sebagai ahli gizi yang saya saksikan. Hingga di usia yang ke 88 ini, semangat memajukan ilmu gizi itu seperti sulit terhentikan. Setiap ada artikel maupun isu baru di bidang gizi beliau selalu kirimkan ke saya.

Demikian pula, bagaimana menggunakan ilmu gizi sebagai pijakan kebijakan. Terbukti, saat Presiden RI terpilih punya gagasan makan siang gratis, Prof. Kirman langsung menyala. Tidak perlu waktu lama, WA saya dibanjiri artikel, paper, dan kliping koran dari beliau. Saya diminta untuk mempelajari pengalaman negara lain seperti Brazil dan India yang telah lebih dulu menerapkan program ini. Tak perlu diherankan, karena ternyata Prof. Kirman sudah dari dulu memperhatikan gizi anak sekolah. Bersama Prof. Fasli Jalal, beliau menjadi penggagas lahirnya program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) yang 'booming' di era 90-an itu.

Beliau juga mewanti-wanti, agar rencana ini harus sukses dalam implementasi. Jangan sampai dana triliunan itu habis begitu saja, sementara gizi masyarakat tidak mengalami perbaikan. Kekhawatiran yang ternyata sudah didengungkan beliau sejak dulu. “Masalah gizi tidak akan pernah selesai selama masih ada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)”, kata Prof. Kirman suatu saat ketika diwawancarai Kompas.

Yang membuat saya kagum, WA Prof. Kirman ke saya itu hampir selalu panjang kali lebar. Isinya bukan sekedar basa-basi menanyakan apa kabar. Tapi selalu mengingatkan soal ilmu dan kebijakan. Saya kutip satu diantaranya:

Kita mesti belajar dari sejarah. Stunting tidak bisa berkurang selama masih banyak orang miskin yang hidup tanpa akses ke sanitasi dan air bersih. Gizi tanpa sanitasi dan perbaikan ekonomi tidak bisa turunkan stunting. Karena itu policy dunia berubah. Untuk mengatasi stunting, 1000 HPK tidak cukup. Harus dilanjutkan ke PAUD dan sampai dewasa. Itu perlu investasi besar untuk SDM di bidang pendidikan. Kekurangan kita, investasi itu banyak larinya ke pembelajaran. Tapi pelajarnya sendiri, tidak tersentuh, terutama di daerah miskin. *We are investing in learning* (pembelajaran) *but not in learners* (pelajar).

Dalam kesaksian saya, pengabdian Prof. Kirman tidak ada titiknya. Semangatnya terus menyala. Prof. Kirman itu seperti kata Sutan Takdir Alisjahbana: “Dian Yang Tak Kunjung Padam”. (*)

Gorontalo, 3 Juli 2024

PROF SOEKIRMAN ADALAH PIONIR DAN PEMIKIR VISIONER UNTUK MASALAH DAN PROGRAM GIZI

Oleh: Rudatin, SSt.MK, SKM, M.Si

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia.

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya merasa terhormat dan berbahagia dapat menyampaikan kata sambutan dalam buku yang sangat istimewa ini, yaitu “Pengabdian Prof. (Em) Soekirman Sebagai Ahli Gizi (1961–Sekarang)”. Di dalamnya, kita akan menemukan berbagai pencapaian signifikan yang telah beliau raih, mulai dari pengembangan program gizi ibu dan anak, pemberantasan gizi buruk, hingga advokasi kebijakan gizi yang berkelanjutan.

Prof. (Em) Soekirman adalah seorang pionir dan pemikir visioner yang telah mendedikasikan hidupnya untuk perbaikan status gizi masyarakat Indonesia. Semoga buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi para ahli gizi, peneliti, mahasiswa, dan semua pihak yang berkecimpung dalam bidang kesehatan dan gizi.

Selamat membaca dan semoga terinspirasi.

Jakarta, 1 Juli 2024

“BAPAK GIZI PEMBANGUNAN INDONESIA” MERUPAKAN SEBUTAN YANG SANGAT TEPAT UNTUK PROF SOEKIRMAN

Oleh: Joko Susilo, S.KM, M.Kes

Ketua Asosiasi Pendidikan Vokasi Gizi Indonesia (AIPVOGI)

Kami panjatkan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa telah diterbitkannya buku yang berjudul “Pengabdian Prof. (Em) Soekirman sebagai Ahli Gizi” dalam rangka memperingati ulang tahun ke-88. Tentu saja hal ini membuat bangga dan bahagia kami semua.

Prof. (Em) Soekirman merupakan salah satu putra terbaik Bangsa Indonesia, beliau merupakan seorang sosok yang gigih dalam berjuang mengembangkan keilmuan gizi dan berbagai program gizi di Indonesia. Sosok yang suka berbagi ilmu kepada siapa saja, termasuk kepada ahli gizi di Indonesia. Hal tersebut menjadikan beliau merupakan guru/senior yang sangat dihormati dan disegani baik dalam segi kepribadian maupun keilmuan. Beliau juga penggagas berbagai program solutif pada masalah gizi yang dikaitkan dengan pembangunan di Indonesia. “Bapak Gizi Pembangunan Indonesia” merupakan sebutan yang sangat tepat bagi beliau.

Adanya buku ini pasti akan memberikan informasi keteladanan seorang tokoh bangsa dalam mengabdikan dirinya dalam pembangunan bangsa di bidang gizi. Akhir kata, buku ini diharapkan dapat dimanfaatkan bersama bagi seluruh pembaca untuk mendapatkan inspirasi dalam berjuang memajukan gizi di Indonesia. Aamiin. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing kita.

Jakarta, 8 Juli 2024

KESAN-KESAN

Kesan-kesan oleh (alm) Dr. Benny Soegianto,

Dosen Akademi Gizi Surabaya

Dr. Benny Soegianto MPH, mengungkapkan pengenalannya sebagai berikut, "Saya mengenal Pak Kirman sekitar tahun 1976 ketika *Nutrition Intervention Pilot Project* (NIPP) sedang dalam tahap persiapan. Projek ini dilaksanakan di Bojonegoro, Jawa Timur". Semenjak itu Dr. Benny mengaku perkenalannya semakin akrab. Setelah 30 tahun mengenal Soekirman dan mengamati sepak terjang Soekirman di bidang gizi, dia berpendapat, "Beliau adalah salah satu dari sedikit manusia Indonesia yang mampu bermetamorfosa". Dia jelaskan maksudnya, semula menjadi birokrat di Aceh selama 5 tahun, lalu sepulang dari sana menjadi akademisi di Akademi Gizi, di Jalan Hang Jebat Jakarta, lalu kembali menjadi pejabat di Bappenas selama 20 tahun, baru kemudian kembali menjadi ilmuwan di IPB mulai tahun 1996 hingga sekarang. "Sangat sulit bagi seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungannya yang baru untuk selalu bekerja keras dan konsisten terhadap ilmu gizi dan perkembangannya," tegasnya.

Dr. Benny mengaku, menurut cerita yang didengarnya, Soekirman bersama Pak Tarwotjo (alm) membangun Akademi Gizi di Jalan Hang Jebat penuh dengan liku-liku, betul-betul dari nol. Namun akademi itu sekarang telah menghasilkan tenaga gizi yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. "Setelah kembali dari Cornell University beliau mendapat tempat di Bappenas. Menurut saya Bappenas itu tempat angker bagi seseorang yang bukan ahli ekonomi. Namun beliau dengan pengetahuannya yang mumpuni bisa meyakinkan para ekonom akan pentingnya gizi dalam pembangunan bangsa. Beliau telah meletakkan fondasi yang kokoh bagi perkembangan ilmu gizi terutama untuk pengembangan program gizi di Indonesia", ujarnya dengan menegaskan bahwa hal itu sangat dimungkinkan karena

Soekirman selalu mengikuti (*updating*) pengetahuan baru di bidang gizi. "Satu hal yang saya harus angkat topi untuk beliau.

Di era tahun 1980-an konsentrasi kita semua, yang bergerak di bidang gizi, difokuskan pada perbaikan gizi pada balita. Belum ada seorang pun - sepengetahuan saya dari aspek program - saat itu yang berpikir bahwa pertumbuhan seorang anak selalu berkelanjutan hingga dewasa. Gagasan beliau yang berkaitan dengan hal di atas adalah munculnya program PMT-AS. Program ini kental sekali dengan nuansa pemberdayaan masyarakat, dimana pelaksana terdepan program PMT-AS adalah masyarakat setempat dengan memanfaatkan seoptimal mungkin makanan yang diproduksi setempat/lokal, tegasnya.

Dr. Benny juga mengakui Soekirman adalah seorang yang berpendirian teguh terhadap segala ide yang muncul dan selalu konsisten dari waktu ke waktu. "Menurut saya, setelah sekian lama mengenalnya, sekali lagi bahwa keteguhan hatinya terhadap ide yang dikemukakan selalu didukung dengan informasi atau pengetahuan yang luas yang diperolehnya dari literature maupun networking dengan para tokoh gizi internasional," demikian Dr. Benny mengungkapkan.

Prof. Dr. M. C. Latham (deceased)

Professor of International Nutrition

Division of Nutritional Sciences, Ithaca, New York

Dr. Soekirman came to Cornell University in 1973, from a Faculty position in Jakarta under a Fellowship from the US Agency for International Development to do a Master's degree. I served as Chair of his Graduate Committee and is advisor. I immediately recognized in this young man an extraordinary intelligence and ability to think original thoughts. His Master's thesis became the first of a series of 26 Cornell International Nutrition Monographs. It is entitled "Priorities in Dealing with Nutrition Problems in Indonesia", published in 1974. He returned to the Academy of Nutrition in Jakarta, but also to serve as Director of Nutrition Planning in BAPPENAS. His Monograph was able to help guide nutrition planning there.

Eager for further study he returned to Cornell University a few years later to do a Ph.D. with a concentration in International Nutrition. I was privileged again to serve as his Chair and Advisor. This time for his dissertation research he returned to Indonesia. This work was undertaken in Semarang with the University of Diponegoro Medical School where I was heavily involved in a large collaborative research project on breast-feeding. Soekirman's research investigated the effects on infant feeding of mother's working away from home. He defended his dissertation and received his Cornell University Ph.D. in 1983. I have served as Chair of more than 100 graduate students at Cornell, most of them Ph. D's, and Dr. Soekirman stands out as one for whom I am most proud. He returned to Indonesia to a senior position in BAPPENAS, rose rapidly there, and the rest is history. Because it is clear to me that soon he was the most influential figure in Indonesia as far as nutrition was concerned. More importantly policies he initiated and saw through to action, had a very major role in rolling back malnutrition in Indonesia. And soon many other countries

were looking at Indonesia as a major success story for nutrition improvement. Dr. Soekirman's contribution was immeasurable.

He also became a major figure on the International scene, with UN agencies, and the World Bank and others. He travelled a great deal. I was able to be with him, up to the present, in many meetings and see his wisdom and the respect in which he is held. I also witnessed this in several visits that I have made to Indonesia. I am proud and happy to have had over 3 decades of friendship with this wonderful man, and also his very special wife.

M.G Vankatesh Mannar, D.Sc., P.Eng., O.C

**President Emeritus Micronutrient Initiatives,
Adjunct Professor, University Toronto**

I have long admired Prof Soekirman's lifelong commitment and contribution to improve the Nutrition of Indonesians. Working in several capacities within Government and in BAPPENAS over a span of nearly 40 years, he helped lift millions of women and children out of malnutrition. Early in his career he realized the importance of working at the community level to reach the most vulnerable populations. By the time he retired from Government service in the 1990s, the impact of his actions on the overall nutritional status in the country was significant.

Prof Soekirman's work was recognized and applauded within Indonesia and internationally by leading experts from the World Bank, United Nations Organizations and private foundations. Post retirement he did not rest on his laurels. He continues to strive to scale up programmes especially in the area of micronutrient fortification of key staple foods in the country through unique public-private-civic partnerships. He worked to have vegetable oil, wheat flour and other commodities fortified with public leadership and regulatory support. To this day he continues to work tirelessly, undeterred by obstacles – minor and major – and still does not regard his work as complete. I am happy that Prof Soekirman's work and writings spanning more than half a century are being assembled in a single publication for posterity. The documentation of his experience and wisdom will continue to serve Indonesians for a long time into the future. They will also guide and inspire young and aspiring nutritionists, development planners and policy makers in Indonesia and across the world. The world needs more champions for the cause of Nutrition like Prof Soekirman. As he enters his eightieth year I wish him many more years of active service to work on his unfinished battle for the cause of Nutrition in order to achieve his vision of a malnutrition free Indonesia.

Toronto, 10 August 2016

Dr. Marc Van Ameringen
Former Executive Director GAIN

I would like to extend my I congratulations to Prof Soekirman on his recent 80th birthday on August 2nd 2016. I have had the pleasure of working with Prof Soekirman for the past fifteen years where he has been a tireless advocate for Nutrition in Indonesia. While Nutrition today is a high priority on the national agenda, for many years it was not. Prof Soekirman used every occasion to lobby his former colleagues in government to take Nutrition seriously and in that regard, he was extremely successful. He was indeed the father or mother of food fortification in Indonesia and was central to placing micronutrient deficiencies on the national agenda.

At my days at the Micronutrient Initiative, support was given to his own start-up KFI which at the time was a risky idea but turned out to be the major catalyst for food fortification in Indonesia. As Executive Director of KFI, he oversaw the implementation of a 5 year grant from GAIN to support the Mandatory Fortification of Vegetable Oil with Vitamin A between 2010 to 2015 with stellar results and achieved all the grant objectives – voluntary standards for fortified oil, introducing a portable testing system, a law on mandatory fortification announced to come into effect from 2018 and a spectacular rise in the amount of voluntarily fortified cooking oil from zero percent at the beginning of the grant to 35% of the market at the end of the grant.

I can say quite confidently that GAIN could not have found a better implementer for our project. I am very pleased to have been asked to contribute these words to this birthday book and I take this opportunity to wish him many happy returns and hope that Prof Soekirman will continue to guide the journey of Indonesian Nutrition for many more years to come.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terbitnya buku "PENGABDIAN PROF. SOEKIRMAN SEBAGAI SEORANG AHLI GIZI SEJAK TAHUN 1961-SEKARANG", Tim editor memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmatnya. Disadari upaya menelusur, dan menghimpun begitu banyak karya tulis Prof. Soekirman yang tersebar di berbagai media tidaklah mudah. Berbagai karya tulis ini kemudian dirangkai menjadi satu kesatuan dan diberi judul baru.

Tim Editor pun menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah memberi masukan atas Pemaknaan kata "Pengabdian" dalam buku ini. Hal ini diwujudkan dengan memperjelas uraian tentang berbagai peran dan karya konkret Prof. Soekirman sepanjang meniti kariernya sejak selepas dari pendidikan ahli gizi dan bahkan sampai setelah purna tugas.

Dari hasil penelusuran berbagai karya tulis Prof. Soekirman, baik yang dimuat dalam media nasional maupun internasional, ditemukan dalam waktu kurang dari satu dekade banyak buah pikiran Prof. Soekirman tentang ilmu gizi dan penerapannya yang masih relevan dengan situasi dan kondisi kesehatan dan gizi di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia.

Karena tulisan Pak Kirman sebagian besar telah diterbitkan dalam buku "Gizi Pembangunan" 2016 , maka dalam buku ini hanya sebagian dimuat kembali seperti aslinya; sebagian dikutip ulang, sebagian dikutip dengan perbaikan (di "*update*"). Disamping itu ditambahkan juga tulisan Pak Kirman yang baru pasca tahun 2016 antara lain tentang peranan gizi dalam masa COVID 2020-2023, tulisan tentang kelembagaan gizi ("*nutrition institution*") yang disalin dari tulisan beliau di suatu Jurnal Gizi Internasional.

Tulisan Pak Kirman lebih banyak mengemukakan pemikiran tentang keterkaitan ilmu gizi dengan disiplin ilmu lain terutama yang terkait dengan ilmu pembangunan nasional. Oleh karena itu dalam bukunya "Gizi Pembangunan" yang diluncurkan pada

ulang tahunnya ke 80 tahun 2016, Pak Kirman memperkenalkan konsep Gizi Pembangunan yang dirintis dan diperkenalkan oleh Alan Berg, seorang ahli gizi dari Bank Dunia dalam bukunya *"Nutrition Factor"* tahun 1973. Buku ini sampai sekarang tetap menjadi "best seller" dan buku wajib di berbagai universitas di USA. Sejak itu ruang lingkup ilmu gizi menjadi makin luas. Tidak hanya terkait dengan ilmu biomedik dan kesehatan, tetapi juga dengan ilmu ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Dengan demikian ruang lingkup tugas Ahli Gizi juga tidak lagi terbatas pada bidang dietetik dan pelayanan kesehatan.

Dalam buku ini Pak Kirman mengingatkan kepada kita semua bahwa profesi dan keahlian di bidang gizi ruang lingkup makin luas. Artinya pendidikan profesi gizi harus siap dengan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan ilmunya yang tidak terbatas pada bidang dietetik dan kesehatan, tetapi juga di bidang pembangunan nasional.

Buku ini mencoba mendokumentasikan karya Pak Kirman sebagai Ahli Gizi mengaktualisasikan konsep Gizi Pembangunan di era pembangunan di Indonesia terutama di era Repelita III (1979-1984)

Khusus untuk ulang tahun Pak Kirman ke-88, Tim Editor secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Drajat Martianto yang telah berkenan memberi kata pengantar pada buku ini serta kepada Ir. Franky Welirang, Prof. Fasli Jalal, Ibu Ninuk M. Pambudy, Prof. Abdul Razak Thaha, Prof. Endang L. Achadi, Prof. Achmad Suryana, Prof. Dodik Briawan, Prof. Veny Hadju, Dr. Minarto, MPS, Dr. Anang Otoluwa, Ibu Rudatin, SSSt.MK, SKM, M.Si, dan Bapak Joko Susilo, S.KM, M.Kes, yang telah berkenan memberi kata sambutan tentang buku ini. Tak lupa kepada PERSAGI dan semua insan gizi yang telah mendukung penerbitan dan peluncuran buku ini, terima kasih atas semua dukungan yang diberikan sehingga buku ini dapat diterbitkan.

***Editor. Abraham Raubun, Idrus Jus'at, Nur Rahmah Utami,
Hanifah Hana Pertiwi.***

88^{TAHUN}
Prof Soekirman

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

Buku "Pengabdian Prof. Soekirman sebagai Ahli Gizi" adalah "*updating*" dari buku besar yang berjudul "Gizi Pembangunan" (GP) yang merupakan kumpulan tulisan Prof. Soekirman 1962-2015. Buku besar GP lebih banyak berisi salinan publikasi makalah ilmiah tentang berbagai aspek masalah gizi dan kaitannya dengan berbagai masalah pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya. Tujuannya untuk memberi gambaran bahwa masalah gizi bukan hanya masalah biomedik tetapi lebih luas dari itu. Tulisan tersebut ditujukan terutama untuk mahasiswa yang berminat mempelajari masalah gizi dan kaitannya dengan isu-isu pembangunan nasional. Untuk itu disajikan tulisan Pak Kirman tentang Dimensi Gizi Dalam Pembangunan di Majalah LIPI 1971 yang dikutip di buku ini.



Konsep Gizi Pembangunan diperkenalkan oleh Alan Berg pada Konferensi Internasional tentang "*International Conference on Nutrition, National Development and Planning*", MIT, 1973. Dari event tersebut Alan Berg menulis buku "*Nutrition Factor-Its Role in National Development*" (1973).

Buku itu pada tahun 2023 berusia 50 tahun tanpa direvisi. Tetap menjadi salah satu buku "*best sellers*" di USA dan buku wajib di beberapa universitas di USA seperti Universitas Cornell,

Tuff, MIT dan lain lain. Karena tugasnya di Bappenas, Pak Kirman kenal dekat dengan Alan Berg. Pada ulang tahun Alan Berg ke-90 tahun 2022, World Nutrition Journal tahun 2022 menerbitkan beberapa artikel tentang Alan Berg. Sebagian dikutip dalam buku kecil ini.

Disajikan juga catatan Pak Kirman tentang keterlibatannya dalam menyusun Program PMTAS ditahun 1997, dan penyusunan Konsep Kewaspadaan Pangan dan Gizi (*Nutrition Surveillance*), pencegahan dini dampak bencana kelaparan.

I. RINGKASAN DAN "UPDATING" BUKU GIZI PEMBANGUNAN (2016)

Menjalankan Tugas Program Gizi dalam Perencanaan Pembangunan Nasional (1975–1996)

Buku ini adalah ringkasan dan updating dari buku kumpulan tulisan Prof. Soekirman "Gizi Pembangunan", 80 Tahun Pak Kirman yang diterbitkan oleh KFI tahun 2016. Penulisan di buku Gizi Pembangunan (GP) tersebut dimulai pertama kali beliau bertugas selepas studi gizi sejak 1961 di Dinas Kesehatan Atjeh dan mengajar di sekolah-sekolah kesehatan di Kutaradja (Banda Aceh), hingga tulisan-tulisan tahun 2015. Dengan demikian, wajar bila beberapa tulisan Pak Kirman (sapaan akrab beliau sehari-hari) ada yang *out of date* karena ilmu pengetahuan gizi terus berkembang. Namun, banyak juga yang menurut kami masih relevan dengan keadaan sekarang, terutama yang terkait dengan masalah pembangunan nasional. Dari 99 Judul tulisan yang berhasil ditemukan dengan berbagai cara, kami kelompokkan menjadi 3 bab, (1) Gizi dan Pembangunan; (2) Sejarah dan Perkembangan Ilmu Gizi di Indonesia; dan (3) Kebijakan dan Program Gizi Nasional.

Tulisan pertama Pak Kirman yang ditemukan arsipnya, ditulis tahun 1962 berbentuk diktat stensil di kertas merang berjudul "Dasar Pokok Ilmu Gizi". Buku ini menjadi buku ajar resmi ilmu gizi untuk sekolah keperawatan dan kebidanan di Banda Aceh dengan kata pengantar oleh almarhum Dr. Zainoel Abidin, Pengawas/Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Aceh. (Kini, nama Dr. Zainoel Abidin diabadikan menjadi nama Rumah Sakit Umum Daerah di Banda Aceh). Menurut Pak Kirman, selain sebagai buku ajar, buku ini ditulis untuk memperkenalkan istilah GIZI dan Ilmu Gizi di masyarakat luas di Aceh. Pada waktu itu kata "Gizi" masih asing tidak hanya di Aceh tetapi juga di Indonesia. Buku kedua Pak Kirman pun mengenai "Ilmu Gizi" berupa buku ajar untuk mahasiswa tingkat awal, yang ditulis tahun 2000/2001

dengan judul "Ilmu Gizi dan Aplikasinya", dan diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Nasional. Kedua tulisan ini dapat dibaca di Bab II, buku GP.

Tanpa kita sadari, selama lebih dari seperempat abad gaung peran gizi tidak hanya terkait dengan masalah kesehatan dan kedokteran, tetapi juga terkait dengan pembangunan nasional. Hal itu mulai diminati dan dialami oleh Pak Kirman sejak mengikuti program Master in Professional Studies di Cornell University tahun 1973-1974. Pak Kirman berkeinginan kuat untuk memperkenalkan dan mengaplikasikan pengetahuan tentang Gizi dan Pembangunan di Indonesia. Hal tersebut tercermin dari tesis masternya yang terkait dengan perencanaan pembangunan di bidang gizi, berjudul *"Priorities in Dealing with Nutrition Problems in Indonesia"*. Judul Tesis tersebut di "ilhami" oleh Alan Berg pada suatu konferensi internasional tentang "Nutrition Development and Planning" yang dihadiri oleh Pak Kirman di MIT tahun 1971. Tesis tersebut oleh Cornell University diterbitkan berbentuk "Monograph Series" yang pertama, sehingga cepat beredar dan dibaca banyak orang termasuk di Indonesia. Beberapa bulan sebelum kembali ke Indonesia, Pak Kirman menerima tawaran dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk menulis tentang Gizi dan Pembangunan. Naskah tulisan berjudul "Dimensi Gizi dalam Pembangunan Nasional" tersebut beliau kirim langsung dari Cornell University, Naskah ini dimuat dalam majalah LIPI No 3, 1974.

Minat, pengetahuan dan tulisan-tulisan Pak Kirman tentang "Gizi dan Pembangunan" itulah, menurut beliau, salah satu faktor yang mengantarkannya ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) selama lebih dari 20 tahun (1975-1996). Gagasan Pak Kirman memasukkan aspek gizi ke dalam tujuan pembangunan ekonomi dan sosial nasional, mendapat sambutan yang positif dari pimpinan Bappenas. Hal tersebut dapat dibaca dalam dokumen Repelita III - VI (1983-1999) yang secara eksplisit mencantumkan kaitan antara

masalah pangan dan masalah gizi dalam Bab Pangan dan Perbaikan Gizi. Menurut Pak Kirman, adanya bab khusus tentang gizi dalam Repelita, tidak terlepas dari pandangan Prof. Widjojo Nitisastro selaku ketua Bappenas dan arsitek pembangunan nasional pada awal masa Orde Baru, yang sangat maju tentang gizi. Pandangan tersebut ditulis oleh Pak Kirman dalam suatu artikel berjudul "Sejak Awal (Pak Widjojo) Yakin Pembangunan Nasional Tidak Identik dengan Pembangunan Ekonomi". Tulisan tersebut dapat dibaca dalam buku memori Pak Widjojo yang berjudul "Kesan Para Sahabat tentang Widjojo Nitisastro", yang diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas (PBK) tahun 2007, Bab 20 halaman 203.

Bab I Buku Gizi dan Pembangunan (Buku GP) diawali dengan tulisan Pak Kirman tentang Pak Widjojo. Dalam tulisan itu antara lain dinyatakan pemikiran Pak Widjojo tentang masalah pangan dan gizi, bahwa "... keberhasilan peningkatan produksi pangan tidak otomatis akan memperbaiki keadaan gizi masyarakat secara menyeluruh. Di samping meningkatkan produksi dan penyediaan pangan serta perbaikan ekonomi, diperlukan upaya-upaya tersendiri untuk memperbaiki keadaan gizi penduduk".

Untuk mendukung kebenaran pendapat begawan ekonomi Prof. Widjojo Nitisastro tersebut diatas, di dalam Bab I buku GP diselipkan tulisan wartawan senior (waktu itu Wakil Pemimpin Redaksi) Kompas Ninuk Mardiana Pambudy (NMP) tentang "Gizi adalah Juga Isu Ekonomi" dalam Kompas 5 September 2008. NMP juga menulis pandangan Pak Kirman tentang "Gizi dan Pembangunan" dalam suatu rubrik Kompas Nama dan Peristiwa berjudul "Status Gizi dan Masyarakat Yang Demokratis" (Kompas, 17 Juni 2002). Isinya merupakan uraian ringkas biografi Pak Kirman sejak kecil dan pengalaman Pak Kirman selama 40 tahun "berjuang" di bidang gizi yang dimulai di Aceh tahun 1960-an. Dalam tulisan itu dikutip pernyataan Pak Kirman yang mengatakan "kekurangan gizi pada anak adalah bentuk dari kelaparan tidak kentara" dan itu salah satu ukuran kesejahteraan,

selain pendidikan dan kesehatan. Selama masyarakat belum demokratis dan transparan, dan selama masih ada KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme), masalah gizi tidak akan dapat diatasi”.

Dari pendapat Pak Kirman itu tersirat keinginannya agar gizi dapat dijadikan salah satu indikator pembangunan. Hal itu tidak mudah, memerlukan perjuangan profesional seperti yang dilakukannya di Bappenas dalam masa Repelita. Dalam suatu wawancara jarak jauh dengan wartawan Cornell News Letter tahun 2003 sebagai alumni Cornell University, Pak Kirman diminta kesannya tentang upayanya memasukkan gizi dalam Repelita. Jawabannya pendek : harus diperjuangkan... *“The career of nutritionist is full of fighting. You have to have a very high spirit, be consistent, and persistent, and everywhere you have to fight and fight for nutrition.”* (Cornell News Letter, Mei 2003).

Sebagai fokus Bab I Buku GP, disajikan reproduksi pidato lengkap pengukuhan Pak Kirman sebagai guru besar ilmu gizi IPB 26 Oktober 1991 yang berjudul “Dampak Pembangunan terhadap Keadaan Gizi Masyarakat”. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 1000 undangan antara lain Prof. Widjojo Nitisastro dan menteri-menteri Bappenas, Kesehatan, Pertanian, dan Peranan Wanita. Suatu hal yang menarik dari isi pidato itu ialah tentang Beban Ganda Masalah Gizi, yang ramai dibicarakan orang mulai tahun 2010an, Pak Kirman telah mengatakannya pada tahun 1991. Tiga harian ibu kota (Kompas, Koran Merdeka, dan Suara Pembaruan) mengulas pidato Pak Kirman dengan judul besar “Indonesia Akan Hadapi Masalah Gizi Ganda” dan “Kelebihan Gizi Mengancam Golongan Menengah ke atas”, 2-3 hari setelah pidato.

Tulisan “besar” lain Pak Kirman yang dimuat dalam publikasi internasional adalah makalah yang disajikan dalam suatu konferensi internasional tentang “Nutrition and Government Policy” di Bellagio, Italia tahun 1975. Konferensi ini diselenggarakan oleh Rockefeller Foundation, dihadiri oleh perwakilan 11 negara berkembang termasuk Indonesia, dan beberapa negara maju dari Amerika Serikat dan Eropa. Rupanya makalah Bellagio

tentang: ***Nutrition and Government Policy in Indonesia***, merupakan makalah internasional pertama Pak Kirman baru sebulan menjadi staf perencana di Bappenas. Makalah lain yang bernuansa pembangunan nasional adalah makalah untuk SCN (*UN-Subcommittee on Nutrition*) tahun 1992 yang ditulis dengan rekan-rekannya, berjudul *"Economic Growth, Equity, and Nutrition Improvement in Indonesia"*. Pak Kirman juga menulis tentang *"Food and Nutrition Security and the Economic Crisis"* di Asia Pacific Journal of Nutrition 10, 2001, Supplement S57 – S61.

Tulisan ini juga dipresentasikan dalam suatu pertemuan nasional pemerintah Thailand tahun 1999, yang membahas dampak krisis ekonomi pada keadaan gizi anak Indonesia. Pertemuan ini dihadiri oleh Princess Sirindhorn.

Tulisan-tulisan Pak Kirman dalam Bab II dan Bab III buku GP, mencerminkan perjuangannya di bidang gizi. Dimulai dengan memperkenalkan konsep-konsep gizi pembangunan di forum Widyakarya Pangan dan Gizi ketiga tahun 1983 yang diselenggarakan oleh Bappenas dan LIPI. Kemudian upaya menyisipkan kata "GIZI" dalam Repelita termasuk mengoreksi istilah "GIZI" sebagai Bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang juga berbeda arti dengan "nutrisi". Dengan gigih mengingatkan pemerintah tentang tidak tepatnya kebijakan pemberian susu kepada anak sekolah di lingkungan masyarakat tanpa sarana air bersih dan sanitasi yang memadai.

Sejak kembali dari memimpin delegasi RI ke konferensi gizi sedunia pertama di Roma tahun 1992, Pak Kirman banyak menulis guna mendorong diperbaikinya slogan '4 Sehat 5 Sempurna' menjadi 'Pedoman Gizi Seimbang' yang mulai diberlakukan secara global sesuai keputusan Konferensi Pangan Dunia di Roma 1992.

Memasuki tahun 2000an Indonesia tiba di era fortifikasi pangan, namun banyak tantangan dalam pelaksanaannya termasuk – menurut Pak Kirman – gangguan "politik".

Gangguan yang bersumber dari kurang-pahaman akan pentingnya fortifikasi di kalangan pemerintah berakibat pada pencabutan sementara SNI Wajib Tepung Terigu di tahun 2008. Hal ini menimbulkan protes dari kalangan industri tepung terigu, masyarakat (diwakili oleh pers), dan juga KFI sebagai pelopor. Antara lain Pak Kirman selaku ketua KFI menulis surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 8 Februari 2008 memohon agar SNI wajib Fortifikasi tepung terigu diberlakukan kembali. Tantangan lainnya adalah pada pelaksanaan fortifikasi wajib minyak goreng dengan vitamin A, antara lain tentang pro-kontra beta-karoten vs vitamin A, serta diundurnya pelaksanaan Fortifikasi Wajib Minyak Goreng Sawit (MGS) dengan Vitamin A dari Maret 2016 menjadi Desember 2018. Menurut Pak Kirman, hal ini merugikan anak-anak miskin yang memerlukan Vitamin A. Hal tersebut ditulis oleh Pak Kirman di Harian Kompas 10 Oktober 2015 yang berjudul "Apakah Pangan perlu Difortifikasi. Bagaimana Apabila Tidak di Fortifikasi". Tulisan-tulisan itu bernada perjuangan oleh karena tidak mudah diterima dan dipahami, kadang-kadang ditentang orang bahkan di kalangan sebagian rekan se-profesi. Namun akhirnya argumentasi Pak Kirman sebagian besar benar dan diakui baik di kalangan pemerintahan maupun di masyarakat. Misalnya kata "gizi" diterima sebagai istilah resmi dalam dokumen pemerintah; Pedoman Gizi Seimbang secara resmi menggantikan '4 Sehat 5 Sempurna' dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tahun 2015. Meskipun pelaksanaannya lambat, namun surat kepada Presiden SBY mendapat respon positif sehingga SNI Wajib Fortifikasi tepung terigu diberlakukan kembali pada tahun yang sama (2008); dan fortifikasi minyak goreng tetap menggunakan vitamin A. Sangat diharapkan pelaksanaan SNI wajib tersebut dapat dimajukan dari tahun 2018 menjadi tahun 2017.

Bab II Buku GP mengupas "Sejarah dan Perkembangan Ilmu Gizi" merupakan kompilasi tulisan-tulisan Pak Kirman yang bernuansa sejarah perkembangan ilmu gizi di Indonesia. Pertama-tama kami temukan arsip buku yang ditulis di Aceh tahun 1962,

berjudul "Dasar Pokok Ilmu Gizi: Makanan dan Kesehatan". Seperti sudah disinggung di muka, buku GP adalah buku pertama yang ditulis Pak Kirman berbentuk stensilan di atas kertas merang, dan masih tersimpan rapi dalam perpustakaan pribadinya. Buku ini merupakan buku ajar di sekolah-sekolah kesehatan di Aceh dan kemudian juga di Medan. Di dalamnya sedikit ditulis tentang sejarah ilmu gizi. Buku teks kedua untuk perguruan tinggi, berjudul "Ilmu Gizi dan Aplikasinya", diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional tahun 1999/2000.

Sebagian besar halaman berisi sejarah perkembangan ilmu gizi dunia dan Indonesia. Termasuk sejarah perkembangan istilah gizi dan perkembangan media pendidikan gizi '4 Sehat 5 Sempurna' tahun 1950, yang pada tahun 1995 diperbaiki menjadi Pedoman Gizi Seimbang. Oleh karena sejak tahun 2003 tidak ada buku pedoman untuk pendidikan gizi, Pak Kirman dan kawan-kawan pada tahun 2010 menulis buku "Sehat dan Bugar Berkat Gizi Seimbang". Buku ini diterbitkan oleh Danone Institut Indonesia (DII), merupakan buku tulisan bersama 7 orang pakar gizi (Prof. A. Razak Thaha, Prof. Endang L. Achadi, Prof. Hardinsyah, Prof. Hamam Hadi, Idrus Jus'at, Ph.D, dan Atmarita, Ph.D) yang diketuai oleh Pak Kirman.

Bagian akhir dari Bab II buku GP, menyajikan 11 tulisan-tulisan Pak Kirman yang bernuansa penelitian. Tiga diantaranya penelitian tentang Dampak Anemia Gizi Besi terhadap Penurunan Produktivitas Kerja Buruh Laki-Laki di Indonesia. Tulisan ini merupakan hasil suatu penelitian besar internasional antara Puslitbang Gizi Balitbangkes Bogor, Akademi Gizi Jakarta, dengan MIT-Cambridge USA yang dipimpin oleh almarhum Prof. Nevin Schrimshaw dan Samir Basta dari MIT. Laporan penelitian ini diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition (AJCN), April 1979, merupakan penelitian gizi di Indonesia tahun 1973 yang paling banyak dijadikan referensi di jurnal gizi internasional sampai sekarang. Dalam tulisan ini Pak Kirman merupakan salah

seorang *co-author*.

Bab III Buku GP merupakan kompilasi tulisan yang terkait dengan Kebijakan dan Program Gizi Nasional. Kami mulai dengan tesis Master dari Cornell University 1974, seperti sudah disinggung di Bab I. Dari tesis ini dapat dipelajari sejarah program gizi di Indonesia yang sudah mulai sejak abad ke-18, waktu pendudukan wilayah jajahan Belanda (*The Netherland's East India*) dilanda penyakit beri-beri. Saat itu, pemerintahan Belanda mendirikan Pusat Laboratorium Medis yang kemudian dikenal (sampai sekarang) sebagai Lembaga Eijkman (1888-1938) dengan "Instituut voor Volksvoeding" atau IV (1934-1945) untuk penelitian gizi. Satu di antaranya penelitian beri-beri yang merintis penemuan Vitamin B1, sehingga Eijkman menerima hadiah Nobel tahun 1929. Setelah kemerdekaan IV berganti nama menjadi Lembaga Makanan Rakyat (LMR) (1950-1960) yang dipimpin oleh Prof. Dokter Poerwo Soedarmo, di bawah Kementerian Kesehatan. Apabila IV menekankan pada penelitian, LMR lebih memusatkan pengembangan SDM Gizi dengan Pendidikan Tenaga Gizi dan Pendidikan Gizi (*"Nutrition Education"*). Kegiatan gizi di masyarakat masih mengikuti program FAO *"Applied Nutrition Program (ANP)"* yang dimulai tahun 1970an menjadi UPGK (Usaha Perbaikan Gizi Keluarga). Karena jasanya merintis dan membangun gizi di Indonesia, Prof Poerwo Soedarmo diangkat oleh Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) sebagai Bapak Gizi Indonesia tahun 1969, dan mendapat anugerah Bintang Mahaputra Utama Republik Indonesia tahun 1992.

Dalam makalahnya di Widyakarya Pangan dan Gizi ke V (1994), Pak Kirman mengupas tentang perkembangan berbagai faktor kependudukan, ekonomi, teknologi, dan perubahan pola penyakit yang perlu diperhatikan dalam menyusun kebijakan dan program gizi dalam Repelita VI tahun 1994-1998. Antara lain disarankan untuk mengevaluasi efektivitas program yang sedang berjalan untuk penanggulangan GAKY, Anemia, dan Vitamin A. Karena itu Pak Kirman sejak tahun 1994 menganjurkan

untuk memberi perhatian lebih besar pada program fortifikasi pangan. Sehingga tidak mengherankan apabila untuk keperluan kompilasi Bab III buku GP kami temukan 27 tulisan tentang fortifikasi pangan dalam tahun 2000an.

Selain fortifikasi pangan, dalam 15 tahun terakhir sering menulis tentang masalah ketahanan pangan (*Food Security*). Di antaranya yang menarik tulisannya tentang "*Food Security and Nutrition Nexus*" yang disajikan dalam suatu pertemuan ADB di Manila Juli 2010. Sebelumnya ditulis tentang paradigma baru tentang gizi "Perlu Paradigma Baru dalam Menanggulangi Masalah Gizi Makro di Indonesia" yang ditulis tahun 2010. Menurut Pak Kirman paradigma ini mendasari pemikiran perlunya pendekatan ketahanan pangan dan sekaligus terkait dengan status gizi sebagaimana dimaksudkan dalam PP no 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, serta SDGs goal ke-2 "End hunger, achieve food security and improved nutrition.....". Di masa COVID tahun 2020 – 2022, Pak Kirman juga menulis tentang kelaparan tidak kentara, fortifikasi pangan, dan peran gizi dalam mencegah COVID di harian Kompas. Seluruhnya kami temukan 12 tulisan tentang Ketahanan Pangan dalam Bab III Buku GP.

Di bagian akhir dari Bab III Buku GP adalah Bunga Rampai yang menyajikan beragam tulisan pendek dan hasil wawancara tahun 1982-2015 tentang gizi yang diterbitkan, baik di beberapa media populer maupun ilmiah. Salah satunya mengenang alm. Prof. Darwin Karyadi. Atas undangan dari Redaksi Jurnal Internasional "Sight and Life", Pak Kirman menulis "Obituari: Profesor Darwin Karyadi (1933-2014) Remembering a National Hero of Nutrition in Indonesia". Barangkali tidak banyak yang tahu bahwa ada 2 orang pakar gizi Indonesia yang menerima penghargaan tertinggi dari pemerintah berupa Bintang Mahaputra Utama, karena jasa-jasanya di bidang gizi. Pertama, seperti disebut di atas adalah Prof. Poerwo Soedarmo (1992) dan kedua Prof. Darwin Karyadi (2005). Tulisan lain adalah tentang "Reposisi Posyandu untuk 1000 Hari Pertama Kehidupan" yang disajikan

pada tahun 2015 dalam suatu rapat Koordinasi Posyandu di Kota Luwuk Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, rapat ini dipimpin oleh Bapak Bupati dan Ibu Bupati selaku Ketua PKK. Menurut Pak Kirman yang diperlukan sekarang bukan Revitalisasi tetapi Reposisi Posyandu, kembalikan Posyandu ke tujuan utamanya yaitu untuk pemantauan dan pengawasan pertumbuhan anak dengan menggunakan KMS (Kartu Menuju Sehat) yang dipegang ibu, dan direkapitulasi pada SKDN (Seluruh anak punya Kartu untuk Ditimbang dan Naik berat badannya). Pertemuan ini adalah bentuk kerja sama Pemda Kabupaten Banggai dengan Direktorat Gizi Kemenkes yang difasilitasi oleh UNHAS Makassar. Tulisan-tulisan lainnya tentang pro-kontra MSG dalam majalah Tempo 1982, dan tentang Anak Pendek karena Kurang Gizi dalam Suara Pembaruan, 27 Juni 2012 dan lain-lain.

Menurut salah seorang tim editor sebenarnya masih banyak tulisan Pak Kirman tentang gizi yang diterbitkan dalam Majalah Wanita Mutiara (dari Penerbit Suara Pembaruan) di akhir tahun 1960an dan juga di Majalah Gizi Prima (dari Persagi) di awal tahun 1970an, sayangnya tim editor tidak dapat menemukan arsip tulisan-tulisan tersebut.

88 TAHUN
Prof Soekirman

**Kumpulan Tulisan Populer Tentang
Gizi Dan Pembangunan Yang Ditulis
Oleh Prof. Soekirman**

II. MEMPERKENALKAN KONSEP GIZI DAN PEMBANGUNAN

Dimulai di tanah Rencong, Aceh (1961–1965)

Pak Soekirman lulus dari Akademi Gizi Bogor tahun 1960. Beliau adalah mahasiswa angkatan kedua dari Akademi Gizi. Dulu namanya Akademi Pendidikan Nutrisionis dan Ahli Diit, yang didirikan oleh almarhum Prof. Poerwo Soedarmo tahun 1950an di Jakarta. Tahun 1956 pindah ke Bogor. Sebagai mahasiswa ikatan dinas, Pak Kirman harus siap ditempatkan dimana saja. Ternyata ditempatkan di kantor Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Aceh di Banda Aceh tahun 1961. Waktu itu namanya masih Kuta Raja. Kata Gizi masih asing bagi banyak orang termasuk di Aceh. Hari pertama menghadap pimpinan dinas yang waktu itu dikenal sebagai Pak Ikes (Inspektur Kesehatan) Bapak dr. Zainul Abidin. Sekarang namanya diabadikan sebagai nama RSUP Banda Aceh. Staff Ikes waktu itu para perawat dan bidan senior. Belum ada dokter di kantor Ikes. Saya ditanya apa itu gizi dan apa tugas Ahli Gizi termasuk arti titel BSc (*Bachelor of Science*) di belakang nama saya. Pada akhir pertemuan almarhum Pak Ikes menyerahkan kepada saya apa yang akan dikerjakan. Soalnya di kantor itu tidak ada yang tahu apa tugas Ahli Gizi.

Dalam waktu kurang dari satu tahun bertugas di kantor Ikes Banda Aceh, di usia muda (25 tahun) dengan kepangkatan pegawai negeri masih tergolong rendah (II e), Pak Kirman sudah menembus birokrasi pemerintahan Provinsi Aceh. Dia



sudah berkenalan dan menjalankan tugasnya dengan petunjuk langsung dari Sekwilda Aceh. Waktu itu Bapak Harun Ali, bahkan juga dengan Gubernur waktu Bapak Ali Hasjmy. Oleh Gubernur Ali Hasjmy, Pak Kirman diminta berbicara di depan sidang khusus DPRD Provinsi Aceh, untuk berbicara dengan apa dan untuk apa gizi.

Cerita selanjutnya tentang pengabdian Pak Kirman di Aceh dan lain-lain direkam oleh dr. Rudi Pekerti dalam buku "Melebur Kasih, Menggizikan Masyarakat" yang diterbitkan oleh Helen Keller International (HKI) Jakarta 2006, sebagai kado Ulang Tahun Pak Kirman yang ke-70, dan buku Guru dan Sahabat Kami dan Pengembangan Ilmu Gizi di Indonesia, Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB 2006.

Menulis Makalah tentang Gizi dan Pembangunan di Majalah LIPI

Dimensi Gizi dalam Pembangunan Nasional

Oleh : Soekirman

Majalah Berita LIPI No 3, hal 11, 1974

1. Pendahuluan

"Pada tanggal 17 September 1904, empat hari setelah melahirkan putranya yang pertama, meninggallah R.A. Djojo Adhiningrat, yang lebih dikenal dengan Raden Ajeng Kartini. Dengan sekonyong – konyong ditengah ia menunaikan kewajibannya yang mulia, ia meninggalkan suami, anak dan keluarganya. Bersama – sama R.A. Kartini gugurlah pula beribu – ribu wanita lain di Indonesia pada waktu melahirkan putra-putrinya" ... demikian kira – kira pembukaan pidato Prof. Toha pada pengukuhan beliau sebagai guru besar Ilmu Kebidanan di Universitas Airlangga Surabaya, 22 tahun yang lalu (tahun 1952).

Pada waktu itu angka kematian wanita melahirkan adalah 12 – 16 per seribu, sedangkan angka kematian bayi dibawah satu tahun 115 – 300 per seribu. Dengan lain kata ...” setiap seperempat jam seorang ibu meninggal karena melahirkan, sedang setiap menit seorang bayi tidak dapat melangsungkan hidupnya ”, demikian digambarkan oleh Dr. Leimana, Menteri Kesehatan waktu itu. Diperkirakan angka kematian anak – anak prasekolah (1 – 5 tahun) lebih dari 50 persen dari angka kematian total.

Di negara – negara maju waktu itu hanya satu kematian wanita per seribu, 20 – 30 untuk bayi, dan sekitar 10 persen kematian total untuk anak – anak pra sekolah. Betapa rendahnya derajat kesehatan rakyat diawal kemerdekaan itu tergambar dalam angka – angka tersebut.

Pada awal tahun 1950-an itu para ahli seperti Prof. Toha (kebidanan), Prof. Djuned Poesponegoro (kesehatan anak), Prof. Poerwo Soedarmo (gizi), dan Prof. Isak Salim (mata), telah menekankan betapa masalah kekurangan gizi pada sebagian besar anak – anak dan ibu – ibu telah mengancam keselamatan dan kesejahteraan, serta kemajuan bangsa. Tidak disangsikan masalah ini adalah salah satu warisan penjajahan yang kurang kita perhatikan, dan biasanya adalah anak kandung dari kemiskinan.

Setelah lebih dari seperempat abad merdeka, jelas banyak kemajuan telah dicapai, juga di bidang kesehatan. Angka kematian bayi telah turun menjadi 100 – 150 per seribu, setingkat dengan negara – negara berkembang lainnya. Ini tidak berarti bahwa keadaan gizi jauh lebih baik. Penurunan ini terutama dimungkinkan oleh majunya teknologi pelayanan dan peningkatan kesehatan masyarakat, dengan BKIA, Puskesmas, Vaksinasi massal, sanitasi lingkungan dan lain – lain. Yang menjadi masalah sekarang : bagaimana meningkatkan kualitas hidup anak – anak yang diselamatkan dari kematian.

Masalah tersebut pelik, menyangkut sebagian besar dari anak – anak pra sekolah di negara – negara. Angka kematian golongan ini tetap tinggi: 30 – 80 persen kematian total (Indonesia $\pm$ 50 persen). Mereka yang selamat, kebanyakan harus hidup didalam penderitaan karena kurang gizi mencret – mencret, TBC, cacangan, dan lain – lain, sehingga “kualitas hidup” nya jasmani – rohani, tidak dapat setaraf apalagi lebih tinggi dengan anak – anak yang lebih sehat sejak di dalam kandungan.

Golongan ini merupakan $\pm$ 20 persen penduduk negara berkembang, dan merupakan penerus dari pembangunan. Para ahli pembangunan negara, nampaknya mulai memperhatikan nasib mereka dengan sungguh – sungguh.

Oleh karena sumber utama dari penderitaan anak – anak tersebut ialah kekurangan gizi maka perhatian diarahkan kesana. Program gizi secara konvensional, yaitu hanya menempel di BKIA-BKIA, penerangan gizi tak terarah, Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK, aslinya *Applied Nutrition Program*) tambal sulam dan lain – lain yang biasanya hanya dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan, ternyata tidak sampai ke sasaran. Ini disebabkan rumitnya masalah gizi, yang hakekatnya menyangkut hampir semua sektor pembangunan dari produksi pertanian – perdagangan /pemasaran–peningkatan dan pemerataan pendapatan perkapita – pendidikan – kesehatan dan lain – lain. Itu semua hanya mungkin terjangkau bila program gizi merupakan bagian integral dari kebijaksanaan pembangunan secara menyeluruh.

Karangan ini bermaksud menguraikan dengan ringkas berbagai argumentasi tentang masalah yang dikemukakan di atas. Masalah ini di awal tahun 1970an menarik perhatian para ahli pembangunan negara dengan dipelopori oleh McNamara (Presiden Bank Dunia) serta stafnya Alan Berg dan tokoh – tokoh dari PBB seperti Bengoa (Direktur Gizi WHO) dan lain – lain. Beberapa pusat penelitian dan pendidikan di bidang ini telah didirikan antara lain di Massachusetts Institute of Technology,

(MIT – Boston) dan di Cornell University. Berbagai konferensi internasional yang bersifat inter-disipliner telah diadakan dipusat – pusat tersebut.

2. Gizi dan Tingkat Ekonomi

Sejak tahun 1960, PBB telah meluncurkan program yang disebut Dekade Pembangunan. Pada tahun 1970-an ini memasuki dekade yang kedua. Dari dekade pertama nampaknya timbul kekecewaan di kalangan ahli pembangunan internasional. Meskipun pertumbuhan ekonomi di berbagai negara sedang berkembang secara statistik menunjukkan kemajuan, tetapi beratus juta rakyat masih hidup dalam cengkraman kemiskinan dan penderitaan yang jarang ditonjolkan oleh angka – angka statistik . Kekurangan gizi, penyakit, buta huruf, tuna karya, kematian bayi dan anak – anak yang tinggi dan lain – lain masih merajalela. Kekecewaan tersebut antara lain dikemukakan oleh Presiden Bank Dunia, Robert McNamara di dalam bukunya *“One Hundred Countries. Two Billion People: The Dimension of Development”* (Praeger Publisher, New York, 1973). “Jikalau pembangunan tidak mampu mengubah situasi ini, maka pembangunan ini telah gagal”, – demikian McNamara.

Banyak orang berpendapat bahwa masalah gizi otomatis akan teratasi dengan makin meningkatnya tingkat ekonomi negara. Teori ini tentunya didasarkan atas hukum Engel yang terkenal itu. Makin tinggi tingkat pendapatan, prosentase pengeluaran atau belanja untuk makanan makin turun, sedang kualitas makanan yang dibeli makin baik nilai gizinya. Angka – angka statistik dari Survey Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (Susenas) pun membenarkan hukum itu. Data statistik dari FAO mungkin lebih mengesankan. Makin tinggi pendapatan nasional (diukur dengan GNP) makin baik susunan gizi makanan penduduknya.

Konsumsi kalori perkapita dari 15 persen pada tingkat pendapatan \$100 per kapita, naik menjadi 30 persen pada \$600,- dan naik lagi sampai 40 persen bila pendapatan mencapai \$2600. Sementara itu pada tingkat pendapatan tersebut, sumber protein. Dengan kata lain konsumsi sumber – sumber protein (daging, telur, susu dan lain – lain) akan naik, sedang konsumsi beras, jagung, terigu (gandum) dan lain – lain sumber kalori dari makanan pokok (hidrat arang) akan turun masing – masing dari 75, 60 dan 50 hidrat arang relatif akan berkurang. (periksa : *FAO, Provisional Indicative World Plan for Agricultural Development*” vol. 2, 1969).

Tentu tidak akan berani membantah kebenaran dan hukum di atas. Tetapi,... angka – angka diatas juga menunjukkan bahwa tingkat ekonomi baru mulai nyata pengaruhnya terhadap perbaikan gizi pada tingkat pendapatan kira – kira \$ 600,- per kapita per tahun.

Bekas Sekjen PBB U Than pernah menghitung, bahwa pada tingkat laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen per tahun (target Repelita II : 7.5 persen), dengan laju pertumbuhan penduduk 2 – 2.5 persen, maka pendapatan per kapita baru akan menjadi dua kali lipat (naik 100 persen) dalam waktu 25 – 30 tahun. Di India hal itu berlangsung 20 tahun : dari \$ 53 per kapita pada awal kemerdekaan 1947 naik menjadi \$ 104 di tahun 1967. (Tingkat pendapatan kita saat ini diperkirakan ± \$ 100 perkapita per tahun). Dengan kata lain, kalau kita harus menunggu perbaikan ekonomi untuk memperbaiki gizi, berarti kita harus mengorbankan beberapa generasi yang akan datang tetap dalam keadaan kurang gizi. Ini berarti pula membiarkan “lingkaran setan” keterbelakangan ekonomi berlangsung terus.

Ada masalah lain, tidak meratanya pembagian pendapatan. Tahun 1960 – an juga ditandai dengan makin lebarnya jurang antara si – kaya dan si – miskin, baik antar negara maju dan sedang berkembang, maupun antar golongan penduduk di dalam negara.

Penduduk dunia di awal tahun 1970 – an ini ditaksir berjumlah kira – kira 3,300 juta orang, 1000 juta diantaranya hidup di negara – negara yang sangat terkebelakang ekonominya, 1100 juta di negara yang masih terkebelakang tapi tidak terlalu parah, 400 juta hidup dalam ekonomi baik, 800 juta yang lain hidup dalam kemewahan ekonomi. Rata – rata pendapatan perkapita di negara – negara berkembang kurang dari \$ 100, di negara – negara maju \$ 1750, sedang di Amerika Serikat \$ 3000,- . Perkembangan penduduk di negara – negara berkembang sekitar 2.3 persen per tahun, sedang di negara –negara maju hanya separuhnya, 1.2 persen. (periksa : Irwin Isenberg, ed. “ *The Developing Nations, Poverty and Progress*”, Wilson Co., New York, 1969).

GNP rata – rata perkapita di negara – negara Amerika Latin pada awal 1970 – an telah mencapai + \$ 330,- tiga kali lipat dari negara – negara Asia dan Afrika umumnya. Dua yang menonjol ialah Mexico dan Brazilia. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar penduduknya tetap menderita, dan di negara – negara ini angka kematian anak pra sekolah masih lebih dari 120 per seribu, dengan kira – kira 40 persen penduduknya masih buta huruf. India yang diproyeksikan akan mempunyai pendapatan perkapita \$ 200 pada tahun 2000, lebih separo tanah – tanah yang produktif hanya dikuasai oleh $\pm$ 12 persen keluarga – keluarga di pedesaan. Di Brazilia, kurang dari 10 persen penduduk menguasai kurang lebih 75 persen tanah di negara itu.

Masalah lain lagi : faktor – sosial budaya. Hukum Engel, data Susenas dan FAO, tidak berbicara soal bagaimana pola distribusi makanan di dalam suatu keluarga dipengaruhi oleh tingkat ekonomi. Bukan suatu kebetulan bila suatu penelitian gizi di Zambia, Afrika, ternyata hasilnya senada dengan penelitian di Gunung Kidul Jawa Tengah tahun 1972 oleh Dr. Sumilah dan kawan – kawan. Kaum ibu ternyata hanya mengonsumsi 40 – 70 persen dari kalori yang dibutuhkan, sedang kaum bapak 80 –150 persen. Ternyata didalam keluarga pedesaan ada pola prioritas. Pertama, makanan yang mahal dan enak untuk tamu terhormat,

lalu bapak, kemudian anak – anak, dan prioritas terakhir kaum ibu.

Jadi kalau suatu keluarga, karena tingkat ekonominya naik, mampu beli susu, daging, ayam, telur dan lain – lain, belum tentu itu sampai ke anggota keluarga yang justru membutuhkan, yaitu anak – anak dan ibu – ibu. Selain kebiasaan, juga norma – norma sosial seperti prestise dan lain – lain, adat, kepercayaan, agama, pendidikan dan lain – lain mempengaruhi pola konsumsi keluarga.

Di Indonesia hal – hal tersebut telah pula diungkapkan oleh penelitian di desa Amansari dan Ciwalen di tahun 1961 oleh Dr. Darwin Karyadi, Tarwotjo dan kawan –kawan. Di dua desa itu diselidiki keluarga – keluarga kaya dan miskin, dan ternyata ditemukan juga anak – anak kurang gizi di keluarga kaya.

Dr. Mely Tan, Djumadias dan kawan – kawan dari Leknas dan Direktorat Gizi dengan penelitiannya di desa – desa dari 5 propinsi di Jawa, Bali dan Sumatra, berhasil mengungkapkan sikap dan tingkah laku rakyat pedesaan terhadap makanan. (periksa : Mely G. Tan dan kawan – kawan “ *Social – Cultural Aspects of Food Patterns and Food Habit in Five Rural Areas in Indonesia*”, Leknas – Dirzi Depkes, 1970). Penelitian –penelitian di lain negara dengan pendekatan statistik yang lebih rumit (dengan *multiple regression analysis*), menghasilkan pula kesimpulan yang tidak banyak berbeda.

Demikian persoalannya mengapa pembangunan yang bertujuan hanya untuk meningkatkan GNP semata – mata, tidak dapat menjawab berbagai masalah yang ada pada masyarakat secara memuaskan, diantaranya masalah gizi. “Bagaimanapun pentingnya menaikkan GNP, itu saja tidak cukup. Menaikan GNP 6 persen per tahun di negara – negara sedang berkembang di tahun 1970 – an ini bukanlah hal yang mustahil untuk bisa dicapai. Tetapi kalau kita mencapai tujuan kuantitatif dan mengabaikan tujuan kualitatif dari pembangunan, maka itu berarti kita gagal”, ... demikian pesan McNamara.

3. Penekanan Jumlah Penduduk Kunci Pembangunan

Kekecewaan yang diuraikan terdahulu, nampaknya mendorong para ahli pembangunan mengkaji berbagai strategi yang selama ini dianut. Masalah peledakan penduduk selalu menjadi incaran pertama sebagai biang keladi kemunduran ekonomi. Karena itu "resep" yang diharapkan manjur adalah usaha menekan eksplosif penduduk, alias keluarga berencana. Tetapi disaat saat ini mulai timbul beberapa kesangsian diantara para ahli : apakah dengan program KB saja, meskipun besar – besaran, dapat mengatasi masalah?

Kesangsian itu antara lain didasarkan atas makin terkumpulnya data sosial budaya dari banyak negara sedang berkembang. Di banyak negara – negara itu, anak juga berfungsi sebagai jaminan hari tua dan sumber tenaga "murah" bagi keluarganya. Selama angka kematian anak adalah tinggi di negara – negara tersebut, orang – orang tua yang umumnya miskin dan buta huruf, akan sangsi apakah jumlah anak yang "terbatas" itu bisa terus hidup. Kalau tidak bagaimana dengan hari tua nanti?

Dengan kata lain, diduga bahwa KB akan lebih efektif bila dikaitkan dengan usaha – usaha yang dapat menurunkan angka kematian bayi dan anak. Tetapi penurunan ini tidak akan berarti bila tidak diikuti dengan usaha lain yang memungkinkan si anak tumbuh dengan baik jasmani dan rohaninya. Akhir – akhir ini mulai disadari, bahwa kunci yang lain ada pada bidang perbaikan gizi dan kesehatan lingkungan, dwi-tunggal yang jangan dipisahkan. Kalau saat – saat ini persoalannya ditekankan pada gizi, karena masalah kesehatan lingkungan relatif telah dan selalu mendapat porsi lebih besar didalam pembangunan. Hal itu wajar, karena bapak – bapak ahli pembangunan di negara manapun lebih mudah diyakinkan akan pentingnya air bersih, kakus yang tidak bau, bersih dan indahnya halaman, vaksinasi dan lain – lain. Tidak demikian halnya dengan gizi.

4. Masalah Gizi dan Pembangunan

Masalah kekurangan gizi di negara – negara berkembang umumnya ialah : 1. Kekurangan Protein dan Kalori, terutama pada anak-anak, 2. Kekurangan Vitamin A yang mengakibatkan banyak anak-anak menjadi buta, 3. Kekurangan darah atau Anemia Gizi, umumnya pada ibu – ibu hamil – menyusui, juga pada buruh – buruh perkebunan, buruh – buruh kasar yang berasal dari pedesaan, dan 4. Kekurangan Garam Yodium, yang menyebabkan berjuta – juta penduduk daerah – daerah pegunungan menderita penyakit Gondok.

Di Indonesia kira – kira sepertiga dari seluruh anak – anak berumur 1 – 5 tahun menderita berbagai tingkat kekurangan gizi, terutama ke -1 dan 2. Ini berarti tidak kurang dari 7 juta anak, bila diperkirakan 15 persen dari penduduk adalah golongan anak – anak tersebut. Belum lagi dihitung ibu – ibu mereka yang umumnya juga menderita kekurangan gizi.

Akibat negatif dari kekurangan gizi ini terhadap pembangunan dapat digambarkan sebagai berikut (lihat skema) :

1. Kekurangan Gizi adalah penyebab utama dari kematian bayi dan anak – anak kecil. Ini berarti berkurangnya tenaga kerja untuk pembangunan di masa depan.
2. Kekurangan gizi meninggikan angka penyakit. Jumlah anak dan orang sakit banyak, terutama penyakit – penyakit infeksi. Ini berarti menambah beban pemerintah untuk lebih banyak mendirikan rumah – rumah sakit, puskesmas, dan lain – lain pelayanan kesehatan. Tingginya angka penyakit berarti juga hilangnya kesempatan tenaga kerja, Menurunnya jam kerja, dan pada anak – anak berarti hilangnya jam pelajaran di sekolah, karena sering absen, tidak berpikir dengan baik dan lain – lain.
3. Kekurangan gizi menurunkan tingkat kecerdasan anak – anak. Dan akibat ini diduga tidak dapat diperbaiki bila terjadi kekurangan gizi itu semasa anak dikandung sampai umur

kira – kira tiga tahun. Turunnya tingkat kecerdasan pada generasi muda, berarti hilangnya sebagian potensi ahli pikir, cerdas pandai, yang sangat diperlukan untuk kemajuan negara.

4. Kekurangan gizi, menurunkan daya produksi jasmaniah. Pak Tani tidak tahan mencangkul dengan kuat dan lama, penyadap karet tidak sanggup menyelesaikan "hanca" nya, buruh pabrik mesin kurang bersemangat dan sering kecelakaan karena kurang konsentrasi, juru ketik selalu membuat banyak kesalahan ketik, dan sebagainya.

Sebagian hal negatif yang disebutkan diatas, telah dibuktikan juga kebenarannya di Indonesia oleh berbagai penelitian ilmiah. Sehingga memperkuat bukti dari negara – negara lain.

Kesemuanya itu berpengaruh negatif pada tenaga kerja. Belum lagi dipersoalkan pengaruhnya terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan, yang berperan penting juga pada peningkatan produksi.

Untuk membangun diperlukan terus meningkatnya produksi barang dan jasa. Produksi tidak lain perpaduan antara kapital dan tenaga kerja. Kapital di negara – negara berkembang umumnya terbatas, maka peningkatan produksi tergantung banyak pada tenaga kerja (manusia).

Pada akhir tahun 1960an perkembangan ilmu gizi berhasil mengungkapkan adanya hubungan antara gizi dan "kualitas" manusia, jasmaniah dan (lebih penting lagi) intelektual. Hal ini menarik perhatian para arsitek pembangunan negara. Mereka mulai bertanya – tanya : " Bila demikian, mungkin gizi merupakan salah satu sarana untuk mematahkan "lingkaran setan" keterbelakangan ekonomi dan pembangunan ?"

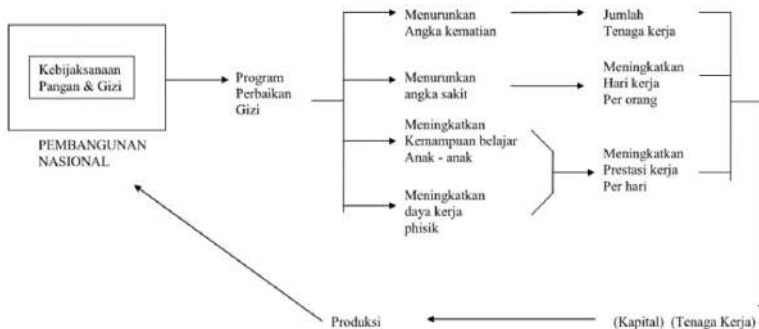
Di Afrika pertanyaan tersebut telah dijawab pada tahun 1971 di dalam suatu seminar pembangunan di Uppsala : " Gizi, Prioritas dalam Pembangunan Afrika" (periksa : Bo Vahlquist, "*Nutrition, A*

Priority in African Development”, the Dag Hammar Skjold Found., Sweden, 1972).

Di India, meskipun sejak semula punya Kementerian Makanan, baru sekitar tahun 1968 dimasukan gizi sebagai salah satu unsur penting dari “Repelita”nya. (periksa: Alan Berg, “*Nutrition Factor, Its Role in National Development*,” Brookings Institutions, Washington, 1973). Catatan : Program peningkatan pangan belum tentu merupakan bagian dari program gizi. Ini baru menjadi bagian bila penambahan produksi pangan itu sampai ke tangan rakyat yang memerlukan perbaikan gizi dan jenis serta jumlahnya antara lain direncanakan menurut ketentuan – ketentuan gizi.

Demikian juga di negara – negara Amerika Latin, Gizi telah mulai mendapat tempat di dalam pola pembangunannya. Dalam hal ini banyak orang angkat topi pada Jepang. Pada waktu ilmu gizi masih muda – belia, apalagi dalam soal – soal gizi dan pembangunan, program gizi telah mulai secara luas sebagai bagian dari pembangunan sejak tahun 1946. Usaha ini dikukuhkan dalam Undang – Undang Gizi pada tahun 1952. (periksa : Alam Berg, dkk. “*Nutrition, National Development and Planning*”, MIT Press, 1973).

Skema : Hubungan antara Gizi dan Pembangunan



5. Keluarga Berencana dan Perbaikan Gizi

Diatas dikemukakan bahwa sebaiknya usaha KB dikaitkan dengan usaha – usaha lain, terutama gizi dan kesehatan lingkungan, untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak kecil serta meningkatkan kualitas hidup si anak. Apakah ini tidak bertentangan dengan tujuan KB untuk menekan jumlah penduduk? Pertanyaan ini selalu timbul. Memang diakui bahwa dengan demikian akan dapat meningkatkan jumlah penduduk. Tetapi untuk sementara, dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang akan mempunyai pengaruh positif dalam mendorong orang untuk membatasi jumlah anaknya. Ada berbagai teori untuk pendapat ini diantaranya:

- Penekanan angka kematian bayi dan anak kecil serta peningkatan kualitas hidupnya, hanya mungkin terlaksana dengan baik bila strategi pembangunan nasional berorientasi pada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, terutama di desa – desa dan di kampung – kampung yang penuh sesak, pengap dan becek. Disitulah bermukim sebagian besar bayi dan anak – anak yang tidak panjang umur itu. Ini berarti program pembangunan yang lebih menjamin pemerataan pembagian pendapatan per kapita, sehingga peningkatan taraf ekonomi dirasakan pula oleh si – miskin yang biasanya justru banyak anaknya.
- Data dari banyak negara menunjukkan bahwa, KB maju di negara – negara yang jumlah anak per keluarga rendah (2 – 3). Demikian juga di negara yang tingkat ekonominya mulai meningkat, meskipun relatif lambat tetapi merata. Pada saat ini orang mulai sadar, bahwa menyekolahkan anak adalah penting sekali, demikian juga pentingnya kesehatannya dan lain – lain. Sehingga punya banyak anak berarti mahal biayanya. Negara sedang berkembang yang sering dipakai contoh untuk ini adalah Taiwan dan Korea Selatan.

Risiko ekonomi dengan demikian itu tidak dirasakan oleh penduduk yang taraf hidupnya masih rendah. Punya anak berapa saja, selain sebagian mungkin mati, tidak akan ada beban ekonominya : sekolah – sekolah di desa tidak bayar, kalau perlu sampai kelas tiga SD atau tidak usah sekolah kalau harus bayar, tidak perlu sepatu, pakaian bersih, apalagi makanan khusus untuk bayi dan anak – anak dan lain – lain. Dengan pengertian ini diperkirakan kurang ada dorongan untuk membatasi jumlah anak, malah sebaliknya mungkin lebih kuat karena alasan terdahulu.

Program KB yang dikaitkan erat dengan Gizi dan Kesehatan Lingkungan, yang digariskan secara jelas peranannya didalam kebijaksanaan pembangunan nasional, pada saat – saat ini sedang diharapkan dapat mematahkan “lingkaran setan” : kemiskinan –tingkat gizi dan kesehatan rendah – tingkat produksi rendah – pertumbuhan ekonomi –kemiskinan lambat dan seterusnya.

6. Penutup

Sampai disini belum diperjelas apa yang dimaksud dengan program atau usaha gizi. Dari awal telah dikatakan bahwa karangan ini memang tidak membahas tentang program gizi. Tetapi mungkin perlu digambarkan sedikit secara umum, bahwa program gizi yang dimaksud disini adalah :

- Program yang didasarkan atas adanya masalah gizi yang meluas di golongan penduduk tertentu, terutama pada golongan yang tidak mampu, yang dapat merupakan penghambat pembangunan, dan sifatnya kompleks.
- Program yang bertujuan untuk mengurangi dan bila mungkin memberantas masalah diatas, sehingga dapat dipertinggi tingkat kesejahteraan rakyat banyak untuk mempercepat laju pembangunan.

- Program yang inter-departemental dan terkoordinir baik, sebagai bagian dari kebijakan Pangan dan Gizi (*Food and Nutrition Policy*).

Jelas bahwa menyusun rencana program tersebut tidaklah mudah. Suatu perencanaan yang bijaksana ditinjau dari berbagai segi sumber-sumber dan tujuan pembangunan, memang diperlukan. Kita gembira bahwa di dalam Repelita II secara tegas masalah pangan dan gizi telah dicantumkan. Dengan demikian kita tidak terlalu ketinggalan dengan beberapa negara lain. Mudah-mudahan pengorbanan Raden Ajeng Kartini bersama – sama banyak wanita – wanita lain didalam menunaikan tugas keibuannya, seperti dituliskan di awal karangan ini, menjadi pendorong untuk segera melaksanakan cita-cita beliau. Program gizi diharapkan ikut memperjuangkan peningkatan derajat bangsa dan negara mulai dari ibu-ibu dan anak-anak, terutama yang di kampung dan desa-desa.

KEPUSTAKAAN

- Moh. Toha, "Kebidanan dan Masyarakat", pidato pengukuhan guru besar, Univ. Indon. Di Surabaya, 1952, J. B. Walters, Jakarta.
- Soejono Djuned Poesponegoro, "Masalah Kesehatan Anak – Anak di Indonesia", pidato pengukuhan guru besar, UI Jakarta, 1958, jaj. Pembangunan, Jakarta
- Poorwo Soedarmo, " Perbaikan Makanan di Indonesia ", pidato pengukuhan guru besar, UI Jakarta, 1958, Kem. Pen. RI, Jakarta.
- Isak Salim, "Masalah Kebutaan dan Penyakit Mata di Indonesia", pidato pengukuhan guru besar, UI Jakarta, 1958, PT. Pembangunan, Jakarta.
- Leimena, "Kesehatan Rakyat di Indonesia : Pandangan dan Planning ", 1955, V. Dorp & Co, Jakarta.
- Rancangan REPELITA II, Jakarta, 1974.
- Sayogyo, "Ringkasan Hasil Survey Evaluasi Proyek UPGK ", 1974, Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan IPB, Bogor,.
- Robert McNamara, "One Hundred Countries, Two Billion People: The Dimension of Development ", 1973, Praeger Publish., Wash.
- FAO, "Provisional Indicative World Plan for Agricultural Development ", vo. 2, 1969, FAO, Rome.
- Irwin Isenberg, ed. ,The Developing Nations, Poverty and Progress", 1969, Wilson Co. New York.
- Bo Vahlquist, ed., "Nutrition: A Priority in African Development ", 1972, The Dag Hammarskjold Found. , Uppsala, Sweden.
- Alan Berg, "Nutrition Factors: Its Role in National Development ", 1973, The Brookings Inst. , Wash.
- Lauw Tjin Giok, dkk., " Study of the Nutritional Status at Two Economic Level in Tjiwalen and Amansari of West Java ", 1962
- Mely G. Tan, dkk., "Social and Cultural Aspects of Food Patterns and Food Habits in Five Rural Areas in Indonesia ", 1970, LEKNAS – LIPI & Direktorat Gizi Dep. Kes., Jakarta.
- Soemilah Sastroamidjojo, "The Prevalence of Nutrition Anemia in Pregnant Women in Two Areas with Different Menu Patterns in Indonesia", 1973, Paper Second Nutrition Asian Congress, Manila.
- John Mellor, "The Economics of Agricultural Development ", 1970, Cornell Univ. Press, Ithaca.

III. MEMBERI CONTOH PERENCANAAN PROGRAM GIZI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (1974)

Priorities in Dealing with Nutrition Problems in Indonesia

(Cornell University, 1974)

By : Soekirman

A study of the literature dealing with the past and present food and nutrition problems in Indonesia reveals that the problems are as serious as ever. The major nutrition problems are: (i) Protein-Calorie Malnutrition, (ii) Vitamin A Deficiency, (iii) Nutritional Anaemia, and (iv) Goitre.



The nutrition problems affect people of all ages, males and females. However, malnutrition is most rampant in pre-school children, pregnant women and low-income workers. It is evident that the underlying causes are complex, except in the case of goitre. On the aggregate, the food production and supply per capita are inadequate. There are great variations among regions. The First Five-Year Development Plan ("Pelita-I"), 1969-1974, succeeded in increasing rice production. However, it neglected other food commodities, such as corn, which is an essential part of the diet of rural people in Central and East Java. Rice policy benefitted mainly the bigger farmers, a fact which is reflected also in their food consumption patterns.

Among more than 1,000 households in 30 villages in Indonesia studied, 74 percent were calorie deficient and 51 percent deficient

in both calories and protein. There were also substantial variations in the consumption patterns among different economic regions and classes of people. The poor are always the worst off. Maldistribution in the family aggravates the situation.

Because of the complex nature of nutrition problems, complementary measures are a conditio sine qua non for their solution. For goitre and vitamin A deficiency, however, relatively simple measures are feasible.

Thus, it is suggested that programs to alleviate goitre and to some extent vitamin A deficiency should be given priority. For the others, a National Food and Nutrition Policy and a Coordinating Board are prerequisites.

Sumber:

Soekirman. 1974. Priorities in Dealing with Nutrition Problems in Indonesia. Cornell International Monograph Series Number 1. Cornell University Program on International Nutrition and Development Policy

Economic Growth, Equity and Nutritional Improvement in Indonesia

**By: Soekirman, Ignatius Tarwotjo, Idrus Jusat, Gunawan
Sumodiningrat and Fasli Jalal (UN ACC/SCN, Adelaide, 1993)**

Viewing improved nutrition as an outcome of development processes expands the area of concern for policy-makers and practitioners who seek to combat malnutrition. These processes operate at different levels in society, from the individual through to the whole arena of governmental policy and indeed international relationships. The SC, in deciding on initiating a series of country-wide reviews of nutrition-relevant actions in 1990, aimed to provide a rich base of documented experience of why and how such actions were undertaken and what was their effect on nutrition.



This country-wide approach built on the progress made at the 1989 workshop on “Managing Successful Nutrition Programmes” held at the 14th IUNS Congress in Seoul. The focus here had been on nutrition programmes, and the essential factors determining their success, and the synthesis of findings and individual case studies were later published as ACC/SCN Nutrition Policy Discussion Paper No. 8.

Two other influential documents were the SCN’s “Nutrition-Relevant Actions” that emerged from the 1990 workshop on nutrition policy held in London, and UNICEF’s 1991 Nutrition Strategy document. Together these provided both a common analytical framework for organising the reviews and a common language for discussing the various actions that impinge on nutrition. The value of such a framework has been demonstrated by the ease with which it lends itself to analyses of both the nutrition problem and its potential solutions. The food – health – care triad of underlying

causes of malnutrition, in particular, proved to be a very useful framework for orienting the inputs and subsequent discussions at the 1992 International Conference on Nutrition, co-sponsored by FAO and WHO. Communication and thus advocacy are facilitated when people share such a conceptual understanding.

UNICEF had originally proposed that a series of country-wide reviews be undertaken, and the results presented at the 15th IUNS Congress in September 1993. At the time of writing, preparations for this workshop are well underway - in fact, the richness of documented material has necessitated the organisation of an additional two-day satellite meeting in Adelaide. We are extremely grateful to UNICEF for their financial support throughout this exercise. The series editor for these country reviews was Stuart Gillespie, and the SC Advisory Group on Nutrition (AGN) also technically examined the drafts as these emerged. In addition, I would like to express gratitude to the external technical reviewers, selected for their in-depth knowledge of particular countries, who provided the authors with comments and suggestions on initial drafts.

The essential value of these country case studies lies in their ability to describe the dynamics involved when a national government attempts to combat malnutrition. Questions such as the role of the political economy in determining policy options, obstacles met in implementation, how programmes are modified or expanded, and how they are targeted, are all addressed. The need for actions to be sustainable to achieve results over the long-term, and the importance of both measurable objectives and a system of surveillance to monitor progress, are examples of important conclusions. These reviews thus provide valuable insights into the questions of "how" as well as "what", in terms of nutrition policy.

The country reviews are intended for a wide audience including those directly concerned with nutrition in developing countries, development economists, and planners and policy makers. Along

with the output of the Adelaide meeting, they will be valuable for advocacy in underscoring that effective actions will improve nutrition. It is hoped that these reviews and the proceedings of Adelaide will provide guidance for a strengthening and expansion of future actions for reducing nutritional deprivation.

Membangun Sistem Kewaspadaan Gizi (*Nutrition Surveillance*)

Kelaparan di Karawang (1977)

Karawang Jawa Barat merupakan salah satu daerah kabupaten di Jawa Barat pada tahun 1970an dikenal sebagai daerah lumbung beras sejak jaman Belanda. Demikian juga di jaman Orde Baru, Karawang dijadikan daerah sentra penghasil beras. Ironisnya pada tahun 1977 di beberapa wilayah di Indonesia dilanda kelaparan karena musim kemarau panjang. Peristiwa ini sangat memukul pemerintah Orde Baru. (Mulyadi,RM, Bencana Kelaparan Karawang Tahun 1977- r.m.mulyadi@unpad.ac.id)

Bappenas juga "ribut". Tidak hanya Biro Pertanian yang menjadi sasaran kemarahan tetapi juga Biro Kesehatan dan Sosialnya Pak Tilaar. Saya masih staf Pak Tilaar waktu itu. Tiba tiba Pak Tilaar bilang...*"Pak Kirman dipanggil Pak Marlin"*. Saya sudah mengira ini pasti soal kelaparan Karawang. Benar sampai di kamar Pak Marlin dengan nada agak marah ... *"Kirman bagaimana ini orang kesehatan kok belum bergerak di Karawang. Mestinya kelaparan itu kan dapat dicegah. Terjadinya lama tidak tiba tiba..."*. Saya jawab *"benar Pak"*. Harusnya dapat dicegah. Beliau agak terhenyak waktu mendengar saya bilang *"dapat dicegah"*. *"Kalau dapat dicegah kenapa DepKes belum bergerak"*kata Pak Marlin agak keras. Langsung saya jawab....*"maaf Pak Marlin kita belum bisa melakukan di Indonesia. Ilmunya dan lembaganya belum nyampek di Indonesia..."**"Maksudmu apa itu....."*. Akhirnya saya harus menjelaskan pelan-pelan tentang prinsip pencegahan terjadinya kelaparan dengan *"nutrition surveillance"*, yang kemudian kita terjemahkan dengan *"kewaspadaan gizi"*. Akhirnya

beliau memerintahkan saya untuk segera membuat rencana bagaimana membangun kewaspadaan pangan itu. Saya tahu semuanya itu karena *Nutrition Surveillance* adalah salah satu mata kuliah yang saya ambil waktu kuliah S2 di Cornell (1971–73)

Untuk merencanakan itu saya harus kontak dengan *experts* nya di Cornell. Dalam satu minggu terjadi kesepakatan akan datang tim dari Cornell yang dipimpin Prof. MC Latham dengan biaya dari USAID Jakarta. Saya juga mulai kontak Prof. Darwin Karyadi, Kapuslitbang Gizi Bogor dan Prof. Dr. Syarifudin Baharsyah, Kepala Pusat Penelitian Agro Ekonomi (PAE) (1976–1983) juga di Bogor.

Pada tahun 1979 dimulai penelitian bersama antara Puslitbang Gizi, Departemen Kesehatan, Bogor, Puslit Agro Ekonomi Departemen Pertanian Bogor dan Cornell University. Hasilnya dimuat dalam buku Repelita III Bab Pangan dan Gizi. Juga dimuat dalam beberapa publikasi Internasional. (*Mason JB, et al. Nutrition Surveillance. WHO, 1984; Soekirman and Darwin Karyadi, 1995, FNB 16:2, 1995*).

Food and Nutrition Security and The Economic Crisis in Indonesia

Oleh : Soekirman

Asia Pacific J Clin Nutr (2001) 10(Suppl.): S57–S6

Indonesia has been afflicted by an economic crisis since July 1997. The economic crisis was preceded by a long drought associated with El Nino. The result has been a decline in food production, especially rice. In the eastern part of the country, especially in Irian Jaya, there was food insecurity during the early stages of the economic crisis. When the crisis escalated to become an economic, social and political crisis in 1998, food insecurity spread to other provinces, especially to urban areas in Java. The crisis led to increasingly high inflation, unemployment, poverty, food insecurity and malnutrition. The official figures

indicate that poverty in Indonesia increased from 22.5 million (11.3%) in 1996 to 36.5 million (17.9%) in 1998. Food production decreased by 20–30% in some parts of the country. Compared with prices in January 1998, food prices had escalated 1.5- to threefold by August/November 1998 when acute food shortages occurred, especially in urban Java. Coupled with a drop in purchasing power, the higher food prices worsened health, nutritional status and education of children of urban poor and unemployed families. Despite social and political uncertainties, the Indonesian Government has taken prompt action to prevent a worsening of the situation by massive imports of rice, instituting food price subsidies for the poor and launching social safety net programmes to cope with food shortages and malnutrition. The present paper attempts to highlight the impact of the economic crisis on food insecurity and malnutrition in Indonesia.

Merancang PMT-AS Tahun 1996

Oleh : Soekirman (2024)

Pada tahun 1997 keluar InPres No 1 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS). Ketika membaca isi InPres tersebut, saya teringat pada waktu masih Deputy SDM Bappenas bertugas meninjau keadaan sekolah SD di beberapa desa miskin di Indonesia Timur. Kalau tidak salah saya dengan Pak Fasli Jalal (Prof. Fasli) ke NTT. Pada waktu itu Indonesia dalam keadaan krisis ekonomi dan musim kering panjang. Banyak desa dilanda kemiskinan dan kekurangan pangan.

Di suatu pagi hari kami pergi ke beberapa desa, dan berhenti di suatu sekolah desa kurang lebih jam 9.00 pagi. Kami bertemu kepala sekolah dan beberapa guru. Saya bertanya kok masih sepi anak-anak belum kelihatan. Kemudian saya diajak ke suatu kelas. Ternyata anak-anak sudah di kelas.....tidur. Tanpa ditanya salah satu guru menjelaskan dengan mulai minta maaf kepada kami. Anak-anak itu tidur karena berangkat waktu subuh dari rumahnya jalan kaki kurang lebih satu jam...dengan perut kosong.

Mereka tidak makan pagi.....karena mamaknya belum masak atau memang makanan tidak cukup untuk keluarga. Menurut pak guru itu keadaan SD di desa-desa lain juga sama. Dalam publikasinya tahun 2023, WFP menyatakan bahwa “jutaan anak di dunia pergi ke sekolah dengan perut kosong” *everyday million of children around the world go to school on an empty stomach* (WFP, 2023, *The State of School Feeding Worldwide 2022*). Kami terdiam mendengar penjelasan itu. Sepanjang perjalanan pulang ke Kupang dan pagi terbang ke Jakarta kami berdua dengan Pak Fasli membicarakan apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Dalam percakapan di perjalanan saya cerita kepada Pak Fasli tentang adanya program “*school feeding/lunch program*” di sekolah di India, Brazil, Nigeria dan lain lain. Pak Fasli setuju kita coba bikin program makan di sekolah.

Keesokan harinya kami berdua melapor ke bapak Menteri waktu itu Bapak Ginanjar Kartasasmita. Sudah kami perkirakan Pak Menteri pasti menanyakan apa kami punya konsep. Saya ceritakan pikiran saya itu untuk meniru beberapa negara miskin yang memberikan makan anak sekolah. Prinsipnya beliau setuju dan minta saya selaku Deputy yang mengurus pendidikan untuk membuat usulan.

Dalam satu minggu konsep usulan tersusun dengan nama program PMTAS – Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah. Tujuannya : 1. Meningkatkan status gizi anak SD; 2. Memotivasi supaya anak senang belajar dan tidak absen; 3. Mendorong orang tua murid dan masyarakat setempat lebih memberi perhatian pada kesehatan dan keadaan gizi anak; dan 4. Mendorong peningkatan ekonomi desa melalui pemanfaatan pangan yang diproduksi desa dan pekarangan.

Karena sifatnya lintas sektor, sebelum saya ajukan ke Bapak Menteri, konsep saya bahas dengan semua rekan Deputy di Bappenas. Kemudian saya bahas dengan beberapa Dirjen terutama: Bappenas, Dalam Negeri, Keuangan, Kesehatan, Agama, Pertanian, dan Urusan Pangan. Saya ingat beberapa hari saya keliling ke departemen-departemen menemui Dirjen atau

Stafnya.

Setelah saya yakin konsep matang saya serahkan Pak Menteri Ginanjar. Setelah membaca dan menanyakan berbagai hal, beliau memberi tugas terberat selama jadi deputy. Beliau akan mempertimbangkan usulan saya setelah mereka bicara dengan 8 Menteri. Beliau minta saya mengatur adanya pertemuan 8 Menteri di Bappenas. Sebelum saya melaksanakan tugas tersebut saya konsultasi dengan Sekretaris beliau Pak Inugroho, menanyakan apa bisa menteri mengundang menteri di Bappenas. Ternyata hal itu dapat dilakukan namun bukan rapat resmi, hanya pertemuan informal.

Dengan berbagai cara dan akal, diplomasi dengan Dirjen Dirjen dan sebagainya, akhirnya 8 Menteri setuju ketemu Pak Ginanjar di Bappenas. Ternyata betul ingat saya bukan rapat tetapi pertemuan informal di ruang tamu Pak Ginanjar. Tidak diruang rapat, hanya saya dan Pak Inugroho sekretaris beliau yang boleh hadir.

Hasil pertemuan 8 menteri mendukung rencana PMTAS Bappenas. Saya ingat Menteri yang sangat setuju dengan konsep Bappenas ini adalah Menteri Pertanian almarhum Bapak Prof. Sjarifuddin Baharsjah. Beliau mendukung karena program tanaman pekarangan sekolah dari departemennya banyak yang gagal karena tidak ada pasar bagi produknya, melalui PMTAS pasarnya akan terjamin.

Tidak lama kemudian, para Deputy Bappenas mendapat undangan DPR untuk menghadiri "sidang dengar-pendapat" (RDP) dengan menteri Bappenas tentang PMTAS. Kami para Deputy mengikuti perdebatan antar anggota DPR dengan Pak Ginanjar. Saya sangat bangga, Pak Ginanjar dapat menjawab semua pertanyaan anggota DPR tanpa bantuan staf dalam hal ini saya yang duduk dibelakang beliau. Klimaksnya pada penutupan sidang Ketua Sidang ketok palu dan menyetujui anggaran Rp550

miliar rupiah untuk PMTAS. Pada tahun 1998/1999 PMTAS berlaku untuk semua Desa Tertinggal di semua provinsi, meliputi 8,1 juta anak di 53,000 sekolah dasar (J Studdert dkk, 2004).

PMTAS tersebut telah dievaluasi oleh tim Cornell University tahun 1998. (Lisa J Studdert, Soekirman, Kathleen M. Rasmussen, and Jean-Pierre Habicht, 2004, *"Community-based school feeding during Indonesia's economic crisis: Implementation, benefits, and sustainability"*, *Food and Nutrition Bulletin*: Vol. 25 No.2).**

IV. MENGENALI SEJARAH 3 TOKOH GIZI NASIONAL -EIJKMAN, POERWO SOEDARMO, WIDJOJO NITISASTRO- DAN ALAN BERG TOKOH GIZI INTERNASIONAL

(Soekirman, World Nutrition Journal, 2022/13)

Menulis tentang Prof. Eijkman

Christiaan Eijkman meraih hadiah Nobel di bidang kedokteran pada tahun 1929 atas penelitiannya tentang penyakit beri-beri yang disebabkan oleh kekurangan senyawa yang terdapat pada kulit beras, sebuah konsep yang menjadi awal penemuan vitamin. Penemuan vitamin pertama oleh Eijkman dan penerusnya dianggap merupakan awal ilmu gizi modern.

Dengan demikian, Eijkman adalah tokoh besar pertama ilmu gizi di Indonesia sebagai *scientist* yang mendirikan lembaga penelitian makanan dan gizi sebagai bagian dari lembaga Eijkman yang kemudian menjadi Instituut voor Volksvoeding yang dipimpin oleh Van Veen, selanjutnya berganti nama menjadi Lembaga Makanan Rakyat pada tahun 1950. Dari LMR inilah ilmu gizi di Indonesia mulai dikembangkan pada awal kemerdekaan oleh Poerwo Soedarmo.

Menulis tentang Prof. Poerwo Soedarmo

Pak Poerwo adalah Direktur pertama Lembaga Makanan Rakyat tahun 1950. Dia mengembangkan kelembagaan gizi dengan pertama-tama mendirikan lembaga-lembaga pendidikan tenaga gizi tingkat menengah (Sekolah Menengah Gizi, Jakarta) dan kemudian tingkat diploma (Akademi Gizi, Bogor). Pak Poerwo sebagai guru besar Ilmu Gizi, pada tahun 1960 membuka departemen ilmu gizi di Fakultas Kedokteran UI. Kedua

lembaga pendidikan tersebut masih berlanjut dan semakin berkembang tidak hanya di Jakarta tetapi juga di daerah-daerah lain (10). Pada tahun 1967, di UI juga didirikan lembaga pendidikan lanjut ilmu gizi SEAMEO yang direktur pertamanya adalah Prof. Dr. Achmad Djaeni Sediaoetama (alm).

Pak Poerwo juga orang pertama yang membangun lembaga riset gizi di Bogor tahun 1960, yang dikenal dengan Pusat Penelitian Pangan dan Gizi, Bogor yang dipimpin oleh Prof. Darwin Karyadi. Pusat Penelitian ini sudah dihilangkan dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2010.

Satu jasa dan karya lain Pak Poerwo adalah keberhasilannya dalam menyebarkan pengetahuan gizi kepada masyarakat secara sederhana antara lain dengan menciptakan slogan “4 Sehat 5 Sempurna” pada tahun 1952 yang masih dikenal oleh sebagian masyarakat sampai saat ini. Slogan ini telah diganti menjadi Pedoman Gizi Seimbang pada tahun 1995, seperti halnya di negara-negara lain. Oleh jasa dan karyanya, Pak Poerwo diangkat oleh Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) sebagai “Bapak Gizi Indonesia” pada tahun 1969. Pak Poerwo sempat menghadiri Kongres Ilmu Pengetahuan Pertama MIPI di Malang pada tahun 1958 dan pada tahun 1968, beliau ikut dalam panitia Persiapan Widyakarya Pangan dan Gizi pertama yang waktu itu disebut *NAS-LIPI Workshop on Food* (NAS = *National Academy of Science*) sebagai cikal bakal dari Workshop Nasional Pangan dan Gizi (WNPG). Pada tahun 1992, Pak Poerwo adalah ahli gizi pertama yang menerima Bintang Mahaputra dari Presiden Soeharto. Pak Poerwo meninggal pada usia 99 tahun di tahun 2003.

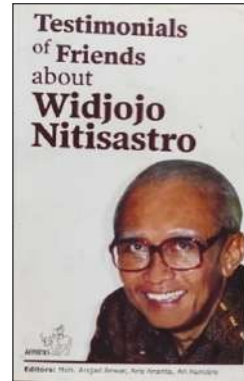
Menulis tentang Prof. Widjojo Nitisastro: “Sejak Awal Yakini Pembangunan Nasional Tidak Identik dengan Pembangunan Ekonomi”

Oleh : Soekirman

Dalam buku Kesan Para Sahabat tentang Widjojo Nitisastro, Kompas 2007

Kurang lebih satu tahun setelah Pak Kirman pensiun dari Bappenas tahun 1996, diberitahu oleh staf Pak Widjojo bahwa Pak Kirman diminta ikut menulis dalam buku tentang Pak Widjojo. Rupanya pada waktu itu di Bappenas dibentuk suatu tim Penulis buku tentang Pak Widjojo. Pak Kirman agak ragu untuk menerima tawaran menulis tersebut.

Tetapi Tim Penulis memberi tahu bahwa ada puluhan orang pejabat Bappenas dan Menteri dan lain lain yang diminta untuk menulis. Akhirnya Pak Kirman menyanggupi dan menyampaikan naskah tulisan Pak Kirman kepada panitia. Dengan harap-harap cemas, apakah tulisannya diterima oleh Pak Widjojo. Tidak lama kemudian salah seorang panitia penulis memberi tahu bahwa naskah Pak Kirman disetujui oleh Pak Widjojo masuk dalam buku. Kurang lebih satu tahun kemudian buku tentang Pak Widjojo terbit. Buku berjudul “Kesan Para Sahabat tentang Widjojo Nitisastro”; edisi Bahasa Inggrisnya berjudul *“Testimonial of Friends about Widjojo Nitisastro”* dengan penulis Moh. Arsjad Anwar, Aris Ananta, Ari Kuncoro, dicetak oleh penerbit Kompas, 2007. Ternyata tulisan Pak Kirman dalam daftar isi buku berada di bab no 20 dari 55 bab di halaman 189 dari 483 halaman.



Perkenalan saya secara pribadi dengan Prof. Widjojo relatif belum lama. Pada saat saya diperbantukan dari Departemen Kesehatan ke Bappenas tahun 1976 sampai tahun 1996, baru pada tahun 1988 saya dapat berkenalan secara langsung dengan

beliau. Sebelumnya saya hanya mengenal Bapak Widjojo secara tidak langsung melalui petunjuk beliau kepada deputi maupun kepala biro. Dari petunjuk-petuniuk tidak langsung tersebut sejak awal-awal tahun bertugas di Bappenas, saya mengetahui bagaimana perhatian Bapak Widjojo sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas terhadap masalah pemerataan pembangunan dan masalah kemiskinan. Komitmen beliau terhadap pemerataan cukup dikenal dalam melaksanakan kebijakan Trilogi Pembangunan dalam perencanaan pembangunan secara konsisten.

Perhatian beliau terhadap masalah kemiskinan dan penderitaan rakyat banyak juga saya ikuti dari beberapa kegiatan Bappenas waktu itu.

Salah satu yang sangat berkesan bagi saya dan mungkin tidak dingat atau diketahui oleh masyarakat adalah keterlibatan Bappenas secara langsung dalam penanggulangan darurat akibat meletusnya Gunung Agung di Bali pada akhir tahun 1970-an. Waktu itu saya menyaksikan kesibukan luar biasa di Bappenas dalam mengkoordinasikan penanggulangan bencana itu dibantu oleh Lembaga PBB, UNICEF Indonesia.

Sebagai orang baru, saya merasa heran bahwa Bappenas, yang semula saya duga hanya menangani masalah-masalah ekonomi makro, ternyata ikut menangani masalah-masalah mikro yang menyangkut penderitaan rakyat banyak. Mungkin waktu itu belum ada instansi pemerintah yang dapat mengkoordinasikan secara efektif penanggulangan (*relieve*) dan rehabilitasi (*reconstruction*) akibat bencana alam, sehingga Bappenas perlu turun tangan. Sejak peristiwa itu saya mulai mengenal bahwa Bapak Widjojo adalah seorang ekonom besar yang tidak hanya memperhatikan masalah-masalah makro tetapi juga masalah mikro seperti kemiskinan dan penderitaan rakyat dan masalah pembangunan pedesaan pada umumnya.

Contoh lain, perhatian beliau terhadap masalah gizi. Sampai tahun 1970-an, tidak banyak negara yang mengangkat masalah gizi sebagai bagian dan masalah pembangunan nasional. Waktu itu masalah gizi hanya dianggap sebagian kecil dari masalah kesehatan. Tetapi, Indonesia telah memasukkan masalah gizi sebagai salah satu masalah pembangunan dalam Repelita III. Bahkan dalam lampiran pidato Pertanggungjawaban Presiden/ Mandataris MPRS 11 Maret 1978, laporan mengenai pembangunan pangan telah terkait dengan perbaikan gizi dan tercantum dalam Bab Pangan dan Perbaikan Gizi. Tentunya hal ini adalah atas petunjuk dan keputusan Pak Widjojo sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/ Ketua Bappenas waktu itu.

Bagi saya keputusan beliau untuk menyatukan masalah pangan dan masalah gizi dalam satu kesatuan pada Bab Pangan dan Perbaikan Gizi dalam Repelita III sungguh mengesankan. pemaduan masalah pangan dan gizi dalam satu Bab Repelita sebagai satu kebijakan memang perlu oleh karena masalah pangan tidak dapat dipisahkan dari masalah gizi.

Tampaknya pemahaman atas keterkaitan antara kedua masalah tersebut waktu itu belum banyak dipahami oleh sebagian pakar di bidang pangan. Oleh karena itu, pada proses penyusunan Repelita-Repelita berikutnya, selalu ada usaha dari beberapa pihak untuk mengusulkan kepada pimpinan Bappenas setelah Prof. Widjojo agar memisahkan masalah pangan dan gizi sebagai bab masing-masing yang berdiri sendiri-sendiri. Alasannya karena pangan adalah domain ilmu ekonomi sedang gizi termasuk domain ilmu sosial non-ekonomi, terutama ilmu kesehatan. Pada saat itu masih lazim adanya pengotak-ngotakan disiplin ilmu, termasuk aplikasinya dalam pembangunan. Atas dasar pengalaman tersebut saya sering berpikir bahwa keberadaan kebijakan pangan dan gizi dalam satu bab tersendiri pada buku Repelita selanjutnya (sampai Repelita VI) mungkin sulit diwujudkan apabila tidak dimulai dalam Repelita III atas petunjuk Prof. Widjojo. Beberapa hal yang

dapat saya kemukakan tentang Prof. Wdjojo antara lain sebagai berikut.

Perhatian beliau terhadap masalah gizi saya duga merupakan bagian dari kepedulian beliau terhadap masalah pemerataan dan kemiskinan. Karena masalah gizi memang erat kaitannya dengan masalah pemerataan dan kemiskinan. Kedua masalah tersebut bukan semata-mata merupakan masalah ekonomi tetapi juga masalah sosial budaya yang kompleks.

Sejak semula Prof. Widjojo tidak beranggapan bahwa pembangunan ekonomi adalah segala-galanya. Dalam sambutan beliau pada pembukaan Seminar Ilmu Pengetahuan Sosial dan Pembangunan Nasional LIPI tahun 1970 antara lain mengatakan "...janganlah kita mempunyai ilusi bahwa pembangunan ekonomi dengan sendirinya akan mengakibatkan pembangunan di bidang-bidang lain".

Dalam konteks ini beliau memberi contoh pembangunan pendidikan "Apabila ekonomi berkembang dengan baik maka bisa disediakan biaya lebih banyak untuk bidang pendidikan. Tetapi tidak apriori karena ekonomi baik maka bidang pendidikan juga baik. Oleh karena itu perlu adanya usaha pembangunan pendidikan secara tersendiri di samping pembangunan ekonomi."

Dasar pemikiran beliau tentang masalah pangan dan gizi menurut dugaan saya sejalan dengan contoh di bidang pendidikan tadi. Keberhasilan peningkatan produksi dan penyediaan pangan tidak otomatis akan memperbaiki keadaan gizi masyarakat secara menyeluruh. Di samping meningkatkan produksi dan penyediaan pangan serta perbaikan ekonomi, diperlukan upaya-upaya tersendiri untuk memperbaiki keadaan gizi penduduk.

Perhatian beliau terhadap masalah pangan dalam arti luas (menyangkut masalah gizi) sebenarnya telah dirasakan oleh

para pakar di bidang gizi pada saat LIPI menyelenggarakan *Workshop on Food* yang pertama tahun 1968. Prof. Widjojo adalah pendorong diselenggarakannya workshop tersebut. Dalam workshop ini tidak hanya dibahas masalah pangan dari aspek produksi dan pengadaan tetapi juga aspek gizinya meskipun masih terbatas. Sampai dengan persiapan Repelita V tahun 1992 *Workshop on Food* ini tetap diselenggarakan sekali dalam lima tahun oleh LIPI dan Bappenas dengan nama Widyakarya Pangan dan Gizi.

Diangkatnya masalah gizi sebagai bagian integral dalam Repelita dihargai oleh Bank Dunia yang mulai tahun 1976 memasukkan program gizi dalam prioritas pinjamannya untuk beberapa negara berkembang. Indonesia termasuk beberapa negara berkembang pertama yang memperoleh pinjaman program gizi tahun 1976. Pada tahun tersebut Bank Dunia baru meminjamkan 61 juta dollar AS untuk proyek-proyek gizi termasuk untuk Indonesia. Untuk tahun 1997-1999 Bank Dunia telah memberikan pinjaman untuk proyek-proyek gizi kepada 74 negara berkembang senilai 793 juta dollar AS.

Selain memperhatikan masalah pangan Prof. Widjojo juga memperhatikan kebutuhan rakyat lainnya, yaitu air bersih. Pada minggu-minggu pertama saya menjabat sebagai Deputy Ketua Bappenas bidang Sosial Budaya tahun 1988, saya dipanggil beliau untuk berdiskusi tentang berbagai alternatif program air bersih untuk penduduk miskin di kota dan di desa, terutama daerah terpencil. Dari diskusi tersebut saya semakin mengenal bagaimana kepedulian beliau terhadap masalah kemiskinan. Kepedulian beliau atas air bersih bagi penduduk miskin, tercermin dari adanya Inpres Air Bersih. Program ini diberikan prioritas tinggi baik untuk penduduk perkotaan maupun perdesaan dimulai pada masa beliau sebagai Ketua Bappenas dan dilanjutkan serta ditingkatkan oleh Menteri-Menteri Perencana Pembangunan/Ketua Bappenas berikutnya.

Dari pengenalan saya yang terbatas dengan Prof. Widjojo seperti saya uraikan di atas saya berkesimpulan bahwa Prof. Widjojo Nitisastro telah berhasil meletakkan landasan pemikiran pembangunan ekonomi bangsa yang berdimensi luas. Dimensi tersebut antara lain meliputi bidang-bidang pendidikan, kesehatan, gizi dan bidang sosial non-ekonomi lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang mantap, disertai menurunnya angka kemiskinan dan meyakinkan serta makin baiknya indikator kesejahteraan sosial yang dicapai dalam Program Pembangunan Jangka Panjang tentunya tidak terlepas dari kepakaran beliau. Meskipun sebagai “begawan” besar ekonomi, sejak awal beliau berpendapat bahwa pembangunan nasional itu tidak “identik” dengan pembangunan ekonomi seperti sering diduga oleh sementara pihak.**



Mengenal Alan Berg, Ahli Gizi Bank Dunia

Alan Berg and his contribution to the development of nutrition manpower in Indonesia in the 1980s

By Soekirman, PhD (World Nutrition 2022;13(4):88-89)

My early years with Alan Berg

I knew Alan Berg in person for the first time in 1985 when he led a World Bank mission to Jakarta. Before that I had only seen him in a conference on Nutrition, National Development and Planning at MIT in 1971. That was my first year at Cornell University as the late Prof. M.C. Latham's student in the International Nutrition program which had just opened at Cornell. I was told by Prof. Latham that the MIT conference would be good for us students to attend.

On the way back from the MIT conference to Ithaca, Cornell, I was feeling so inspired by the lectures and discussions of the conference. This was probably related to a letter I had received a few days earlier from my senior colleague Prof. Darwin Karyadi, the Director of the Nutrition Research Centre in Bogor informing that the National Development Planning Ministry, well known as Bappenas, needed a senior nutritionist for the coming National Development Plan (1973-1978). "I am hoping it will be you" – Darwin had written.

During the final year of my courses (1973), the class was assigned to read the new book by Alan Berg "The Nutrition Factor." And I think up even to the present Alan's book is still a required reference for the International Nutrition students. In Indonesia Alan's book has been translated and published as "Faktor Gizi" in 1985 by late Djaeni Sediautama, a medical doctor at the Nutrition Department, University of Indonesia.

In 1973, I began writing my Master thesis. Inspired by the MIT conference, I decided to write my thesis on nutrition and national development policy. I discussed several times with Prof. Latham until he finally agreed that the title would be "Priorities in Dealing with Nutrition Problems in Indonesia." I passed the thesis exam and flew back to Jakarta right away. I did not bring with me the final copy of my thesis because it was still being processed at the university office. To my surprise, in early 1974 I received a package contained a publication entitled "Priorities in Dealing with Nutrition Problems in Indonesia" by Soekirman, Cornell International Monograph Series, Number 1 (1974). Within weeks, the Monograph circulated in Jakarta, including among the BAPPENAS officials. I do not know if it contributed to the process of my assignment from the Ministry of Health to the Ministry of National Development Planning – BAPPENAS -- in 1974.

In the end I worked at Bappenas for 20 years from 1976 – 1996. First as a planning staff, then the Chief of the Bureau of Health and Nutrition, then the Deputy Minister for Social Affairs, and at

the end as the Deputy Minister for Human Resource Development. At all of these positions there had been a nutrition component in many aspects of the national development policies, well known as "REPELITA" – The Five-Year National Development Plan".

During my tenure at Bappenas, I often met Alan Berg at the Bank mission in Washington or in Jakarta or in some international nutrition conference. In 1985, he led the Bank mission which led to the funding of the Development Nutrition Manpower Project, building eleven "Akademi Gizi" (Nutrition College) in eleven provinces, one big auditorium for the Faculty of Nutrition, and a large laboratory for the Faculty of Food Technology of the University of Agriculture (IPB University), Bogor. Many senior faculty members of these institutions still remember the name Alan Berg from the World Bank who built their campus.

Siapa Alan Berg?

Alan Berg adalah Ahli Gizi berkebangsaan Amerika Serikat yang pada usia 40an menjadi "Deputy Director White House Food for Peace" pada masa Presiden Kennedy dan Johnson. Juga pernah menjabat "Deputy Assistant Secretary of State dan Co-chaired the first White House Task Force on Nutrition".

Tugas utamanya merencanakan bantuan pangan penduduk negara-negara miskin dan bantuan pendidikan lanjut tenaga gizi antara lain dengan membangun sarana dan prasarana pendidikan dan beasiswa pendidikan S2 dan S3 bidang International Nutrition di Amerika Serikat.

Tahun 1966-1970, Alan diperbantukan kepada Pemerintah India untuk mengembangkan perencanaan berbagai program gizi lintas sektor terutama pada masa kelaparan, termasuk bantuan teknis untuk para petani garam memproduksi Garam Fortifikasi. Garam tidak hanya difortifikasi dengan yodium tetapi juga dengan zat besi (Fe) yang dikenal dengan "Double Fortified Salt" untuk mengatasi sekaligus dua masalah gizi yaitu penyakit

gondok dan anemia kurang zat gizi besi.

Tahun 1972 sampai pensiun 1995, Alan direkrut oleh President Bank Dunia, Robert McNamara menjadi *Deputy Director Population and Nutrition*. Selama 23 tahun, Alan Berg bertugas di Bank Dunia, banyak negara berkembang termasuk Indonesia mendapat bantuan berbagai proyek gizi melalui sektor-sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, pembangunan desa, dan perlindungan sosial. Dari salah satu publikasi Bank Dunia mengungkapkan bahwa selama Alan Berg di Bank Dunia, lembaga keuangan dan ekonomi dunia ini telah membiayai sebesar US\$2.1 billion untuk proyek *nutrition* – “*significantly more than spending of all other donors combined*” – kata Alan Berg. Indonesia adalah negara kedua setelah Brazil yang dibiayai oleh Bank Dunia untuk proyek-proyek gizinya.

Pada tahun 2023, Alan Berg mendapat kehormatan dari perkumpulan komunitas gizi internasional sebagai “*the Lifetime Achievement of Alan Berg*” pada ulang tahunnya ke 90 dan 50 tahun bukunya “*Nutrition Factor: Its Role in National Development*” yang terbit pertama kali tahun 1973 dan tidak pernah direvisi. Sampai saat ini, buku tersebut menjadi “*best seller*” dan menjadi buku wajib di beberapa Universitas seperti MIT, Cornell, Tufts dan lain-lain untuk mata kuliah “*Nutrition International Development*”, dan menjadi buku acuan untuk perencanaan program gizi di beberapa negara.

Pelajaran tentang gizi dari Alan Berg (*Nutrition Factor*):

1. Meskipun masalah gizi jelas merupakan masalah kesehatan, tetapi penanggulangannya tidak dapat efektif hanya dengan pendekatan medis atau pendekatan sistem pelayanan kesehatan saja.
2. Masalah gizi meskipun pada hakikatnya merupakan masalah kekurangan pangan, jawabannya tidak dengan sendirinya berupa peningkatan produksi atau penyediaan pangan.

Di banyak negara berkembang, masalahnya lebih banyak menyangkut penyediaan pangan pada tingkat rumah tangga. Dengan pandangan ini, maka fokus perhatian masalah gizi diperluas dari masalah kesehatan menjadi masalah kemiskinan, pemerataan, dan masalah kesempatan kerja.

3. Meskipun masalah gizi merupakan sindrom kemiskinan, tetapi dalam kasus-kasus tertentu pemecahannya dimungkinkan tanpa harus menunggu dulu perbaikan ekonomi yang pada umumnya memakan waktu (antara lain dengan fortifikasi pangan).
4. Meskipun masalah gizi termasuk dalam domain ilmu biomedik tetapi untuk pemecahannya memerlukan analisis ekonomi dan manajemen. Dengan demikian, penyusunan programnya diperlukan perencanaan yang bersifat holistik sehingga menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional.

V. MENINGATKAN SEJARAH GIZI DAN KELEMBAGAAN SERTA KAITANNYA DENGAN BEBERAPA ASPEK SOSIAL POLITIK DAN EKONOMI



Prof Soekirman, Konsisten Fortifikasi

Oleh : Ninuk Pambudy

Kompas : 24 Oktober 2023 07:10 WIB

Melalui Koalisi Fortifikasi Indonesia, Prof Soekirman (87) terus mengupayakan agar fortifikasi vitamin A dapat diberikan melalui minyak goreng curah. Bertahun-tahun, Prof Soekirman (87) memperjuangkan perbaikan gizi masyarakat melalui fortifikasi unsur mikro pada makanan. Sebagian berhasil, tetapi masih ada yang belum memuaskan dia. Ahli gizi ini pantang menyerah. Melalui Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI), dia terus mengupayakan agar fortifikasi vitamin A dapat diberikan melalui minyak goreng curah. Saat ini yang sudah wajib dilakukan produsen adalah fortifikasi besi, seng, asam folat, dan vitamin B2 pada tepung terigu. “Minyak goreng curah dikonsumsi rakyat banyak, sedangkan yang kemasan sudah difortifikasi, tetapi pembelinya orang mampu,” kata Soekirman, Senin (23/10/2023) pagi.

Pagi seusai berolahraga, Soekirman duduk di meja kerjanya. Menggunakan internet, dia mencari informasi perkembangan fortifikasi terbaru di dunia. Salah satunya pertemuan internasional di Amsterdam, Belanda, 17 Oktober 2023. “Perhatian dunia besar pada fortifikasi untuk mengatasi masalah gizi,” tambahnya. Informasi itu dia bagikan kepada anggota KFI, peneliti, dan mahasiswa. Dia juga masih menulis untuk jurnal ilmiah internasional.



Kamera merekam Ketua Dewan Pembina Yayasan Kegiatan Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia Prof Emeritus Soekirman saat menyampaikan Widjojo Nitisastro Memorial Lecture Ke-6 dengan tema “Kelembagaan dan Kepemimpinan Gizi Nasional & Global dalam

Pembangunan: Dari Christian Eijkman sampai Widjojo Nitisastro” di Auditorium Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa (17/10/2023). Kegiatan ini digelar oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).

Bersama anggota KFI, Soekirman tengah mengupayakan mendapat dana untuk survei kecukupan unsur mikro dalam makanan masyarakat Indonesia sebagai dasar melakukan fortifikasi. “Fortifikasi adalah cara murah, mudah, dan cepat memenuhi kebutuhan unsur mikro masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Seperti memberi yodium melalui garam dan asam folat untuk perkembangan otak janin dan bayi. Makanan masyarakat mampu sudah beragam dan berkualitas, termasuk sayur dan buah sebagai sumber unsur mikro,” tambah Soekirman. (NMP)



Program Gizi Memerlukan Perencanaan Holistik

Oleh : Tatang Mulyana Sinaga

Kompas, 17 Oktober 2023



Sejumlah ilmuwan dari berbagai bidang berfoto bersama dalam Widjojo Nitisastro Memorial Lecture Ke-6 oleh Prof. Soekirman dengan tema "Kelembagaan dan Kepemimpinan Gizi Nasional & Global dalam Pembangunan: Dari Christiaan Eijkman sampai Widjojo Nitisastro", di Auditorium Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa (17/10/2023). **Kegiatan ini digelar oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).**

Penanggulangan masalah gizi tidak efektif jika hanya menggunakan pendekatan medis atau sistem pelayanan kesehatan. Program pemenuhan gizi memerlukan perencanaan holistik yang melibatkan berbagai sektor sehingga terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional.

Ketua Dewan Pembina Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia Prof (Emeritus) Soekirman mengatakan, masalah gizi di dunia termasuk di Indonesia, bukan hanya stunting (*tengkes*), tetapi juga anak kurus (*wasting*), dan

kegemukan (*overweight*). Selain itu, terdapat masalah gizi mikro khususnya anemia pada ibu hamil.

Menurut Soekirman, meskipun masalah gizi termasuk dalam domain ilmu biomedis, untuk memecahkan masalahnya membutuhkan analisis ekonomi dan manajemen. "Dengan demikian, penyusunan programnya memerlukan perencanaan yang bersifat holistik sehingga menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional," ujarnya saat menyampaikan Widjojo Nitisastro Memorial Lecture Ke-6 dengan tema "Kelembagaan dan Kepemimpinan Gizi Nasional & Global dalam Pembangunan: Dari Christiaan Eijkman sampai Widjojo Nitisastro" di Auditorium Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa (17/10/2023).

Kegiatan itu digelar oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). Selain anggota AIPI, acara ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden ke-II RI Boediono serta perwakilan keluarga Widjojo Nitisastro. Widjojo (1927-2012) memang dikenal sebagai arsitek pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, menurut Soekirman, Widjojo juga merupakan tokoh dalam bidang gizi karena menjadi Kepala Bappenas yang pertama kalinya mencantumkan masalah pangan dan gizi dalam kebijakan pembangunan nasional, yaitu Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) III pada 1979-1984.

Ia mengatakan, keberhasilan trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas, juga telah berdampak pada perbaikan gizi masyarakat waktu itu. "Pak Widjojo menekankan bahwa gizi bukan tanggung jawab satu sektor saja, tetapi melibatkan berbagai sektor dan berbagai bidang. Oleh karena itu, memerlukan sinkronisasi dalam perencanaan dan koordinasi yang tepat dalam pelaksanaannya," ujarnya.

Hal itu sejalan dengan teori THIO (*Technoware, Humanware, Infoware, Organoware*) yang diutarakan Nawaz Sharif. Menurut Soekirman, untuk menanggulangi masalah gizi, diperlukan

adanya kelembagaan gizi yang mempunyai kemampuan mendayagunakan keempat aset THIO tersebut. "Model THIO ini dapat diterapkan untuk evaluasi program, termasuk program gizi dengan menilai efektivitas keempat aset THIO dari program. Efektivitas keempat aset THIO terutama ditentukan oleh kepemimpinan yang dapat menentukan kualitas produksi dari organisasi dalam institusi program," ujarnya.

Dalam *memorial lecture* itu, Soekirman juga memaparkan sejarah kelembagaan gizi di Tanah Air. Salah satu tokohnya adalah Christiaan Eijkman yang meraih hadiah nobel di bidang kedokteran pada 1929 atas penelitiannya tentang penyakit beri-beri yang disebabkan oleh kekurangan senyawa yang terdapat pada kulit beras. Konsep ini menjadi awal penemuan vitamin. Penemuan vitamin pertama oleh Eijkman dan penerusnya dianggap sebagai awal dari ilmu gizi modern. "Dengan demikian, Eijkman adalah tokoh besar pertama ilmu gizi di Indonesia sebagai scientist yang mendirikan lembaga penelitian makanan dan gizi," katanya.

Soekirman menambahkan, selama 23 tahun bertugas di Bank Dunia, ahli gizi asal Amerika Serikat, Alan Berg, banyak membantu proyek gizi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun pada hakikatnya masalah gizi merupakan persoalan pangan, solusinya tidak dengan sendirinya berupa peningkatan atau penyediaan pangan.

Di banyak negara berkembang, masalahnya lebih banyak menyangkut penyediaan pangan pada tingkat rumah tangga. "Dengan pandangan ini, fokus perhatian masalah gizi diperluas dari masalah kesehatan menjadi masalah kemiskinan, pemerataan, dan masalah kesempatan kerja," ucapnya.

Pembangunan manusia

Menurut Boediono, Widjojo merupakan seorang ekonom sekaligus demographer yang belajar tentang kependudukan. Oleh

karena itu, fokus perhatian terbesarnya terletak pada masalah penduduk, baik terkait kuantitasnya maupun kualitasnya.

Kebijakan pembangunan manusia selalu diperhatikan dan diprioritaskan. Dengan anggaran memadai, berbagai program pelayanan kesehatan, seperti penyebaran dokter ke daerah-daerah, puskesmas, posyandu, dan perbaikan gizi, bisa berjalan.

"Menurut hemat saya, program pembangunan manusia seperti itu masih relevan sampai sekarang. Mengapa? Sebab, sumber daya manusia adalah dasar bagi institusi penyangga suatu negara, yaitu institusi-institusi yang mengatur bidang ekonomi, sosial, politik, dan pemerintahan," ujarnya.

Ketua AIPI Prof Daniel Murdiyarso mengatakan, saat ini masyarakat Indonesia mengalami kondisi yang sangat pelik dan berkepanjangan terkait stunting. Persoalan tersebut sudah dipikirkan oleh ilmuwan terdahulu melalui kebijakan fortifikasi makanan.

"Jadi, kita diingatkan sekali lagi betapa pentingnya sains dan pengetahuan masuk dalam kebijakan sehingga memengaruhi proses-proses pengambilan keputusan. Tidak berdasarkan proyek, tetapi kebijakan menyeluruh jangka panjang," katanya.

Anggota Komisi Ilmu Kedokteran AIPI Prof Sangkot Marzuki menambahkan, kesadaran tentang pentingnya gizi bagi pembangunan SDM telah disadari secara luas. Namun, masalah kekurangan gizi masih terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia.

"Padahal, menurut publikasi Bank Dunia, perbaikan gizi merupakan suatu investasi. Jadi, bukan pemborosan atau sekadar *charity*," ujarnya. **

Sejarah Asal Kata “GIZI” Sebagai Terjemahan dari Kata “NUTRITION”

Oleh : Soekirman

17 September 2012 (<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/>)



Sudah sejak lama saya mengamati ada kebingungan dan kekacauan di masyarakat mengenai penggunaan istilah Gizi dengan istilah Nutrisi. Bahkan akhir-akhir ini ada instansi pemerintah meragukan kata Gizi dalam suatu dokumen pemerintah resmi, dan mengusulkan dipakai istilah nutrisi.

Perkembangan yang tidak sehat ini kalau dibiarkan dapat merusak perkembangan Ilmu Gizi di Indonesia yang dirintis sejak tahun 1950 oleh Bapak Gizi Indonesia, Prof. Poerwo Soedarmo (1904 – 2003), yang juga penyanggah Bintang Maha Putra dibidang Ilmu Gizi (1992). Sebagai salah seorang “saksi hidup” perkembangan ilmu gizi sejak tahun 1956 di Indonesia sebagai mahasiswa dekat Prof. Poerwo Soedarmo sampai akhir hayat beliau, dan sebagai pertanggungjawaban profesional saya di bidang gizi publik (“public nutrition”), saya merasa perlu harus meluruskan dan mempertegas status kata GIZI sebagai terjemahan resmi bahasa Inggris “Nutrition”.

Penjelasan saya ini sebagian sudah saya tulis dalam buku saya “Ilmu Gizi dan Aplikasinya” yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional tahun 1999/2000. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bermanfaat untuk meluruskan perkembangan sejarah Ilmu Gizi di Indonesia. Semoga.

Sejarah Asal Kata/Istilah “Gizi” Sebagai Terjemahan Kata Inggris “Nutrition”

Istilah Gizi dan Ilmu Gizi baru dikenal di Indonesia sekitar awal tahun 1950an, sebagai terjemahan kata “Nutrition” dan “Nutrition Science”. Meskipun belum resmi ditetapkan oleh Lembaga Bahasa Indonesia, istilah Gizi dan Ilmu Gizi telah dipakai oleh Prof. Djuned Pusponegoro, dalam pidato pengukuhanannya sebagai guru besar ilmu penyakit anak di Fakultas Kedokteran UI tahun 1952. Tahun 1955, Ilmu Gizi resmi menjadi mata kuliah di Fakultas Kedokteran UI, dan tahun 1958 secara resmi dipakai dalam pidato pengukuhan Prof. Poerwo Soedarmo sebagai Guru Besar Ilmu Gizi pertama di Indonesia, di Fakultas Kedokteran UI. Sejak itu sampai sekarang banyak Fakultas Kedokteran, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan, Fakultas Kesehatan Masyarakat telah mendirikan Bagian atau Departemen Ilmu Gizi. Tahun 1965 di Jakarta diresmikan Akademi Gizi dari Departemen Kesehatan, yang sampai sekarang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia sebagai Pendidikan Politeknik Kesehatan Jurusan Gizi .

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak tahun 1958 memasukan Ilmu Gizi dalam Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional (KIPNAS) pertama, dan selanjutnya sejak tahun 1973 tiap 4 tahun sekali LIPI menyelenggarakan Widyakarya Nasional Pangan dan GIZI (WNPG) sampai tahun 2008. WNPG ke XI akan diadakan pada bulan Nopember 2012 di Jakarta.

Pengesahan kata Gizi sebagai terjemahan Nutrition dan Nutrition Science, dilakukan oleh Lembaga Bahasa Indonesia UI, waktu itu dipimpin oleh alm. DR. Haryati Soebadio.

Alm. Prof.Poerwo Soedarmo, waktu itu Direktur Lembaga Makanan Rakyat, Departemen Kesehatan RI, dan diangkat sebagai bapak Ilmu Gizi Indonesia, oleh Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), pada suatu hari tahun 1958 menugaskan 4 Mahasiswa tingkat akhir (termasuk penulis) Akademi Pendidikan Nutritisionis-Ahli Diit, Bogor, yang tahun 1965 diubah namanya

menjadi Akademi Gizi, Jakarta ,menghadap Direktur Lembaga Bahasa Indonesia, Fakultas Sastra, UI, waktu itu di Jalan Diponegoro, Jakarta.

Tujuannya untuk mendapat petunjuk terjemahan yang benar dan ilmiah untuk kata Inggris "Nutrition", dan "Nutrition Science" ke dalam bahasa Indonesia. Dr. Soebadio, menjelaskan tentang akar bahasa Indonesia kebanyakan dari bahasa Arab dan Sanksekerta. Kata Inggris Nutrition dalam bahasa Arab di sebut GHIZAI, dan dalam bahasa Sanksekerta SVASTAHARENA. Keduanya artinya sama, makanan yang menyehatkan. Atas petunjuk tersebut Prof. Poerwo Soedarmo memilih kata GIZI sebagai terjemahan resmi kata nutrition, yang sejak tahun 1952 kata GIZI itu sudah dipakai dikalangan ilmu kedokteran dan kesehatan masyarakat. Sedang kata SVASTAHARENA di pakai dalam lambang organisasi PERSAGI sampai sekarang.

Dalam Undang-Undang, istilah atau kata GIZI telah resmi dipakai dalam 1). Undang-Undang no 7 tahun 1996 tentang Pangan (Pasal 1 no 13,14; Bab III Mutu Pangan dan Gizi, Pasal 27 : 1-4; dan 2) Undang-Undang no 36 tahun 1999 tentang Kesehatan , Bab VIII tentang Gizi dan pasal 141.

Definisi Ilmu Gizi terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmunya. Dalam kuliah-kuliah saya, Ilmu Gizi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari "Proses Makanan sejak masuk mulut sampai dicerna oleh organ-organ pencernaan, dan diolah dalam suatu sistem metabolisme menjadi zat-zat kehidupan (zat gizi dan zat non gizi) dalam darah dan dalam sel-sel tubuh membentuk jaringan tubuh dan organ-organ tubuh dengan fungsinya masing-masing dalam suatu sistem, sehingga menghasilkan pertumbuhan (fisik) dan perkembangan (mental), kecerdasan, dan produktivitas sebagai syarat dicapainya tingkat kehidupan sehat, bugar dan sejahtera."

Sedang ilmu gizi publik, yang saya alami, adalah ilmu gizi yang diaplikasikan untuk kesejahteraan publik (masyarakat luas)

dengan tidak saja mengkaitkannya dengan masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga dengan masalah-masalah ekonomi, kemiskinan, pertanian, lingkungan hidup, pendidikan, kesetaraan gender, dan masalah-masalah pembangunan manusia lainnya. Secara pendek dan populer ilmu gizi sering diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan makanan dengan kesehatan.

Kesimpulan: secara resmi sejak tahun 1952 kata atau istilah GIZI, adalah istilah bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai terjemahan istilah Inggris "*Nutrition*". Dalam dokumen-dokumen resmi tidak ada terjemahan lain kecuali kata GIZI. Kalaupun ada terjemahan lain, apapun sebutannya, dapat dipastikan itu bukan bahasa Indonesia resmi dan kebanyakan digunakan di dunia bisnis dan periklanan.

Sumber :

Soekirman, Prof.PhD (1999/2000), "Arti kata Gizi dan Definisi Ilmu Gizi", dalam buku Ilmu Gizi dan Aplikasinya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, hal 5

Sejarah Perkembangan Gizi Seimbang di Indonesia

Oleh : Soekirman

KFI News Letter, Februari 2014

Pendahuluan



(Prof. Soekirman menjelaskan tentang Gizi Seimbang)

Pedoman Gizi Seimbang adalah suatu produk perkembangan ilmu pengetahuan yaitu ilmu gizi (*"nutrition science"*) dan ilmu pangan (*"food science"*). August Comte (1798-1857) mengatakan bahwa untuk mendalami ilmu pengetahuan perlu dipelajari sejarah perkembangannya. Alasannya karena ciri ilmu pengetahuan adalah selalu berubah dan berkembang sesuai dengan hasil penelitian. "Mereka yang malas mempelajari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, biasanya ketinggalan dalam mengikuti pesatnya kemajuan ilmu" –demikian Comte. Oleh karena gizi seimbang adalah bagian dari ilmu gizi, maka konsep gizi seimbang juga terus berubah dan berkembang.

Negara yang pertama menyusun semacam pedoman gizi adalah Amerika Serikat. Pedoman ini lahir dari pemikiran Wilbur Atwater (1844-1907), seorang PhD kimia pertanian. Dia mendirikan semacam Balai Percobaan Pertanian (BPP) di USA. Dalam jabatannya sebagai direktur pertama BPP dia melakukan banyak

penelitian terapan di bidang pertanian. Antara lain analisis tentang kandungan zat gizi sebagai bahan makanan. Karena itu dia dikenal sebagai penemu atau penyusun pertama Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) di USA. Dengan DKBMnya Atwater merintis pendidikan gizi (nutrition education) dikalangan masyarakat petani. Dari gagasan Atwater tercipta berbagai pedoman gizi yang dikembangkan oleh Departemen Pertanian Amerika (USDA) sampai sekarang. Di Amerika segala kebijakan pendidikan gizi berada dibawah Departemen Pertanian. Dalam aplikasinya dikerjakan bersama dengan Departemen Kesehatan.

Dari *Basic Four*, Empat Sehat Lima Sempurna, ke Gizi Seimbang

Pada awal perkembangannya tahun 1930an, ilmu gizi hanya mengenal 3 zat gizi utama, yaitu protein, karbohidrat dan lemak, ketiganya sumber energi. Baru kemudian ditemukan vitamin dan mineral. Atas dasar DKBM hasil penelitian BPP, USDA menyusun Pedoman Makanan (*"Food Guide"*) dengan mengelompokkan bahan makanan atas dasar sumber zat gizinya. Di tahun 1930an USDA mengelompokkan menjadi 12 kelompok makanan. Tahun 1940an dikecilkan menjadi 7 kelompok, dan tahun 1956 menjadi 4 kelompok yang di Amerika dikenal sebagai *"Basic Four Food Guide"*. Pedoman ini sejak tahun 1950an diikuti oleh banyak negara lain dengan *Basic Four* nya masing-masing, termasuk Indonesia dengan Empat Sehat Lima Sempurna nya. Tahun 1970 hasil survei gizi di Amerika menunjukkan bahwa pola makan orang Amerika ternyata tidak berubah bahkan cenderung lebih buruk, yaitu tinggi lemak, tinggi gula, tinggi garam, dan rendah serat. Tidak ada keseimbangan antara asupan energi dari makanan yang masuk dengan pengeluaran energi. Susunan makanan demikian memicu timbulnya kegemukan. Akibatnya jumlah orang yang gemuk dan gemuk sekali (obes) dengan dampak negatifnya terus meningkat di USA. Disimpulkan bahwa pedoman *"Basic Four"* yang dipakai sejak tahun 1940an ternyata

tidak efektif. Susunan makanan demikian memicu timbulnya kegemukan.

Sejak itu USDA bekerjasama dengan US Department of Health merancang pedoman yang lebih komprehensif dalam wadah Piramida. Tiap 5 tahun dievaluasi, pesan dan bentuk logo atau iconnya dimodifikasi. Seringnya pergantian bentuk dan pesan Piramida yang diterbitkan oleh USDA ini dipicu oleh banyaknya kritik dari berbagai kalangan akademik tentang Piramida. Kecaman yang banyak dimuat dalam web adalah dari Dr. Walter Willet dari Harvard University yang keluar buku tandingannya *"Eat, Drink, and be Healthy"* dengan PIRAMID Willetnya. Kritik lain tentang piramid adalah terlalu ruwet dan tidak efektif untuk mencegah kegemukan. Dikala terjadi perdebatan Piramida antara para pakarnya, situasi ini dimanfaatkan oleh para beberapa *"expert"* secara perorangan menerbitkan buku-buku food guide untuk menurunkan berat badan. Yang terkenal diantaranya : *Atkin Diet*, *Food Combining*, *Tiger Diet* dan lain-lain dengan teorinya sendiri-sendiri. Mungkin karena banyaknya kritikan dan tekanan makin meningkatnya masalah kegemukan di USA, Tahun 2011 USDA mengeluarkan *food guide* terbaru dan paling sederhana yaitu *MyPlate*.

Begitu keluar *MyPlate* sudah bermunculan kritiknya di web. Banyak yang mengharapkan *MyPlate* yang amat sederhana dan praktis ini dapat menurunkan prevalensi kegemukan. Bagaimana di negara lain? Dari *web searching* dan dipertemuan-pertemuan internasional, terakhir di ICN XX Granada, Spanyol, September 2013, khususnya di Asia masih mempertahankan piramidnya masing-masing dengan ciri budaya lokalnya seperti di Cina dan Korea dengan pagodanya, Jepang dengan gansingannya, dan lain-lain. Icon tumpeng gizi seimbang Indonesia yang dipresentasikan pada *Asian Congress of Nutrition di Singapore 2012*, mendapat apresiasi banyak negara karena kekhasan Indonesiannya.

Evolusi Food Guide Amerika

- Dalam 100 tahun ini USDA telah menerbitkan 8 Pedoman Makanan/Pedoman Gizi.
- 1916- *Food For Young Children*
- 1917- *How To Select Foods*
- 1943- *Basic Seven: A Day's Pattern for Good Eating*
- 1956 – *Basic Four*
- 1979 – *Guide to Better Diet: Food Pyramid*
- 1992 – *Food Guide Pyramid*
- 2005 – *MyPyramid Food Guide System*
- 2011 – *MyPlate*

Bersamaan dengan dikenalkannya *Basic Four* di Amerika tahun 1950an, banyak negara mengikuti jejak Amerika dengan *Basic-Four* atau *Basic-Five* dengan logo menurut budaya setempat. Indonesia memperkenalkan Slogan Empat Sehat Lima Sempurna (ESLS), yang diciptakan oleh Prof. dr. Poerwo Sudarmo selaku Kepala Lembaga Makanan Rakyat (LMR) waktu itu. ESLS adalah modifikasi dari *Basic Four* Amerika, yang disesuaikan dengan pola dan bahan makanan Indonesia. *Basic Four* USA telah berkali-kali dimodifikasi menjadi piramida sejak tahun 1970an. ESLS selama lebih 4 dekade tidak ada yang mengevaluasi dan mempertanyakan efektivitas slogan itu dalam memperbaiki pola makan dan kesehatan masyarakat, sampai ada rekomendasi Konferensi Pangan Dunia, FAO, tahun 1992 di Roma.

Gizi Seimbang Era Repelita

Pada tahun 1992 diadakan *International Congress of Nutrition* (ICN) di Roma yang juga dihadiri delegasi Indonesia dari Bappenas, Departemen Pertanian, dan Departemen Kesehatan. Kongres Roma ini jauh-jauh hari sudah memprediksi akan terjadinya beban ganda ("*double burden*") masalah gizi. Negara berkembang tidak hanya mengalami masalah kekurangan gizi tetapi sekaligus kelebihan gizi dengan kegemukan dan

penyakit tidak menular. Untuk itu Kongres merekomendasikan agar negara-negara yang masih menggunakan slogan *Basic Four* atau Empat Sehat (Indonesia), mulai menyesuaikan kearah pedoman gizi seimbang yang lebih komprehensif yang mengantisipasi pencegahan beban ganda. Sejak tahun itu lahir bermacam-macam pedoman gizi di berbagai negara. Sebagian besar mengikuti jejak Amerika dengan Piramida yang disesuaikan dengan budaya setempat, seperti telah disebut dimuka. Tahun 1993 Bappenas membentuk team lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi ICN Roma untuk menyusun konsep gizi seimbang. Melalui berbagai proses pertemuan nasional dan internasional, tersusunlah Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS) dengan 13 pesan. Buku itu diterbitkan pertama kali tahun 1995 oleh Departemen Kesehatan. Lebih dari itu istilah Gizi Seimbang sudah dalam kebijakan Pendidikan Gizi UPGK dalam Bab Pangan dan Gizi Repelita VI (1993-1998).

Gizi Seimbang Pasca Repelita

Pasca Repelita tahun 1998 – 2009, praktis tidak ada program gizi bermakna termasuk tidak ada kegiatan pendidikan gizi yang terencana dan terarah. Terjadi *euphoria* untuk kembali menggunakan slogan ESLS dan mematikan PUGS yang sudah menjadi kebijakan Repelita. Namun, dengan kesadaran bahwa kebenaran ilmiah harus diperjuangkan, beberapa orang secara profesional terus berjuang dengan tidak kenal lelah meneruskan konsep Gizi Seimbang yang sudah menjadi kesepakatan dunia. Setelah melalui perdebatan yang cukup lama (lebih dari 10 tahun) akhirnya secara resmi istilah Gizi Seimbang diterima dan dipakai dalam Undang Undang No 36/2009 tentang Kesehatan Bab VII tentang Gizi pasal 141.2a. Penerimaan Gizi Seimbang oleh masyarakat makin nyata setelah istilah Gizi Seimbang juga masuk dalam Undang-Undang No 18/2013 tentang Pangan.

Sejak akhir tahun 1990an, Indonesia tidak ada program pendidikan gizi nasional yang terencana baik dan benar. Dengan

demikian keberadaan PUGS tidak dirasakan perlunya oleh DepKes dan masyarakat. Meskipun tahun 1996 diterbitkan buku PUGS, tidak diikuti rencana untuk penyebarluasannya. Dengan demikian keberadaan PUGS tidak diketahui masyarakat. Sejak itu, di Indonesia terjadi kekosongan dan kehilangan pegangan dan arahan bagaimana pola makan yang sehat atas dasar kebutuhan gizi. Pendidikan gizi menjadi tanpa arah, sehingga pemahaman umum tentang gizi menjadi kacau. Kekosongan ini mestinya dirasakan oleh para petugas gizi dan kesehatan, khususnya para dosen yang mengajar, para dokter, dan tenaga kesehatan lainnya yang akan bertugas di Puskesmas dan harus melakukan pendidikan gizi masyarakat.

Tahun 2010 sekelompok pakar gizi yang bernaung dalam Danone Institute Indonesia (DII), berinisiatif untuk mengisi kekosongan ini dengan menerbitkan buku “Sehat dan Bugar berkat Gizi Seimbang” (Kompas-Gramedia), dengan memperkenalkan *icon* Indonesia Tumpeng sebagai pengganti piramida. Buku ini memperkenalkan empat prinsip atau empat pilar Gizi Seimbang yaitu : (1) aneka ragam makanan sesuai kebutuhan, (2) menjaga kebersihan, (3) aktif bergerak dan olah raga, (4) menjaga berat badan ideal. Empat pilar ini mengatakan bahwa gizi bukan semata-mata masalah makanan saja , tetapi juga masalah pola hidup. Empat pilar juga mencakup upaya pencegahan beban ganda masalah gizi (kurus dan gemuk). Buku ini direstui oleh Menteri Kesehatan, Dr. Endang Setianingsih (alm); Dirjen Kesehatan Masyarakat, Dr. Budihardja; Wakil Menteri Pertanian, Dr. Bayu Krisnamurthi; Wakil Menteri Pendidikan, Prof. Fasli Jalal; dengan membubuhkan tanda tangan mereka pada halaman depan buku. Buku ini telah diuji di depan para jurnalis dalam suatu Konferensi Pers, yang dihadiri oleh lebih dari 50 wartawan di Jakarta, untuk memberikan penilaiannya dari kacamata pers. Hasil penilaian didasarkan atas komentar pers pada media yang diterbitkan. Dari 48 media, hanya 4 media yang memberikan tanggapan dengan nada tidak setuju, sedang sisanya mendukung diterbitkan buku ini. DII juga melakukan tes

pemahaman akan isi buku terhadap 300 orang, hampir 80% memahami dari berbagai golongan umur, pendidikan, dan latar belakang sosial. 4 prinsip Gizi Seimbang mudah dimengerti dan dipraktekkan.

Apakah buku Gizi Seimbang di atas efektif menambah pengetahuan dan mengubah perilaku masyarakat? Yang dapat dipastikan ada 10.000 buku Gizi Seimbang Danone Institut yang dicetak telah habis terjual dalam waktu 2 tahun (toko buku Gramedia). Dengan demikian, apabila diasumsikan buku itu dibaca 2 orang saja per buku, berarti sedikitnya ada 20.000 orang mengenal Gizi Seimbang. Apabila tidak ada buku itu, berarti lebih banyak orang tidak mengenal Gizi Seimbang. Kekosongan pedoman gizi yang benar dalam waktu cukup lama, kemungkinan dapat membuat orang berupaya kembali ke Empat Sehat Lima Sempurna. Tentunya hal ini merupakan suatu kemunduran ilmu pengetahuan dan menghambat efektivitas program gizi. Kekosongan buku pedoman gizi seimbang juga akan menyuburkan terbitnya buku-buku pedoman gizi yang tidak jelas dasar ilmiahnya, seperti dicontohkan diawal tulisan ini.

Tahun 2014 Pemerintah (Kementerian Kesehatan) menerbitkan Pedoman Gizi Seimbang yang baru, dengan mempertahankan 4 Prinsip atau Pilarnya yaitu : Membiasakan makan beraneka ragam, sesuai dengan kebutuhan; kedua, memelihara kebersihan; ketiga, aktif bergerak dan olah raga; dan keempat, menjaga berat badan ideal dengan Indeks Massa Tubuh (IMT). Apakah buku ini akan lebih efektif, tergantung beberapa hal: Isi Buku; jumlah buku yang beredar di masyarakat; dipasarkan dengan baik; ada program pendidikan gizi (*nutrition education*) yang terencana baik sehingga kehadiran buku pedoman itu diperlukan; ada rencana evaluasi dengan "*formative research*" untuk mengukur perkembangan perubahan KAP (*Knowledge, Attitude, and Practice*) sebagai bagian dari survei pola konsumsi pangan keluarga, dan studi epidemiologi penyakit akibat beban ganda masalah gizi.

Logo Gizi Seimbang Dunia

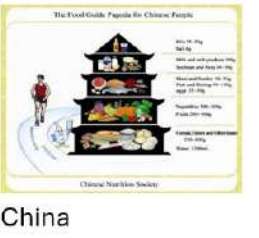
Amerika Serikat (USA) dikenal sebagai pelopor Gizi Seimbang karena mulai tahun 1916 memperkenalkan pedoman makan sehat bagi anak-anak, yang terus berkembang menjadi Pedoman “Basic Seven” tahun 1943 dan “Basic Four” 1956. Pedoman 1956 ini diadopsi banyak negara termasuk Indonesia menjadi “4 Sehat 5 Sempurna”. Mulai tahun 1970an diperkenalkan Food atau Nutrition Pyramid, logo Gizi Seimbang dalam bentuk Piramida yang mulai diadopsi oleh banyak negara awal tahun 1990-an. Sementara itu, sampai tahun 2005 Logo Piramida USA telah berubah 3-4 kali. Tahun 2011 logo Piramida hilang diganti logo piring yang dikenal dengan “MyPlate”. Perubahan-perubahan itu tentu didasari atas dinamika kemajuan ilmu dan teknologi, pola makan, dan pola penyakit di Amerika. Tujuan terakhir Gizi Seimbang di USA sangat sederhana dan praktis, yang digambarkan dengan *MyPlate*, adalah bagaimana dapat mengurangi jumlah orang obesitas (sangat gemuk) dalam waktu relatif singkat. Sedang piramida membawa pesan pendidikan gizi yang lebih kompleks, tidak hanya kegemukan.

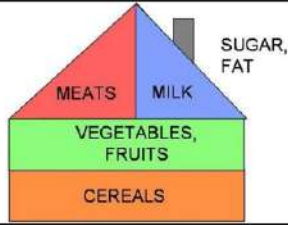
Karena itu perubahan ke *MyPlate* tidak banyak berpengaruh pada pedoman-pedoman negara lain. Suatu blog gizi di web menulis ..*“The US Food Pyramid may be dead, but many countries around the world still look to the pyramid to convey nutritional advice for the citizen”*.

Di bawah ini disajikan contoh gambar perkembangan logo Gizi Seimbang di USA, Indonesia, dan negara-negara lain. Meskipun beragam, ada pesan yang sama dari piramida-piramida tersebut, yaitu: makan beragam untuk memenuhi lebih dari 20 macam zat gizi (protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral, dan air) yang dibutuhkan badan. Kemudian ada pesan berkaitan pendidikan kebersihan dan memilih makanan yang aman (tidak tercemar), dan pesan aktivitas fisik dan olahraga, untuk menyeimbangkan masukan energi dari makanan dengan

pengeluaran energi dari aktivitas tubuh untuk menjaga berat badan ideal.

Keragaman bentuk logo disesuaikan pedoman Gizi Seimbang yang tidak hanya memperhatikan aspek zat-zat gizi, tetapi juga soal budaya, kebiasaan, dan adat makan tiap bangsa. Karena itu piramidanya ada yang berbentuk pagoda (Cina dan Korea), gangsingan (Jepang), tumpeng (Indonesia), dan lain-lain.

 The Indonesia Food Guide Pyramid is a five-tiered structure. From top to bottom, the tiers are: 1. A red triangle representing fats and oils. 2. A blue trapezoid representing protein sources. 3. A green trapezoid representing vegetables and fruits. 4. A yellow trapezoid representing grains. 5. A purple trapezoid representing dairy and eggs. The base of the pyramid is surrounded by icons of people engaged in various activities like walking, running, and playing.	 The Korean Food Guide Pagoda is a five-story pagoda. Each floor represents a food group: 1. Top floor: Grains (곡물). 2. Second floor: Protein (단백질). 3. Third floor: Vegetables (채소). 4. Fourth floor: Fruits (과일). 5. Bottom floor: Oils and fats (기름). To the right of the pagoda is a list of food items in Korean and English, categorized by floor.
Indonesia	Korea
 The Japanese Food Guide Spinning Top is a colorful spinning top divided into five horizontal sections. From top to bottom, the sections are: 1. Grains (곡물). 2. Protein (단백질). 3. Vegetables (채소). 4. Fruits (과일). 5. Oils and fats (기름). To the right of the spinning top is a list of food items in Japanese and English, categorized by section.	 The Chinese Food Guide Pagoda is a five-story pagoda. Each floor represents a food group: 1. Top floor: Grains (谷物). 2. Second floor: Protein (蛋白质). 3. Third floor: Vegetables (蔬菜). 4. Fourth floor: Fruits (水果). 5. Bottom floor: Oils and fats (油脂). To the right of the pagoda is a list of food items in Chinese and English, categorized by floor.
Jepang	China



Hongaria



Spanyol



Malaysia



Thailand

Status Gizi dan Masyarakat yang Demokratis

Oleh : Ninuk Mardiana Pambudy

Kompas, 17 Juni 2002, hal.12

Pengalaman semua negara, termasuk Indonesia, menunjukkan ukuran makro seperti produksi, pendapatan per kapita, dan produk nasional bruto, tidak selalu sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ukuran yang baru belakangan dimasukkan untuk mengukur tingkat kesejahteraan adalah angka kematian bayi dan ibu melahirkan, tetapi yang sering luput adalah kekurangan gizi pada anak. "Kekurangan gizi pada anak sebenarnya adalah bentuk dari kelaparan tak kentara. Dan itu salah satu ukuran kesejahteraan, selain kesehatan dan pendidikan," kata Prof. Dr. Soekirman, MPS. "Pengalaman saya lebih dari 40 tahun juga menunjukkan, selama masyarakat belum demokratis dan transparan, selama masih ada KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) masalah kekurangan gizi tidak akan bisa diatasi" tandas laki-laki kelahiran Baureno, Bojonegoro (Jawa Timur), 2 Agustus 1936 itu. Soekirman tidak mengada-ada karena selain bidang keahliannya adalah ilmu gizi, dia juga sudah makan asam garam berbagai penelitian keadaan gizi masyarakat maupun ikut menyusun kebijakan perbaikan gizi nasional serta memantau pelaksanaannya di lapangan.

"Ketika menggagas Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) untuk membantu meningkatkan gizi anak sekolah, saya juga merancang uang harus dikirim ke rekening desa melalui Bank Rakyat Indonesia atau kantor pos. Pikiran saya, orang di desa tidak akan korupsi," kata guru besar tetap bidang ilmu gizi di Institut Pertanian Bogor (IPB) sejak tahun 1991 ini. Soekirman ternyata salah duga. Ketika berkeliling ke desa-desa dari barat sampai timur Indonesia untuk memantau pelaksanaan PMTAS, uang itu memang sampai di desa tetapi ternyata tetap ada pemotongan. Ada yang uangnya dipegang istri lurah dan warga tidak tahu penggunaannya; di tempat lain

tidak dibelikan produksi desa itu padahal, ada ketentuan harus membeli produksi setempat supaya uang berputar di desa itu. "Bila dibelikan bahan pangan di desa semua penduduk tahu berapa harganya. Jadi sengaja dibelikan di pasar di luar desa supaya harganya bisa dinaikkan," kata Soekirman.

Berkaitan dengan konferensi para kepala negara yang diadakan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) di Roma yang berakhir Kamis pekan lalu, Soekirman mengatakan meskipun konsep mengaitkan produksi pangan dengan pola konsumsi dan keadaan gizi individu yang lebih dikenal sebagai ketahanan pangan sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Pangan Tahun 1996, realitasnya di lapangan seringkali masing-masing masih jalan sendiri.

Akhir Juni ini, Soekirman yang dipercaya menjadi Ketua Kelompok Kerja Ahli Ketahanan Pangan Nasional diundang FAO ke Roma untuk ikut menilai makalah ilmiah dari ahli-ahli berbagai negara dalam mencari metodologi pengukuran ketahanan pangan, konsumsi, dan status gizi.

Begitu besar dedikasinya pada bidang keilmuannya, sampai-sampai dia merasa perlu mengampunyeakan untuk menggunakan kata gizi bukan nutrisi seperti yang sering dipakai di dalam iklan. Alasannya bukan sekadar kebanggaan pada istilah temuan ahli bahasa Indonesia pada tahun 1950-an atas kata yang berakar dari kata Arab *ghidza*. Menurut Soekirman yang lebih mendasar adalah, "Kata gizi berasal dari perkembangan sebuah ilmu pengetahuan dan itu tidak bisa diubah seenaknya. Yang menggunakan kata nutrisi itu orang yang tidak mengenal ilmu gizi, baru belajar dua tiga tahun terakhir saja." Selain masih terus mengajar mahasiswa S1, S2, dan S3 di IPB, kini Soekirman juga membentuk lembaga non pemerintah Koalisi Fortifikasi Indonesia yang beranggotakan akademisi, anggota masyarakat, orang pemerintah, dan swasta. Tujuannya, mencari cara memfortifikasi makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat dengan zat gizi yang masyarakat paling kekurangan, untuk mempercepat

pengurangan kekurangan gizi. "Status gizi erat kaitannya dengan kemiskinan, dan saya bangga mempelajarinya," katanya. (Ninuk Mardiana Pambudy)

Gizi Buruk, Kemiskinan, dan KKN

Oleh : Soekirman,
Kompas, 9 Juni 2005

Munculnya kembali kasus gizi buruk di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur seperti diberitakan Kompas (26 dan 27/5) dan media masa lainnya mengingatkan saya akan berita Kompas, Kasus Bayi HO Pertama Beratnya Kemiskinan, pada saat krisis ekonomi tahun 1998 (Kompas, 13/10/1998). Berita yang sama waktu itu juga dimuat dalam harian Merdeka dengan judul Fungsikan Kembali Posyandu (Merdeka, 13/10/1998). Tampaknya masalah kurang gizi di negeri tercinta ini masih tersembunyikan di balik hiruk-pikuknya pesta demokrasi, transformasi, dan otonomi, serta terakhir pemilihan kepala daerah.

Padahal, di balik hiruk-pikuk itu, sejak krisis berbagai program dan proyek telah digelar pemerintah dengan anggaran ratusan miliar rupiah bahkan mungkin triliun dengan berbagai nama menarik, di antaranya Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), Dana Kompensasi BBM, Bantuan Pangan Raskin (untuk keluarga), dan Makanan Tambahan Balita Kurang Gizi (MPASI). Semua atas nama dan demi orang dan anak balita miskin. Karena label miskin inilah barangkali program-program itu relatif mudah mendapat persetujuan anggaran oleh pemerintah dan DPR atau DPRD meskipun belum ada bukti efektif tidaknya program dan proyek tersebut.

Menarik menyimak tajuk Kompas, Mengapa Ada Kasus Busung Lapar di NTB (Kompas, 27/5). Antara lain dikutip pemikiran Prof Mubyarto (almarhum) bahwa masih banyaknya warga bangsa yang tidak berdaya.

Saya mau menambahkan bahwa sebagian besar (75 persen) dari yang tidak berdaya adalah petani miskin (Bustanul Arifin, Kompas, 23/5) yang di NTB menghasilkan surplus beras. Hal menarik lain dari tajuk Kompas tersebut adalah masih adanya sikap sementara pejabat daerah yang menyangkal adanya kelaparan di wilayahnya. Sikap ini tampaknya turun-temurun dari sejak awal zaman Orde Baru. Pada masa itu kata kelaparan atau dihaluskan menjadi rawan pangan ditabukan dan berisiko politik atau jabatan jika disiarkan.

Mungkin di antara pembaca masih ada yang ingat mengenai kasus dokter puskesmas di suatu desa miskin yang dimutasikan oleh atasannya gara-gara memberikan data kelaparan kepada pers. Ketabuan ini karena adanya kaitan antara kelaparan, gizi buruk, dan kemiskinan. Bicara gizi buruk berarti bicara soal kemiskinan, suatu istilah yang pada waktu itu masih dianggap tabu. Dunia pers lebih suka pakai istilah busung lapar meskipun anak yang gizi buruk belum tentu kelaparan. Yang tepat sebenarnya kelaparan tidak kentara (*hidden hunger*) karena mereka hanya kenyang karbohidrat, tetap lapar banyak zat gizi lainnya.

Gizi buruk adalah bentuk terparah (akut) dari proses terjadinya kekurangan gizi. Anak balita (bawah lima tahun) sehat atau kurang gizi dapat diketahui dari pertambahan berat badannya tiap bulan sampai usia minimal dua tahun (baduta). Apabila pertambahan berat badan sesuai dengan pertambahan umur menurut suatu standar Organisasi Kesehatan Dunia, dia bergizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut bergizi kurang yang bersifat kronis. Apabila jauh di bawah standar dikatakan bergizi buruk. Jadi, istilah gizi buruk adalah salah satu bentuk kekurangan gizi tingkat berat atau akut.

Anak yang bergizi kurang, berarti kekurangan gizi pada tingkat ringan atau sedang, belum menunjukkan gejala sakit. Dia seperti anak-anak lain, masih bermain dan sebagainya, tetapi jika diamati dengan saksama badannya mulai kurus.

Dari sekitar 5 juta anak balita (27,5 persen) yang kekurangan gizi, lebih kurang 3,6 juta anak (19,2 persen) dalam tingkat gizi kurang, dan 1,5 juta anak gizi buruk (8,3 persen) (Depkes, 2004 mengutip BPS 2003).

Meskipun jumlahnya relatif lebih sedikit, kasus gizi buruk lebih cepat menarik perhatian media massa karena dapat dipotret dan kelihatan nyata penderitaan anak: sakit, kurus, bengkak (busung), dan lemah. Mereka mudah dikenal dan dihitung karena dibawa ke rumah sakit. Keluarga dan masyarakat tidak dapat berbuat banyak bagi anak yang gizi buruk.

Berbeda dengan anak yang gizi kurang, meskipun jumlahnya lebih banyak, mereka kurang mendapat perhatian karena tidak mudah diketahui umum. Padahal, kelompok anak ini adalah kandidat gizi buruk apabila tidak dilakukan upaya pencegahan. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh orangtua dan masyarakat untuk menjaga agar anak yang sehat dan bergizi kurang terhindar dari gizi buruk.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memantau pertambahan berat badan anak (terutama baduta) dengan kartu menuju sehat (KMS) di posyandu, dengan syarat bahwa posyandunya masih melakukan fungsi utamanya, yakni melakukan pemantauan berat badan anak dengan baik dan benar. Menurut penelitian, banyak posyandu yang tidak lagi melakukan fungsi tersebut dengan baik dan benar. Saya punya keyakinan bahwa terus maraknya kasus gizi buruk di desa-desa salah satu sebab utamanya adalah tidak berfungsinya posyandu dengan baik dan benar.

Kemiskinan

Benar yang dikemukakan dalam tajuk Kompas (27/5) bahwa terjadinya busung lapar atau gizi buruk adalah suatu proses, tidak tiba-tiba. Karena itu, apabila pemerintah dan masyarakat mau mengerti dan mau bertindak, terjadinya busung lapar dan gizi buruk dapat dicegah, yakni dengan mengetahui sebab langsung dan tidak langsung gizi buruk. Kedua memantau (*surveillance*), dan lakukan tindakan pencegahan.

Penyebab langsung yang dialami oleh anak ada dua. Pertama, bayi dan anak balita tidak mendapat makanan yang bergizi seimbang, dalam hal ini air susu ibu, dan kalau sudah lebih dari enam bulan anak tidak mendapat Makanan Pendamping (baca: bukan pengganti) ASI (MPASI) yang baik. MPASI yang baik tidak hanya cukup mengandung energi dan protein, tetapi juga mengandung zat besi, vitamin A, asam folat, vitamin B, vitamin, dan mineral lainnya. Hanya keluarga mampu dan berpendidikan yang mampu menyediakan MPASI yang baik ini, baik memasak sendiri atau membeli. Karena itu, umumnya anak-anak mereka tumbuh kembang dengan baik, sedangkan anak balita dari keluarga tidak mampu harus puas dengan makanan seadanya yang tidak memenuhi kebutuhan gizi anak balita.

Kedua, pola pengasuhan anak. Suatu studi *positive deviance* mempelajari mengapa dari sekian banyak bayi dan anak balita di suatu desa miskin hanya sebagian kecil yang gizi buruk, padahal orang tua mereka semuanya petani miskin. Dari studi ini diketahui pola pengasuhan anak berpengaruh terhadap timbulnya gizi buruk. Anak yang diasuh ibunya sendiri dengan kasih sayang, apalagi ibunya berpendidikan dan mengerti soal pentingnya ASI, posyandu, kebersihan, meskipun sama-sama miskin, ternyata anaknya lebih sehat.

Unsur pendidikan wanita berpengaruh pada kualitas pengasuhan anak. Sebaliknya, sebagian anak yang gizi buruk ternyata diasuh oleh nenek atau tetangga bukan kerabat yang

juga miskin dan tidak berpendidikan. Banyaknya wanita yang meninggalkan desa mencari kerja di kota, bahkan menjadi TKI, kemungkinan juga dapat menjadi penyebab gizi buruk.

Ketiga, pelayanan kesehatan, terutama imunisasi, penanganan diare dengan oralit, tindakan cepat pada anak balita yang tidak naik berat badan, pendidikan dan penyuluhan kesehatan dan gizi, dukungan pelayanan di posyandu, penyediaan air bersih, kebersihan lingkungan, dan sebagainya. Pelayanan kesehatan yang lemah dan tidak memuaskan masyarakat terkait dengan kedua penyebab di atas.

Saya khawatir mewabahnya berbagai penyakit menular akhir-akhir ini, seperti demam berdarah, diare, polio, dan malaria, secara hampir bersamaan waktu di mana-mana menggambarkan melemahnya pelayanan kesehatan di daerah-daerah. Munculnya kasus gizi buruk logikanya juga terkait dengan hal tersebut. Hasil jajak pendapat Kompas, Memotret Dampak Polio, menggambarkan makin meningkatnya persentase responden yang tidak puas terhadap pelayanan kesehatan dalam 2-3 tahun terakhir (2003-2005) (Kompas, 14/5, halaman 44).

Kemiskinan dan gizi buruk

Kemiskinan merupakan penyebab pokok atau akar masalah gizi buruk. Data di Indonesia dan di negara lain menunjukkan adanya hubungan antara kurang gizi dan kemiskinan. Proporsi anak yang gizi kurang dan gizi buruk berbanding terbalik dengan pendapatan. Makin kecil pendapatan penduduk, makin tinggi persentase anak yang kekurangan gizi; makin tinggi pendapatan, makin kecil persentasenya.

Hubungannya bersifat timbal balik. Kurang gizi berpotensi sebagai penyebab kemiskinan melalui rendahnya pendidikan dan produktivitas. Sebaliknya, kemiskinan menyebabkan anak tidak mendapat makanan bergizi yang cukup sehingga kurang gizi dan seterusnya.

Kemiskinan merupakan penghambat keluarga untuk memperoleh akses terhadap ketiga faktor penyebab di atas. Kemiskinan tidak memungkinkan anak balita mendapat MPASI yang baik dan benar.

Kemiskinan dan pendidikan rendah membuat anak tidak memperoleh pengasuhan yang baik sehingga anak tidak memperoleh ASI, misalnya. Kemiskinan juga menghambat anak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.

Apakah dengan demikian untuk mencegah gizi buruk harus menunggu berhasilnya pembangunan ekonomi sampai masalah kemiskinan dituntaskan? Masalahnya berapa lama kita harus menunggu perbaikan ekonomi dan membiarkan anak-anak mati akibat gizi buruk .

Kita tahu pembangunan ekonomi rakyat dan menanggulangi kemiskinan memakan waktu lama. Pada masa Orde Baru diperlukan waktu lebih dari 20 tahun untuk mengurangi penduduk miskin dari 40 persen (1976) menjadi 11 persen (1996).

Data empiris dari dunia menunjukkan bahwa program perbaikan gizi dapat dilakukan tanpa harus menunggu rakyat menjadi makmur, tetapi menjadi bagian yang eksplisit dari program pembangunan untuk memakmurkan rakyat (Soekirman, Pidato Pengukuhan Guru Besar IPB, 1991).

Hal ini sudah dilakukan pemerintah sejak Orde Baru dalam berbagai program Repelita. Sejak krisis ekonomi tahun 1998 dilakukan program JPS dan penanggulangan kemiskinan. Pertanyaannya, mengapa masih juga muncul gizi buruk. Tentunya ada penyebab tidak langsung lain yang lebih pokok.

Dalam wawancara saya dengan wartawan Kompas tahun 2002 yang oleh Kompas diberi judul Status Gizi dan Masyarakat yang Demokratis, antara lain saya katakan "... selama masyarakat belum demokratis dan transparan, selama masih ada KKN, masalah kekurangan gizi tidak akan dapat diatasi (dengan

tuntas)” (Kompas, 17/6/2002, halaman 12).

Penyakit KKN mengurangi efektivitas pelaksanaan program sehingga program dan proyek yang ditujukan untuk memperbaiki berbagai faktor penyebab (ketahanan pangan, pengasuhan anak, dan pelayanan kesehatan) tidak tampak dampaknya.

Pernyataan saya tahun 2002 rasanya masih relevan. Selama penyakit KKN belum dapat dituntaskan, kemiskinan dan gizi buruk sepertinya akan masih menghantui anak balita di beberapa wilayah di negeri kita.(Soekirman Guru Besar Ilmu Gizi Institut Pertanian Bogor).

Gizi adalah Juga Isu Ekonomi

Oleh : Ninuk Mardiana Pambudy

Harian Kompas, Jumat 5 September 2008

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi IX di Jakarta pada akhir Agustus lalu memetakan sejumlah tantangan yang harus segera diatasi, yaitu peningkatan jumlah penduduk, persaingan antara bahan pangan dan penggunaannya untuk bahan bakar dan pakan, perubahan iklim, serta upaya mencapai Tujuan Pembangunan Milenium.

Permasalahan pangan dan gizi berkembang sangat cepat dan kompleks karena berbagai perubahan di tingkat global dan nasional. Di dalam negeri, tantangan yang sampai saat ini belum juga terselesaikan adalah akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, bermutu, aman, dan dalam harga yang dapat dijangkau yang tercermin dengan munculnya masalah pangan dan gizi kurang di beberapa daerah Indonesia. Selain itu, tuntutan konkret yang segera harus diatasi adalah penyediaan pangan untuk 247 juta jiwa pada tahun 2015 dan 261 juta jiwa tahun 2020.

Menurut Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Ketua Panitia Pengarah Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) IX Prof Dr Umar Anggara Jenie, MSc Apt, widyakarya

mengambil tema “Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi untuk Mencapai *Millennium Development Goals*” diarahkan pada pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs).

Dari delapan sasaran MDGs, sebagian besar berhubungan dengan gizi, yaitu dalam pengurangan kelaparan, penurunan angka kematian anak, memperbaiki kesehatan ibu, memerangi penyakit infeksi, pendidikan untuk semua, kesetaraan gender, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Lintas sektoral

Diskusi di dalam widyakarya dan seperti juga disampaikan Kepala LIPI memperlihatkan, menjawab tantangan perbaikan gizi masyarakat adalah pekerjaan lintas sektoral, bukan hanya masalah kesehatan. Biplap Nandi dari Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membahas tentang perubahan iklim, bahan bakar nabati, dan pangan mengingatkan, ketersediaan pangan kini bersaing dengan pemakaian untuk bahan bakar nabati akibat mahalnnya harga minyak bumi. Ditambah dengan meningkatnya permintaan dari China dan India yang daya beli rakyatnya meningkat dan kebutuhan untuk pakan ternak, harga pangan juga meningkat. Situasi ini bisa menjadi peluang untuk petani yang memiliki kelebihan produksi untuk dijual, tetapi menjadi masalah untuk keluarga yang harus membeli semua kebutuhan pangannya.

Pengalaman dari China yang disampaikan Ray Yip dari Gates Foundation dan paparan Reynaldo Martorell dari Emory University, AS, mengingatkan pentingnya peran kelembagaan di komunitas untuk menyelesaikan masalah pangan dan gizi.

Dr Martorell yang meneliti tentang pengaruh gizi pada tinggi anak-anak di Guatemala dan dampaknya setelah mereka dewasa dalam mendapatkan pekerjaan menyebutkan, komunitas berperan penting dalam memantau anak-anak yang kurang gizi dan memastikan anak-anak itu mendapat tambahan makanan memadai.

Untuk Indonesia yang kondisi sosial, ekonomi, dan geografinya amat beragam, mengatasi masalah gizi dan pangan berarti juga sangat tergantung kondisi setempat. Apalagi, Indonesia secara bersamaan mengalami masalah kurang gizi dan gizi berlebih.

Dari diskusi bersubtema "Perbaikan Gizi Masyarakat", pengalaman Bupati Gorontalo David Babiho Akib mengatasi masalah gizi kurang pada anak balita memperlihatkan pentingnya peran kepemimpinan pemerintah daerah. Bupati Akib bukan hanya menekankan perbaikan gizi dengan, antara lain, mengikat kontrak dengan semua kepala desa untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui perbaikan kesehatan, ekonomi, dan pendidikan, melainkan juga meningkatkan kapasitas ekonomi petani dengan kredit ringan.

Isu ekonomi

Di sisi lain, gizi juga menjadi isu ekonomi yang signifikan. Deputi II Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan Menko Perekonomian Bayu Krisnamurti menyebutkan pentingnya para ahli gizi dan pangan mengangkat isu gizi dan pangan sebagai isu ekonomi. Bayu mencontohkan, data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan, pengeluaran masyarakat dunia untuk kesehatan 50 persennya berhubungan dengan masalah degenerasi/klinis yang terkait dengan masalah gizi dan perilaku. Sisanya, 10 persen untuk kecelakaan dan 40 persen untuk infeksi.

Sedangkan untuk Indonesia, angka perkiraannya Rp 11,6 triliun biaya kesehatan tahun 2007 terkait dengan masalah gizi dan perilaku kurang sehat. "Gizi tidak hanya menyangkut sektor kesehatan," kata Bayu. Membangun ketahanan pangan menyangkut juga penghapusan kemiskinan yang antara lain berarti penyediaan lapangan kerja; pengetahuan, pemahaman dan kesadaran menyangkut keluarga, pengambil keputusan dan masyarakat umum; dan sistem gizi nasional, seperti penyuluh gizi, ahli gizi, dan kelembagaan kebijakan gizi.

Hasil penelitian jangka panjang Dr Martorell menegaskan

keterkaitan antara gizi dan ekonomi. Dia meneliti hubungan antara tinggi tubuh dengan kurang gizi dan ekonomi di Guatemala dari usia anak balita hingga dewasa. Hasilnya, anak-anak yang kekurangan gizi saat usia di bawah tiga tahun akan tumbuh pendek.

Setelah dewasa, peluang mereka yang bertubuh pendek mendapat pekerjaan lebih rendah dibandingkan dengan yang bertubuh normal. Pada perempuan yang pendek, peluang itu lebih rendah lagi dibandingkan laki-laki yang pendek. Selain itu, penghasilan mereka yang bertubuh pendek juga lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang bertubuh normal.

Penelitian tersebut mengonfirmasi bahwa kekurangan gizi saat balita, terutama di bawah usia tiga tahun, menurunkan potensi ekonomi suatu bangsa. Padahal, data dari Lancet memperlihatkan, Indonesia memiliki anak balita yang pendek sebanyak hampir 40 persen.

Dalam penelitian Dr Martorell, intervensi melalui pemberian makanan tambahan dalam bentuk minuman bergizi dengan protein, kalori, dan unsur mikro yang lebih baik kepada anak-anak usia di bawah tiga tahun dapat memperbaiki keadaan pendek itu.

"Intervensi adalah cara terbaik mengatasi masalah kematian anak dan beban ekonomi nasional pada masa depan karena penyakit akibat kurang gizi pada anak," kata Dr Martorell. Dia juga merekomendasi untuk memperhatikan kesehatan dan asupan gizi ibu hamil karena akan langsung memengaruhi kondisi fisik dan kecerdasan bayi yang dilahirkan.

Diskusi di dalam widyakarya ini belum secara tajam membahas bagaimana koordinasi lintas sektoral itu akan dilakukan dan diimplementasikan di lapangan. Yang juga belum terlihat jelas adalah bagaimana menumbuhkan inisiatif di masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengatasi masalah gizi dan pangan.

Mengkritisi Susu untuk Anak Sekolah di Pedesaan

Oleh : Soekirman, Suara Pembaruan

9 September 2009

Beberapa bulan terakhir ini, sering terdengar rencana pemerintah pusat dan daerah untuk mengadakan program susu anak sekolah di pedesaan dan masyarakat miskin. Bahkan, ada partai dalam kampanyenya menjanjikan setiap anak akan minum susu. Sudah menjadi mitos di kalangan masyarakat dan pejabat, susu sudah dianggap solusi dari masalah kekurangan gizi. Karena itu, susu menjadi program dunia yang disponsori oleh UNICEF dan USAID. Tetapi itu pada 1950-an sampai 1970-an. Sejak 1970-an, program dunia itu dihentikan.

Mitos bahwa susu mengatasi masalah kekurangan gizi tidak terbukti. Masalah kekurangan gizi di negara penerima bantuan susu UNICEF dan USAID di Afrika dan Asia, termasuk Indonesia, pada tahun 1970-an tidak berkurang, malah meningkat. Bukti lain bahwa susu bukan "obat" mujarab dapat dilihat di India. Bangsa India sejak zaman dulu dikenal sebagai "Bangsa susu". Dengan kampanye "*White Revolution*"nya, India dikenal sebagai "*The World Leader of Milk Production*". Tidak ada orang India, kaya dan miskin, yang sehari-harinya tidak minum susu. Suatu sumber menunjukkan, konsumsi di India rata-rata 200 gram perkapita per hari. Indonesia baru sekian cc perkapita per hari. Anehnya prevalensi anak kekurangan gizi di India adalah tertinggi di Asia.

Berdasarkan berbagai penelitian, sejak 1970-an, susu bukanlah jawaban dari upaya mengatasi kurang gizi. Sebab masalah gizi adalah multifaktor, bukan hanya karena makanan, termasuk bukan karena susu (sapi). Meskipun demikian, tidak berarti susu tidak penting. Susu tetap penting, seperti halnya telur, ikan, daging, sebagai sumber protein hewani, bagi siapa saja, kecuali susu sapi untuk bayi 0-6 bulan yang hanya memerlukan Air Susu Ibu (ASI).

Suatu angan-angan untuk menyediakan susu bagi setiap anak adalah angan-angan mulia, asal disadari bahwa ada beberapa infrastruktur yang harus disiapkan. Pertama, menyediakan tempat penyimpanan susu yang dapat mencegah susu tidak mudah rusak, tersedia air bersih, dan terjamin kebersihan lingkungan, Kedua, disediakan susu dengan rendah laktosa untuk mencegah terjadinya diare karena intoleransi laktosa. Banyak orang yang sehabis minum susu kembung, sakit, dan diare.

Program susu sekolah sebenarnya dibutuhkan, terutama oleh anak-anak miskin yang sebagian besar kekurangan gizi. Masalahnya, susu bagi masyarakat miskin menjadi minuman yang tidak aman, karena berbagai persyaratan agar susu menjadi makanan yang aman, seperti disebutkan di atas, sulit dicapai.

Komoditas Impor

Masalah lain, sebagian besar (75%) susu adalah komoditas impor. Termasuk komoditas mahal, yang tidak terjangkau daya beli masyarakat banyak. Kalau dijadikan program, *opportunity cost*-nya terlalu tinggi. Artinya, ada pilihan program yang lebih *cost-effective*, pro-rakyat dan petani kecil, yaitu telur. Karena itu susu seharusnya diperlakukan sebagai *private goods* (urusan swasta, keluarga, masyarakat) bukan *public goods* (urusan pemerintah). Di negara mana saja berlaku dalil program gizi yang bergantung pada komoditas impor tidak akan *sustainable*. Ditinjau dari efektivitas program, banyak data menunjukkan bahwa program susu anak sekolah di negara berkembang tidak berhasil mengatasi masalah kekurangan gizi. Hal ini antara lain menyebabkan dihentikannya program susu UNICEF dan USAID, pada 1970-an. Demikian juga contoh mengenai susu di India seperti diuraikan di atas. Sedang dari sudut *cost*, baik untuk susu maupun logistik, program susu adalah program gizi termahal di antara program gizi lainnya, namun tidak efektif untuk memecahkan masalah gizi.

Karena berbagai masalah tersebut, program gizi di Indonesia tidak menggunakan susu, kecuali program susu UNICEF pada tahun 1970-an. Program gizi lebih menekankan penggunaan bahan pangan sumber protein hewani, seperti telur, ikan, dan unggas. Hal itu dilaksanakan dalam Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) yang dimulai 1994. Entah atas desakan siapa, pada 1994, Presiden Soeharto pernah memerintahkan Ketua Bappenas Ginanjar Kartasasmita untuk memasukan susu dalam Program PMTAS di daerah tertinggal sebagai bagian dari program IDT. Menyadari banyaknya masalah program susu seperti diuraikan di muka, Bappenas tidak melaksanakan perintah tersebut.

***[https://www.mail-archive.com/cikeas@yahoogroups.com/
msg20278.html](https://www.mail-archive.com/cikeas@yahoogroups.com/msg20278.html)***

Kelebihan Gizi Ancam Golongan Menengah Ke Atas

MERDEKA
SELASA, 29 OKTOBER 1991

• Soekirman Guru Besar Ilmu Gizi IPB :

Kelebihan Gizi Ancam Golongan Menengah Ke Atas

Bogor, Senin, Mdk

Indonesia akan menghadapi masalah gizi ganda. Di satu pihak masalah gizi yang berkaitan dengan penyakit infeksi dan kemiskinan, akan tetap merupakan masalah besar yang masih mengancam 30 juta penduduk yang saat ini masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Oleh karena itu program penanggulangan kemiskinan harus tetap merupakan prioritas tinggi dalam Program Jangka Panjang (PJ) II.

Di pihak lain oleh karena makin meningkatnya pendapatan dan perubahan gaya hidup sebagian penduduk akibat keberhasilan pembangunan ekonomi dan pengaruh budaya global, maka masalah gizi lebih (over nutrition) akan mengancam kehidupan penduduk golongan menengah keatas serta kelompok usia lanjut (manula).

Ancaman tersebut berupa makin meningkatnya penyakit-penyakit bukan infeksi terutama dalam bentuk penyakit kegemukan, penyakit jantung, penyakit tekanan darah tinggi dan penyakit kanker.

Prof. Dr. Soekirman (55) menyampaikan hal itu dalam orasinya yang judul "dampak pembangunan terhadap keadaan gizi masyarakat" pada pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Gizi di Institut Pertanian Bogor (IPB), Sabtu.

Soekirman yang sehari-hari sebagai Deputi Ketua Bappenas bidang Sosial Budaya dan Jugadisen tidak tetap pada Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga, IPB merupakan profesor Ilmu Gizi kedua yang dikukuhkan di IPB dan merupakan Guru Besar Ilmu Gizi kelima di Indonesia.

Guru Besar Luar Biasa Ilmu Gizi IPB kelahiran Baureno, Bojonegoro, Jawa Timur itu lebih jauh mengemukakan, dalam rangka menghadapi masalah gizi ganda itu, kalangan pakar gizi perlu segera menyiapkan konsep pedoman pola makanan seimbang yang disesuaikan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat berdasarkan tingkat sosial, ekonomi dan budaya yang berbeda-beda.

Pedoman ini akan merupakan kelanjutan pedoman "Empat sehat lima sempurna" karya Prof. Dr. Porwo Soedarmo tahun 1950 an yang akan disesuaikan dengan keadaan masa mendatang.

Jamu Tradisional

Di bagian lain orasinya, Soekirman menyatakan, dalam hal anemia gizi, harus dimasukkan dalam agenda masalah yang mendesak mengingat dampaknya terhadap kematian ibu yang melahirkan dan kematian bayi.

Untuk intervensi perlu dilakukan terobosan antara lain dengan melakukan percobaan fortifikasi zat besi ke dalam jamu-jamu tradisional untuk wanita terutama wanita hamil.

"Untuk itu diperlukan keberanian dari para pengambil keputusan untuk keluar dari pemikiran konvensional dalam hal jamu tradisional ini, setidaknya untuk tahap penelitian percobaan," ujarnya.

Dalam berbagai forum internasional, menurut Soekirman Indonesia telah dijadikan salah satu contoh kisah sukses dalam upaya memberantas masalah kebutaan akibat kekurangan vitamin A yang masih mengancam jutaan anak-anak balita di negara berkembang.

Selain itu, dalam hal pengembangan ilmu gizi khususnya pengembangan tentang teori vitamin A, Indonesia tercatat sebagai negara pertama yang penelitiannya berhasil menemukan adanya pengaruh kekurangan vitamin A terhadap resiko kesakitan dan kematian terhadap anak balita.

Penemuan ini akan dapat mempengaruhi kebijaksanaan beberapa program pelayanan kesehatan dasar, terutama program imunisasi dan pelayanan gizi di Posyandu.

Dekade Kemiskinan

Pada awal orasinya, Guru Besar Ilmu Gizi ini mengatakan, dasawarsa delapan puluhan bagi beberapa negara berkembang merupakan dasawarsa "gelap" oleh karena kegagalan-kegagalan dalam menghadapi gejolak ekonomi akibat resesi ekonomi dunia.

Oleh Jolly, dasawarsa delapan puluhan diramalkan akan tercatat dalam sejarah pembangunan sebagai dekade kemiskinan dan kurang gizi di banyak negara berkembang, terutama di negara-negara Asia Latin, bahkan di negara-negara kaya di Timur Tengah.

Hanya di beberapa negara di Asia yang "dinamik" diperkirakan masalah gizi dan kemiskinan akan berkurang. Oleh karena itu untuk mencegah berlanjutnya kemerosotan tingkat kehidupan dan mengikuti jejak beberapa negara Asia yang dinamik itu, sejak 1985 Jolly mengumandangkan tema "Pembangunan yang manusiawi" dalam rangka restrukturisasi ekonomi.

Dalam kurun waktu kurang dari satu generasi, kata Soekirman jumlah orang miskin di Indonesia telah berhasil dikurangi dengan bermakna. Sejalan dengan itu, secara umum keadaan gizi masyarakat juga berkembang. Sejalan dengan itu, secara umum keadaan gizi masyarakat juga berkembang. Sejalan dengan itu, secara umum keadaan gizi masyarakat juga berkembang.

Dalam hal masalah Gangguan Akibat Yodium (Gaki), Guru Besar memandang perlunya tindakan-tindakan berupa, intensifikasi kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai bahaya Gaki yang berdampak sangat negatif terhadap kualitas hidup bangsa.

Tindakan yang lain adalah konsolidasi data dan informasi melalui studi epidemiologi Gaki, perlunya terobosan teknologi yodisasi air minum dan produksi kapsul yodium.

Upacara pengukuhan di Gedung Graha Widya Wisuda, Dramaga itu dihadiri lebih 1.500 undangan dan di antaranya Ketua Bappenas, Saleh Affif, Wakil Ketua Bappenas, BS Mulyana, Menteri Kesehatan, Adyatma, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Sulastini Murpratomo dan mantan Ketua Bappenas, Widjono Nitiasastro (Kht/473H).

VI. MENJELASKAN MASALAH GIZI DAN PEMECAHANNYA

Masalah Kelaparan Tersembunyi

Oleh : Soekirman

Kompas, 21 Oktober 2020

Berbagai publikasi lembaga internasional meramalkan, akhir 2020, pandemi Covid-19 akan menyebabkan lebih banyak penduduk negara miskin dan berkembang terancam kelaparan (*hunger*) serta kelaparan tersembunyi (*hidden hunger*). Kelaparan pertama karena kurang makan sumber kalori. Kelaparan kedua karena kurang zat gizi mikro (*vitamin dan mineral*).

Kita bersyukur, kelaparan pertama tak terjadi. Namun, data global menunjukkan, kelaparan yang kesalahannya cukup besar sebelum pandemi kian meningkat selama pandemi karena naiknya angka kematian akibat pandemi.

Tahun 2017, di Amerika Serikat ditemukan teknologi pertanian pangan yang disebut biofortifikasi. Teknologi baru memberikan harapan adanya produk pertanian pangan yang dapat ikut membantu mengatasi kelaparan tersembunyi yang terkait dengan kemiskinan dan kurang gizi kronis, stunting.

Hingga 1960-an, setiap musim kering panjang, di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat banyak penduduk desa menderita kelaparan (*hunger oedem/HO*) serta anak-anak menderita gizi buruk karena kelaparan dan kurang gizi.

Salah satu masalah besar di awal pemerintahan Orde Baru pada 1960-an adalah masalah kekurangan pangan, kelaparan, dan kurang gizi. Pada masa itu, dunia pertanian pangan bangkit dengan adanya Revolusi Hijau yang diciptakan peraih Nobel

Perdamaian 1970, Norman Borlaug. Revolusi Hijau mengubah wajah banyak negara Asia, termasuk Indonesia, dari kekurangan pangan menjadi kecukupan pangan, terutama beras, tetapi meninggalkan masalah baru, yaitu kekurangan gizi dan kelaparan tersembunyi.

Kurang gizi bukan kurang kalori dan protein yang dikenal selama ini, tetapi kekurangan gizi kronis (waktu lama) kurang vitamin dan mineral, terutama vitamin A, yodium, zat besi (Fe), dan zat seng (Zn). Mereka tidak lapar seperti kurang kalori dan protein karena makan cukup karbohidrat serta sedikit protein dari makanan pokok beras.

Biofortifikasi

Ada dua jenis biofortifikasi. Pertama, biofortifikasi teknologi pemuliaan tanaman yang bertujuan meningkatkan kadar zat gizi mikro beberapa bibit unggul varietas padi-padian atau tanaman pangan lain. Kedua, biofortifikasi dengan tujuan sama, tetapi menggunakan teknologi rekayasa genetika (*Genetic Modified Organism/GMO*). Salah satu contoh produk GMO adalah beras kuning yang memiliki kadar vitamin A yang tinggi, terkenal pada 1984.

Belum semua negara menerima produk pangan GMO karena berbagai masalah. Adapun fortifikasi yang kita kenal selama ini tujuannya sama dengan biofortifikasi, tetapi tak terkait langsung dengan petani dan teknologi pertanian.

Dr. Howarth E Bouis, seorang pakar ekonomi pertanian, adalah penggagas konsep biofortifikasi dengan teknologi pemuliaan tanaman. Pada 2003, Bouis menjadi direktur lembaga riset pertanian HarvestPlus, bagian dari IFPRI (*International Food Policy Research Institute*) di Washington.

Bekerja sama dengan beberapa lembaga riset pertanian internasional, diantaranya IRRI (*International Rice Research Institute*) di Los Banos, Filipina, Bouis memulai risetnya mencari

bibit unggul varietas padi yang tinggi kadar zat besinya, zat seng, dan vitamin A. Tiga zat gizi mikro yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan, tetapi tak terjangkau kebanyakan rumah tangga miskin.

Menurut Bouis, biofortifikasi adalah bentuk “revolusi gizi”, kekurangan Revolusi Hijau yang fokus pada karbohidrat sumber kalori. Tahun 2003-2016, HarvestPlus telah menciptakan 150 varietas dari 12 tanaman pangan dengan biofortifikasi. Varietas itu telah diuji kelayakan teknis bibit unggul oleh pakar pemuliaan tanaman di 30 negara berkembang. Demikian juga uji efektivitas dan dampak pada kesehatan dilakukan oleh suatu tim WHO dan FAO.

Balai Besar Penelitian Padi (BBPadi) Balitbang Pertanian Kementerian Pertanian RI sejak 1990-an telah merintis biofortifikasi riset bekerja sama dengan IIRI Filipina. Pada 2008, sudah melepas varietas padi unggul biofortifikasi yang diberi nama IR Inpari 5 Merawu dengan kadar Fe tinggi. Namun, karena masih ada masalah teknis, varietas ini belum dilepas.

Tahun 2019 dilepas IR NutriZinc dengan kandungan Zn yang tinggi. Karena secara kimiawi Zn dan Fe saling terkait, varietas IR NutriZinc juga mengandung Fe. BBPadi Asia tahun 2020 akan ditanam di 10.000 hektar sawah di sembilan provinsi (Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Gorontalo, NTB, Maluku, dan Papua). Luas tanam akan meningkat menjadi 50.000 hektar pada 2021 dan 200.000 hektar pada 2024. BB Padi Balitbang Pertanian waktu melepas IR NutriZinc menyatakan, IR NutriZinc, produk biofortifikasi, adalah salah satu solusi stunting atau tengkes di Indonesia (A Suryana - komunikasi pribadi dan dari BBPadi Media, 10/6/2020).

Salah satu upaya pencegahan tengkes adalah dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok 1.000 hari pertama kehidupan. Mereka tidak hanya butuh makanan yang cukup kalori dan protein, tetapi juga vitamin dan mineral yang

sulit dipenuhi kebanyakan rumah tangga miskin. Biofortifikasi di Indonesia telah menciptakan beras NutriZinc yang mengandung Fe dan Zn. Berarti, beras sembilan daerah target BBPadi berpotensi menghilangkan kelaparan tersembunyi dan mencegah tengkes.

Program fortifikasi pangan, termasuk biofortifikasi, memerlukan kerja sama lintas sektor dan lintas lembaga pemerintah serta masyarakat, termasuk perguruan tinggi, dalam bentuk kemitraan publik-swasta. Sebagai contoh, untuk melihat dampak beras NutriZinc terhadap tengkes diperlukan studi yang disebut uji efektif. Hal itu dapat dilakukan bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di daerah yang terlatih dengan uji fortifikasi.

Masalah Kekurangan Vitamin A : Meluncurkan Proyek Fortifikasi Vitamin A pada Minyak Goreng

Launching of the Vitamin A Project

Oleh : Soekirman

KFI NewsLetter Februari 2011

On the occasion of the "National Nutrition Day" or "Hari Gizi Nasional", the Ministry of Health and GAIN launched the Cooking Oil Fortification Project, which is jointly implemented with KFI and the Indonesian Nutrition Association (PERSAGI). The project will comprise five components: Production and Distribution, Quality Assurance, Social Marketing, Monitoring and Evaluation, as well as Project Management. The ceremony was attended by the Minister of Health, Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih MPH Dr.PH, the Minister of the National Planning and Development Agency (BAPPENAS), Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo MA, the Vice Minister of Agriculture, Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi MS, the Vice Minister of Industry, Dr. Ir. Alex Retraubun Msc, and the Executive Director of GAIN, Dr. Marc van Ameringen, as well as representatives of UN Agencies, International NGOs and the cooking oil industry



Press conference attended by Minister of Health, Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih MPH Dr.PH, the Minister of the BAPPENAS, Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo MA, the Vice Minister of Agriculture, Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi MS, the Vice Minister of Industry, Dr. Ir. Alex Retraubun Msc, and the Executive Director of GAIN, Dr. Marc van Ameringen dan Prof. (Em) Soekirman

On this occasion, the Ministry of Health launched the initiative on vitamin A fortification of cooking oil, along with several publications on health and nutrition, including the new Nutrition Guideline for Indonesia "Gizi Seimbang", which was written by a group of Nutrition Experts from the Danone Institute of Nutrition, Indonesia, lead by Prof. Soekirman. A new product, a mixed micronutrition called Taburia (sprinkle), was also formally introduced.



Prof (Em) Soekirman, Marc Van Ameringen (GAIN), and Ministry of Health, Dr. dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH)

Congratulatory remarks were offered by various ministers (one of them is Ministry of Health, Dr. dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH), Marc Van Ameringen (GAIN) and all involved parties who have joined hands for the promotion of vitamin A fortification. Prof. Soekirman was appreciated at this day for his great efforts in promoting fortification and raising awareness about micronutrient deficiency, including vitamin A deficiency in both, public and policy, and for having paved the way to overcome this deficiency in Indonesia.

VII. MEMPERJUANGKAN PEMECAHAN MASALAH GIZI

Soekirman Berjuang Memenuhi Gizi Rakyat

Kompas, 14 November 2016



Soekirman adalah Guru Besar Emeritus Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Jawa Barat. Berusia 80 tahun, lelaki itu bersemangat dan

aktif bekerja. Itu terlihat saat Kompas mengunjunginya di sebuah rumah di Jakarta Selatan, pertengahan Oktober lalu.

Dilantai dua rumah itu, puluhan bungkus minyak goreng rupa-rupa merek berdiri di meja. Dua perempuan mengambil sedikit minyak dari setiap bungkus dengan suntikan, dan seorang perempuan lain mencatat di komputer jinjing. Mereka menguji ada tidaknya kandungan vitamin A pada minyak goreng itu.

Penambahan vitamin A pada minyak goreng adalah salah satu bentuk fortifikasi pangan yang diadvokasi Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia (KFI). Rumah itu adalah kediamannya sekaligus kantor yayasan. “Maaf, maaf, berantakan,” ucapnya terkait kemasan minyak goreng yang memenuhi mejanya.

Soekirman mendirikan KFI pada 2002, 16 tahun setelah pensiun dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Itu ia lakukan demi melanjutkan 50 tahun perjuangannya di bidang gizi. Sejak masih staf biasa di Bappenas, dia telah memikat Ketua Bappenas saat itu, Widjojo Nitisastro, untuk memasukkan gizi dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) III-VI (1983-1999).

Bagi Soekirman, Slogan empat sehat lima sempurna (4S5S) sudah tidak relevan lagi karena belum tentu mencukupi jumlah zat gizi makro dan mikro yang dibutuhkan tubuh. Tubuh perlu gizi seimbang antara asupan gizi serta faktor lain, seperti keanekaragaman jenis pangan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Selaras dengan itu, Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang.

Soekirman gemas pada fortifikasi minyak goreng kelapa sawit dengan vitamin A yang tidak kunjung diwajibkan pemerintah. Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) fortifikasi minyak goreng sawit dengan vitamin A sedianya wajib mulai Maret 2015, tetapi diundur Maret 2016. “Berkat” deregulasi dalam paket kebijakan ekonomi tahap I, kewajiban penerapan kembali diundur lagi, kali ini menjadi Desember 2018.

Fortifikasi perlu untuk membantu memenuhi gizi rakyat miskin. Mereka biasanya membeli beras, garam, mi instan, dan minyak goreng curah. Mereka kurang memperhatikan kecukupan gizi untuk kesehatan jiwa dan raga, ini disebut “kelaparan tak kentara”.

Untuk mengatasinya, pemerintahan perlu menitipkan zat-zat gizi tambahan pada proses produksi bahan pangan yang mampu dibeli warga miskin. Fortifikasi vitamin A pada minyak goreng, misalnya, hanya butuh Rp 50 per liter.

Soekirman bersyukur, fortifikasi beberapa bahan pangan sudah berjalan, seperti iodine pada garam, serta zat besi, zat seng, asam folat, vitamin B1, dan vitamin B2 pada tepung terigu (bahan baku mi).

Ayah Soekirman adalah seorang buruh tani yang meninggal ketika Soekirman berusia 5 tahun. Ibunya berjualan kue untuk menyambung hidup. Meski buta huruf, sang ibu mendorong anaknya sekolah. “Jika tidak pergi sekolah, saya tidak boleh ikut

bantu Ibu berjualan,” kenangannya.

Soekirman remaja bercita-cita menjadi dokter. Lulus SMA tahun 1956, ia mencari beasiswa dengan mendaftar menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Namun, ia gagal karena terjatuh saat ujian lompat dari truk yang berjalan.

Soekirman lantas masuk Sekolah Ahli Diet (sekarang Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II) di Jakarta dan kemudian pindah ke Bogor. Ia mendapat beasiswa. Lulus tahun 1960, ia ditugaskan sebagai ahli gizi di Aceh.

Provinsi itu jadi kawah candradimuka yang menempanya. Agar pengetahuan gizi menyebar luas dan cepat, ia menulis artikel di satu-satunya koran di Banda Aceh, Pantha Tjita. Tulisan-tulisan itu membuat Dinas Penerangan (Radio Republik Indonesia) di Aceh meminta Soekirman berbicara dalam siaran setiap pekan.

Di Aceh pula, ia menulis buku pertamanya tahun 1962, Dasar Pokok Ilmu Gizi. Karya ini menjadi buku ajar ilmu gizi untuk sekolah keperawatan dan kebidanan di Badan Aceh dan Medan, Sumatera Utara.

Tahun 1965, Soekirman ditarik ke Jakarta untuk mengajar di Akademik Gizi, sambil meneruskan kuliah untuk gelar sarjana di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI). Ia juga terlibat sebagai penelitian junior pada riset tentang dampak kurang anemia pada pekerja, kerja sama Massachusetts Institute of Technology (MIT) Amerika Serikat dengan Depkes dan Akademi Gizi.

Soekirman lantas mendapat beasiswa studi magister gizi pembangunan di Universitas Cornell, Amerika Serikat, tahun 1973 – 1974. Tesisnya, *“Prioritas in Dealing with Nutrition Problem in Indonesia”*, diterbitkan dalam bentuk *Monograph Series*. Karya itu dibaca pejabat Bappenas. Sejak 1975, ia diangkat menjadi staf perencanaan Bappenas yang dipimpin Widjojo Nitisastro.

Soekirman kembali ke Cornell untuk meraih gelar doktor tahun 1983. Sembari studi, ia diangkat, sebagai Kepala Bidang Kesehatan dan Gizi Bappenas. Kata gizi di jabatan ini merupakan desakan dari Soekirman. Pada 1998, ia menjadi Deputi Bidang Sosial Budaya dan tahun 1993 – 1997 sebagai Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Meski menjadi pejabat, Soekirman termasuk keras kepala demi membela kebijakan pemenuhan gizi yang tepat. Suatu ketika, saat Bappenas dipimpin Ginandjar Kartasasmita, Persatuan Istri Menteri mendorong susu masuk program makanan anak sekolah. Presiden Soeharto juga memerintahkan hal itu kepada Ginandjar.

Ginandjar minta Soekirman dan tim mengkaji program itu. Soekirman menegaskan, susu tidak realitis dan tidak mutlak ada dalam program pemenuhan gizi. Harga susu mahal dan tergantung impor. Susu malah bisa memicu diare jika kebersihan air dan lingkungan tidak terjamin. Selain itu, susu perlu yang rendah laktosa guna mencegah diare akibat intoleransi laktosa.

Soekirman merekomendasikan pangan lokal untuk makanan anak sekolah. Ia dimusuhi banyak pihak. "Kami profesional. Kalau karena ini saya dipecat, pecat saja," ujarnya. Ternyata, Soeharto menyetujui pandangannya.

Pengalaman itu kian memantapkan hati Soekirman untuk terus berjuang di jalan pemenuhan gizi sampai sekarang ini.

Fighting the fight for nutrition as key to economic and social development

Cornell University Nutrition Newsletter, May 2003

Ask Dr. Soekirman what in his long and distinguished career with the Indonesian Ministry of National Development Planning, gives him the most pride, and he goes back to where his government service began: in the remote province of Aceh, home to four million people. In 1960, fresh out of college, he was posted there as a junior community nutrition fieldworker.

"I started from zero. In those days nobody knew what nutrition was or how important it is to health," he says. "By the time I left five years later, a nutrition section had been established in the local health department." Today, Indonesia's 204 million people scattered among 5 large islands, 30 smaller ones, and more than 17,500 others throughout the Indonesian Ocean--all are served by government sponsored nutrition programs. Consequently, the prevalence of protein energy malnutrition and micronutrient, iron, and iodine deficiencies has declined significantly. Soekirman is now a professor of nutrition in the Faculty of Agriculture at Bogor Agriculture University (IPB) in Bogor, Indonesia.

"Of all the division's alumni whom I have known in the past 25 years, Soekirman has, through his leadership positions in government, elevated the nutritional status of the greatest number of people," says DNS director Jere Haas. "In his 30 year career, Soekirman has been outstandingly successful in creating nationwide nutrition policy because he knows from experience the types of local programs that really work and how to mobilize resources to address the most important public health problems."

He never swayed from his conviction that nutrition was a science that could be applied to benefit the nation. Soekirman says he learned this at Cornell. "I always think in my mind that I have to do my best because I am a Cornellian," he explains.

"That's always been my philosophy, thank God, throughout my whole career. This belief has helped me succeed in fighting for nutrition."

*It has never been easy. The hardest time of his life, he says, was when he returned to Jakarta from Cornell to assume a staff position in the Bureau of Health and Nutrition in the Indonesian Ministry of National Development Planning (BAPPENAS). Soekirman's thesis, *Priorities in Dealing with Nutrition Problems in Indonesia*, had been published as a monograph by the division, yet he met with nothing but resistance, he explains.*

"Economists are very skeptical of nutrition because it's not mathematical, not quantifiable," says Soekirman of his colleagues in BAPPENAS who were, to a man, economists. If I had not had self-confidence and knowledge in my field," he adds, "I would have been defeated in selling the importance of nutrition."

Although Soekirman had received a bachelor of science degree in nutrition at the Academy of Nutrition, Indonesia, it was during his M.P.S. program at Cornell, he says, that he learned the key to success: recognize nutrition as central to a country's economic and social development. Instead of concentrating solely on nutrition in his master's (and later Ph.D.) program, Soekirman's faculty adviser Michael Latham, professor of international nutritional sciences, urged him to take a broad range of courses in all areas pertaining to international development.

"Because of this approach, when I returned, I knew how to talk with economists, how to use their language and their terminology to persuade them that nutrition can be incorporated into development," Soekirman says. "Eventually, the politicians listened to me and believed me, too."

He was so successful that he spent the next 15 years rising through the ranks of BAPPENAS, until he retired in 1996 as deputy minister for human development, overseeing departments

responsible for all of the country's social and cultural affairs and planning-everything from health and the environment to education and social affairs.

In 1998, the Indonesian government ceased to dominate, nutrition programming and began inviting food industries, non governmental organizations, and professional groups to form partnerships joining the public and private sectors Soekirman founded one of the most influential of these, the Indonesian Fortification Coalition, with the goal of promoting an expansion of food fortification programs. He currently holds the post of director of the coalitions board of advisers. He is also the chairman of the expert working group of the National Council of Food Security, a council chaired by the Indonesian president and minister of Agriculture.

Since the 1980s, Soekirman has lectured on nutrition at IPB. He retired from BAPPENAS to full time teaching in 1996. In addition, he is the director of the university's Center for Food and Nutrition Policy Studies, which strives, he says, to become "a leading research center in providing data and information as well as a conceptual framework on food and nutrition for policy, planning, and program purposes as part of national effort to achieve food and nutrition security."

Although Soekirman received a Bachelor of Science in nutrition at the Academy of Nutrition, Indonesia it was during his M.P.S. program at Cornell, he says, that he learned the key to success: recognize nutrition as central to economic and social development.

The center conducts and reviews studies in the field of food and nutrition policy and programming; provides information on food consumption behavior and food marketing strategies as the basis of agribusiness and food industry development; conducts training in policy and program analysis on food and nutrition; and provides data on food and nutrition for education, business, and

the formulation of policy and programs.

Recently, Soekirman founded the Indonesian Institute of Nutrition. Soon to be up and running, the institute will focus on research in biomolecular nutrition.

Soekirman's efforts have not been confined to serving only the people of the fourth largest country in the world. From early in his career, he has shared with the international community his expertise about how to introduce nutrition planning in developing countries. He has served as a member of the International Nutrition Planners Forum (sponsored by the US. Agency for International Development), the advisory group of the United Nations Sub-Committee on Nutrition, and the scientific board of directors of the International Life Sciences Institutes in South-east Asia, among others. In addition, he continues to be a highly sought speaker at international conferences and consultative groups sponsored by various international agencies such as the Micronutrient Initiative, UNICEF, and the World Health Organization.

"Although I have been involved in so many belds of development, I am still a nutritionist and proud of it," Soekirman says. When asked what he would most want other DNS alumni to know about his life, he replies:

The career of a nutritionist is full of fighting. You have to have a very high spirit, be consistent and persistent, and everywhere, everywhere you have to fight. fight for nutrition." The career of a nutritionist is full of fighting. You have to have a very high spirit, be consistent and persistent, and every-where, you have to fight, fight for nutrition.

VIII. BIOGRAFI

Prof. Soekirman lahir di desa Baureno, Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia tanggal 2 Agustus 1936. Pendidikan terakhir PhD (1983) dan Master of Professional Studies (1973) bidang International Nutrition, Cornell University, New York. Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM-1969), FKM-UI, dan Bachelor of Science (BSc-1960) Akademi Pendidikan Nutrisionis dan Ahli Diet, Kementerian Kesehatan, Bogor.

Jabatan sekarang Ketua Dewan Pembina Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia (KFI), Guru Besar Emeritus, Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB, Bogor. Pada Tahun 2010–2023, Prof. Dr. Soekirman merupakan Guru Besar, FK – Universitas Kristen Indonesia, Jakarta. Dosen Tamu Prodi Gizi IKM-UGM Yogyakarta, Penguji S3 Prodi Gizi, FKM, UNHAS Makassar.

Penelitian pertama tentang dampak anemia terhadap produktivitas penadap karet di Sukabumi tahun 1972. Kegiatan Riset terakhir sebagai Pengawas dan Penasihat Studi Efektivitas Fortifikasi Minyak Goreng Sawit dengan Vitamin A di Jawa Barat (2011–2014). Kerjasama KFI-GAIN-KemKes. Hasilnya sudah dipublikasi di beberapa jurnal Internasional dan dipresentasikan di Forum Internasional di beberapa negara. Terakhir, Pengawas dan Penasihat Studi Efikasi Fortifikasi Tepung Terigu Formula Baru (2016–2017) kerjasama dengan MI (*Micronutrient Initiative*) Canada.

Kegiatan lain: Penasihat *Team Scaling Up Nutrition* (SUN) dan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), BAPPENAS (2012–sekarang). Menghadiri pertemuan-pertemuan ilmiah internasional dan nasional. Terakhir di *International Congress of Nutrition* di Granada Spanyol (2013/2014), dan *International National Workshop on Food Fortification*, Jakarta (2015). Masih aktif menulis dan menghadiri pertemuan-pertemuan kebijakan dan

program kesehatan masyarakat dan perbaikan gizi, baik sebagai pembicara, pembahas, maupun peserta biasa.

Pengalaman Kerja sebagai Tenaga Kesehatan Masyarakat

Tahun 1961-1965 sebagai tenaga kesehatan masyarakat dan gizi pertama di Provinsi Daerah Istimewa Aceh di Banda Aceh. Memperkenalkan konsep kesehatan masyarakat dan gizi sebagai upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan melalui pendidikan kesehatan dan pendidikan gizi di BKIA (Balai Kesehatan Ibu dan Anak) karena PUSKESMAS waktu itu belum ada. Penekanan pesan pada masalah air bersih, sanitasi dan gizi, dan kesehatan ibu dan anak.

Menggalang kerja sama antar instansi dimulai dengan pemerintah daerah provinsi Aceh (kantor gubernur) dan Kabupaten Aceh Besar dan kotamadya Kutaraja (Banda Aceh), dengan Dinas Penerangan (RRI) sebagai satu-satunya media massa yang ada waktu itu (belum ada koran secara teratur), Dinas Pendidikan, dan Dinas Pertanian (untuk program pekarangan, kebun sekolah, dll.). Tiap hari besar nasional menyelenggarakan pameran kesehatan masyarakat dan gizi bersama instansi-instansi terkait. Dengan surat tugas dan dana dari SekDa provinsi Aceh ditugaskan keliling kabupaten untuk memberikan pendidikan tentang gizi, kesehatan lingkungan dan KIA.

Dan melakukan pelatihan kepada organisasi-oraganisasi wanita Banda Aceh. Memberi kuliah pada Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) di Universitas Darusalam yang waktu itu baru saja dibuka. Tugas rutin mengajar di Sekolah Perawat dan Kebidanan RSU Banda Aceh.

Tahun 1965-1975, Prof. Soekirman mengikuti pendidikan lanjutan *Training Public Health Nutrition* 6 bulan 1967 di Columbia

University, New York; FKM-UI (1968-1969) dan pendidikan Master di Cornell University, New York (1973/1974). Dosen pada Akademi Gizi, DepKes Jakarta. Selama periode 1975 - 1996, beliau bekerja di BAPPENAS mulai sebagai Staf Perencana Program Kesehatan Nasional dalam Repelita, kemudian diangkat sebagai Kepala Biro Kesehatan dan Gizi (sekarang Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat), dan terakhir sampai pensiun (1988-1996) sebagai Deputy Menteri BAPPENAS bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia (sekarang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan). Pada tahun 1991 beliau diangkat sebagai Guru Besar Luar Biasa IPB, dan tetap menjalankan tugas di BAPPENAS sampai 1996 (pensiun).

Selain itu, di tahun 1996/1997 Prof. Soekirman mendapat tugas kehormatan sebagai *Senior Research Fellow* di Departemen Human Resources, Bank Dunia, Washington dan kembali ke kampus IPB sebagai guru besar penuh dari tahun 1997 sampai 2006 pensiun, selanjutnya menjadi Guru Besar Emeritus sampai sekarang.

Di tahun 2002 mendirikan dan memimpin Yayasan KFI, suatu yayasan non pemerintah, independen, dan nirlaba, di bidang pengembangan Fortifikasi Pangan terutama untuk orang miskin, menjalin kemitraan dengan Kementerian Kesehatan, KemPerindustrian, KemPerdagangan, IPB, BPOM, GAIN (Geneva), GIZ (Jerman), NI (Canada), dan UNICEF. Sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina KFI.

Tahun 2007-2014 mendirikan dan mengetuai Institut Gizi Danone Indonesia. Tahun 2010-2015 berhasil melaksanakan proyek Fortifikasi Vitamin A pada Minyak Goreng Sawit, dengan pendekatan kemitraan pemerintah swasta perguruan tinggi dan masyarakat (PPP). Pada tahun 2015, mendirikan Institut Gizi Indonesia (IGI). Sampai sekarang masih menjadi Ketua Dewan Pembina KFI, aktif menulis dan memberikan kuliah-seminar online.

Kegiatan di Forum Internasional

Organisasi Internasional

- *Chairman, Expert Committee on Vitamin A, Helen Keller International (HKI) Indonesia, Jakarta (2004-2006)*
- *Member of Board of Director, ICCIDD (2000 - 2003)*
- *Member of Board of Scientific Director, International Life Sciences Institute (ILSI)-South East Asia, Singapore (1997-2005)*
- *Honorary Member of the Advisory Group on Nutrition (AGN), United Nations 'Administrative Coordinating Committee / Sub-Committee on Nutrition (UN-SCC/SCN), Geneva (1990 - 2000)*
- *Active member of the Advisory Group on Nutrition (AGN), United Nations Administrative Coordinating Committee / Sub-Committee On Nutrition, Washington / Geneva (1985-1990)*
- *Chairman, Committee on Urban Nutrition, International Union of Nutritional Sciences (IUNS), Amsterdam (1985-1989)*
- *Member, Vitamin A Task Force on Operation, International Vitamin A Consultative Group (IVACG), Washington (1986-1988)*
- *Member, Sub-Committee on Nutrition Education, International Union of Nutritional Sciences (1975 - 1978)*
- *Member, International Nutrition Planner's Forum USAID Washington, (1975-1979)*
- *Member, Federation of Asian Nutrition Sciences (FANS) (1983-1986.)*
- *Advokasi dan Konferensi Internasional*
- *International Meeting of Flour Fortification Initiative (FFI), Public Nutrition Development Center, Gov. of China, Beijing 10-11 May, 2006*
- *International Meeting of FF and National Institute of Nutrition, Gov. of Vietnam, Hanoi, 16 May 2006*
- *33rd Annual Meeting UN-Standing Committee on Nutrition*

(SCN) 11-16 March 2006, Geneva

- *ILSI Japan and Southeast Asia's Meeting on Fortification, Manila, 29-31 October 2004*
- *Annual Meeting UN-Standing Committee on Nutrition (SCN) 22 - 26 March 2004, UN Building New York*
- *National Meeting for Xth Five -Year Development Plan, People's Republic of China, Public Nutrition and Development Planning=PNDP), Beijing with Nevin Scrimshaw, International Nutrition Foundation, Boston, USA, December 26 - 29,2003.*
- *Workshop GAIN (Global Alliance on Improving Nutrition), Geneva, 29 June - 2 July 2003*
- *ILSI (International Life Sciences Institute) South-east Asia Board of Directors Meeting, Singapore, 1-2 times/year since 1998*
- *IXth Asian Nutrition Congress, New Delhi, 23-27 February 2003*
World Wheat Millers' Meeting for Universal Salt Iodization, Mauritius (October 2002)
- *Scientific Symposium on Food Security Measurement, FAO, Rome, June 26-28, 2002*
- *Regional Meeting on Nutrition Planners' Training, Nutrition Research Institute, Hanoi, Vietnam (April 2002)*
- *XVIIth International Union of Nutrition Sciences (IUNS) Congress, Vienna, Austria (August 2001)*
- *WHO/SEARO Regional Meeting on Infant and Child Feeding Strategy, Mahidol University, Bangkok: Deliver Keynote Address (March 2001)*
- *International Union of Food Sciences and Technology Congress (IUFOST) presenting paper on Food and Nutrition Situation in Indonesia During and After Economic Crisis. Seoul, Korea, April 23, 2001.*
- *Asian Congress of Nutrition, Seoul-South Korea, August 29-Sept.2,1999*
- *UN-ACC/Sub Committee on Nutrition, Symposium on the Right to Food, Plaza Des Nations, Geneva, 12-16 April 1999.*

- Conference on "Urgent Call to Defend Children Against Economic Crisis" Mahidol University, Bangkok 8-9 January 1999
- International Conference on Early Child Development, ILSI, Kuala Lumpur, November 2-6, 1998
- Asian Conference on Nutritional Guidelines and Recommended Dietary Allowances, Kuala Lumpur, July 20-25, 1998
- WHO Senior Advisory Committee Meeting on Tuberculosis, London, March 16-21, 1998.
- Annual Board Meeting, International Life Sciences Institute (ILSI), Tampa, Florida, USA, January 15 - 24, 1998.
- Annual Board Meeting, ILSI-South East Asia, Singapore, November 1997
- US-Expert Meeting on Iron Deficiency, US-National Academic of Sciences, Washington DC, December 1996 (honorary invitee).
- Micronutrient Meeting, USAID/OMNI, Washington DC, September, 1996
- The World Conference on Co-op Education, Kingston, Jamaica, August 1995 (Chief Delegate, GOI)
- Pacific-Asia Conference on "People Centered Cooperation", organized by Pacific-Asia Society (PAS), Seoul, South Korea, November 22-24, 1994 (Keynote speaker).
- International Conference on "Overcoming Hunger", organized by Mahidol University, Bangkok and Brown University USA, Bangkok, November 2-6, 1994. (paper discussant).
- Asia-Pacific Expert Meeting on Social Development, Organized by Dep. of Foreign Affairs, Bandung, Indonesia July 25-28, 1994 (presenting paper).
- IFPRI Ending Malnutrition Symposium, Washington DC, 28-29 March 1994 (presenting paper).
- Conference of Managing Oil Boom: Lesson for Colombia from the Indonesian Experience, 24-25 March 1994, Bogota, Colombia. (discussant)
- UN-Preparatory Conference for Summit Meeting on Social

Development, New York, August 1994 (Chief Delegate, GOI)

- *Summit Meeting on Education for All of 9-Big Developing Countries, New Delhi, December 15- 16, 1993 (Member Delegate, GOI)*
- *Preparation Conference on UN-International Conference on Nutrition, WHO-FAO, Geneva, 1992 (Chief delegate, GOI).*
- *International Congress on Nutrition in Adelaide (Australia, 1993). (presenting paper)*
- *Annual Executive Board Meeting of UNICEF, at United Nations, New York, in 1986 and 1987 (Member Delegate) and in 1989 (Chief Delegate).*
- *Annual Meeting of UN-ACC/SCN (UN-Administrative Coordinating Committee/Sub-Committee on Nutrition) in Washington/ Geneva (1985-1990)*
- *Chief, GOI Delegation Mission to the World Bank (Washington, 1989,1990,1992, 1993, 1995), and as member in 1985, 1986, and to the ADB (Manila) in 1985.*
- *Asian Minister of Health Meeting on Health for All, Colombo, Sri Lanka, 1984 (Member Delegate)*
- *International Congress of Nutrition in Osaka (Japan - 1975), Rio (Brazil-1978), Brighton (England-1985).*
- *Asian Congress of Nutrition, Bangkok (1983).*
- *Bellagio (Italy) experts meeting on Food and Nutrition Policy, Rockefeller Foundation, 1975.*

IX. KESIMPULAN, PENUTUP, DAN HARAPAN

Buku adalah jendela dunia. Memang sejatinya bukan hanya sekumpulan kertas penuh tulisan tanpa makna. Demikian juga “Buku Pengabdian Prof. (Em) Soekirman Sebagai Seorang Ahli Gizi Sejak Tahun 1961 sampai Sekarang” ini merupakan himpunan dari begitu banyak pemikiran beliau tentang Gizi yang dituangkan dalam karya tulis dan tersebar di berbagai media cetak.

Kata “Pengabdian” yang digunakan pada judul buku ini, bukan tidak mungkin mengundang pertanyaan dalam bentuk seperti apakah pengabdian itu diwujudkan. Sebagai jawabannya hal itu dipaparkan dalam bentuk kerja nyata selama Prof. Soekirman meniti karier sebagai seorang Ahli Gizi.

Jika dipetik intisari dari semua tulisan dalam buku ini, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, bahwa upaya memasyarakatkan gizi dan menggizi masyarakat memang tidak mudah dan penuh tantangan yang menghadang. Kedua, seluruh rangkaian tulisan yang disuratkan jika dicermati, tersirat makna yang dalam. Makna ini menggambarkan semangat Prof. (Em) Soekirman untuk mencerahkan wawasan dan pemahaman banyak pihak tentang ilmu Gizi dan penerapannya di berbagai bidang. Hal ini lebih ditujukan untuk menangkal pemahaman sempit tentang peran Ahli Gizi yang banyak hanya dikaitkan dengan pelayanan makanan di rumah sakit dan bidang kuliner atau tataboga pada umumnya. Ketiga, banyak gagasan tentang pentingnya ilmu gizi dan penerapannya terkait dengan pembangunan nasional yang ditulis Prof. (Em) Soekirman pada masa lalu, senyatanya masih banyak yang relevan dengan situasi dan kondisi masa kini di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Keempat, ada hal yang perlu diteladani yaitu kegigihan untuk tetap membela dan mendorong gizi sebagai salah satu faktor penting dalam membangun kualitas

sumber daya manusia sebagai bagian dalam pembangunan nasional. Kelima, banyak pelajaran berharga yang dapat dijadikan motivasi bagi insan gizi generasi masa kini untuk selalu mencermati perkembangan ilmu gizi serta berkiprah menerapkannya melalui berbagai bidang. Biarlah kata-kata Prof. (Em) Soekirman yang pernah disampaikan kepada redaksi News Letter Cornell University (2003) “...*The career of Nutritionist is full of fighting. You have to have high spirit, be consistent and persistent and everywhere you have to fight, fight for nutrition*”. Menjadi tonggak pengingat bagi para Ahli Gizi di negeri ini. Pengabdian beliau dilakukan melalui perjuangan yang keras. Bahkan Kompas pun menulis bahwa “Soekirman berjuang untuk memenuhi gizi rakyat”. Perjuangannya tidak dengan senjata, tetapi dengan membaca dan menulis. Prof. (Em) Soekirman, sebagaimana Napoleon Boneparte meyakini bahwa seorang penulis memiliki kekuatan dan ketajaman kata-kata. Apa yang dituliskan dapat mengubah keadaan. Hal ini terbukti kebijakan gizi dalam konsep pembangunan nasional di era Repelita III, lahir dari buah pikiran beliau yang dituliskannya dan dibaca oleh pimpinan pemegang kebijakan dan pengambil keputusan sehingga gizi menjadi program prioritas.

Prof. (Em) Soekirman memiliki kemauan keras untuk menulis dan kemudian mempraktikkannya. Keputusan yang diambil dalam hidupnya, ia akan tetap menulis, menulis dan menulis sampai akhir hayat dikandung badan. Dari buku ini kita dapat belajar bahwa ilmu gizi dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat harus ditulis dan dibaca oleh banyak orang, termasuk para pengambil kebijakan. Karena itu “membacalah dan menuliskalah serta berani berjuang” adalah amanah yang dipesankan kepada generasi muda gizi, termasuk mereka yang mau mendalami ilmu gizi dan mengaplikasikannya untuk pembangunan bangsa.

Akhirnya jangan lupa Prof (Em) Soekirman senang menulis sejarah. Khususnya sejarah yang berkaitan dengan ilmu gizi. Di

buku ini kita temukan sejarah asal kata gizi, sejarah gizi seimbang dan lain-lain. Prof (Em) Soekirman sering mengutip kata-kata emas tentang pentingnya sejarah. Kata Carl Sagan: *"you have to know the past to understand the present"*, dan kata Martin Luther Jr. *"We are not makers of history. We are made by history....(of nutrition)"*.

Semoga buku ini menjadi jendela yang terbuka lebar bagi para pembacanya, membawa pencerahan untuk memahami dan menghayati arti penting ilmu gizi dan penerapannya.

X. TENTANG PERSAGI, KFI, DAN AIPVOGI

Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)

Persatuan Ahli Gizi Indonesia (*Indonesian Nutritionist and Dietitian Association*). PERSAGI adalah satu-satunya organisasi profesi yang menghimpun Ahli Gizi (nutrisionis dan dietisien) di Indonesia dan sudah berbadan hukum (No. AHU-0000237. AH.01.08.TAHUN 2022). PERSAGI bersifat independen, nirlaba, dan dijiwai oleh Standar Profesi Ahli Gizi yang terdiri dari Standar Kompetensi Ahli Gizi dan Kode Etik Ahli Gizi.

Tenaga ahli di bidang gizi sebagai warga yang setia dari Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 menyadari dan bertanggung jawab penuh akan kewajibannya terhadap negara dan bangsa Indonesia. Kami juga berkeyakinan bahwa perbaikan gizi merupakan salah satu unsur penting dalam mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia. Tekad yang bulat untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran demi tercapainya kehidupan rakyat yang sehat, disatukan dalam satu wadah organisasi profesi Nutrisionis-Dietisien yang disebut Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau disingkat PERSAGI, dan tidak berafiliasi kepada suatu organisasi politik.

Organisasi profesi ini didirikan pada tanggal 13 Januari 1957 dengan nama semula Persatuan Ahli Nutrisionis Indonesia yang disempurnakan pada tanggal 26 Mei 1960 dan kemudian pada tanggal 20 Juli 1965 dan terakhir tanggal 19 November 1969 menjadi Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Dewan Pimpinan Pusat organisasi profesi Persatuan Ahli Gizi Indonesia ini berkedudukan di Jakarta dan terdaftar di Departemen Kesehatan Republik Indonesia sebagai organisasi profesi dengan nomor daftar 00091007.

PERSAGI pertama didirikan dan dipimpin oleh Dr. Ign. Tarwotjo, M.Sc (alm), beliau juga merupakan direktur dari Akademi Gizi pada tahun 1965-1979. Pada tahun 1969, PERSAGI mengangkat Prof. Poerwo Soedarmo dengan gelar Bapak Gizi Indonesia. PERSAGI juga memiliki pemimpin dari tokoh-tokoh yang membangun perguruan di Indonesia. Salah satunya seperti Prof. (em) Soekirman, SKM, MPS-ID, Ph.D sosok yang sangat *concern* terhadap gizi mikro dan fortifikasi, beliau mempelopori Koalisi Fortifikasi Indonesia pada tahun 2002. Beliau pernah menjabat menjadi Ketua Umum DPP PERSAGI pada periode tahun 1969 – 1976. Saat ini PERSAGI dipimpin oleh Ibu Kombes (pol) Rudatin, SST. MK, SKM, M.Si yang akan berganti masa jabatannya di tahun 2024.

Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia (KFI)

Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia, sebelumnya dikenal dengan Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI) merupakan Yayasan independen nirlaba, yang didirikan pada 7 Mei 2002 oleh Prof. Soekirman PhD, Ir. Suroso Natakusuma, MM, dan Ir. Thomas Darmawan. Tujuan pendirian KFI adalah untuk berperan aktif dalam upaya penanganan masalah kurang gizi mikro di Indonesia melalui penerapan fortifikasi pangan wajib berskala luas (LSFF).

Visi KFI adalah untuk mengadvokasi penerapan LSFF agar prevalensi kelaparan tersembunyi ditekan sehingga tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat dan derajat kesehatan, tingkat produktivitas, serta kualitas hidup masyarakat Indonesia dapat ditingkatkan.

Adapun Misi KFI meliputi :

1. Mengumpulkan, mensitesa dan mendiseminasikan pengetahuan, praktik baik yang efektif dari Fortifikasi Pangan Skala Luas berdasarkan studi-studi internal KFI maupun sumber pengetahuan dari luar KFI;
2. Melakukan advokasi kepada pengambil kebijakan di tingkat nasional dan sub-nasional di bidang perencanaan, evaluasi dan pengendalian program fortifikasi pangan wajib;
3. Memberikan dukungan teknis untuk meningkatkan aparat pemerintah, kapasitas industri, akademisi dan organisasi/ lembaga yang berminat mempromosikan fortifikasi pangan sebagai strategi untuk menanggulangi kelaparan tersembunyi dan penanggulangan kemiskinan melalui perbaikan derajat kesehatan, produktivitas kerja, dan kualitas hidup;
4. Memfasilitasi pembentukan Forum Koordinasi LSFF dan mengupayakan keberlanjutan Forum untuk memastikan

pelaksanaan program Fortifikasi Pangan wajib secara efektif mencapai tujuannya;

5. Menjadi Lembaga Kegizian (*Nutrition Institute*) yang mempunyai reputasi tinggi di tingkat nasional dan internasional dengan fokus khusus pada fortifikasi pangan skala luas.

Dalam mewujudkan misi KFI, berbagai kegiatan terus dilakukan secara berkelanjutan yang meliputi advokasi bagi pengambil kebijakan untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan fortifikasi pangan wajib, *home fortification*, *biofortifikasi* secara konsisten, serta memberikan usulan sistem monitoring dan evaluasi fortifikasi pangan wajib, dan strategi komunikasi publik. Dalam mendukung hal tersebut, KFI telah menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia dan telah diterima menjadi bagian kebijakan pembangunan jangka panjang nasional fortifikasi pangan berskala luas yang tertuang dalam draft RPJPN 2025–2045 dan diiringi turunannya dalam bentuk Rekomendasi Kebijakan Strategis Fortifikasi Pangan Nasional 2025–2045. Untuk memastikan keberlangsungan kerjasama pemerintah dan swasta (*public partner partnership*) dalam fortifikasi pangan berskala luas, KFI juga berhasil mengusulkan pembentukan Forum Koordinasi Fortifikasi Pangan Nasional yang dipimpin oleh Kementerian PPN/Bappenas dan beranggotakan berbagai kementerian dan lembaga, dunia usaha, mitra pembangunan dan LSM. Forum tersebut didukung oleh Sekretariat Forum yang dipercayakan untuk dikoordinasikan oleh KFI.

Memahami pelaksanaan kebijakan desentralisasi, KFI juga bekerjasama dengan Pemerintah Daerah terutama untuk mencapai *Universal Salt Iodization* (USI). Dalam rangka memperkuat advokasi dan komunikasi tentang fortifikasi pangan, KFI telah mengembangkan Strategi Komunikasi Nasional dan Daerah sebagai panduan untuk mengembangkan pesan-pesan advokasi dan komunikasi fortifikasi pangan. KFI juga bergerak di bidang penelitian dan bekerja sama dengan beberapa organisasi internasional seperti GAIN dalam studi fortifikasi

minyak goreng sawit sebagai dasar penetapan kebijakan fortifikasi wajib vitamin A pada minyak goreng sawit. Saat ini, KFI bekerja sama dengan Bill and Melinda Gates Foundation untuk pengembangan advokasi fortifikasi pangan skala luas. Pada bulan April 2024, KFI melaksanakan studi kandungan vitamin A pada minyak goreng sawit kemasan di Jakarta dan Surabaya yang didukung oleh Nutrition International. Dalam dua tahun terakhir para pakar KFI melakukan kajian *landscape analysis* fortifikasi beras dan analisis kesenjangan asupan at gizi mikro dalam rangka pengembangan standard kernel fortifikan beras (*Fortified Rice Kernel*) bekerjasama dengan berbagai pihak. Selain itu, KFI telah menyampaikan berberapa tulisan ilmiah pada beberapa jurnal ilmiah dan menerbitkan beberapa *Policy Brief* yang dapat diunduh pada laman www.kfindonesia.org

Organisasi KFI terdiri atas Dewan Pengawas, Dewan Pembina, Pengurus, dan Tim Pakar. Dewan Pengawas diketuai oleh Ir. Fransiscus Wilerang, anggota Dewan Pengawas adalah Ir. Thomas Dharmawan Tjokronegoro dan Dr. Drs. Henson, SH, MH. Dewan Pembina KFI diketuai Prof. Soekirman, SKM, PhD, dengan anggota Prof. Dr. Abdul Razak Thaha, M.Sc, Prof. Dr. Ir. Purwiyatno Hariyadi, M.Sc, dan Ir. Budianto Wijaya, MAppSc.

Direktur KFI adalah Dra. Nina Sardjunani, MA dengan Co-Director KFI, Prof. Dr. Ir. Drajat Martianto, MS. Sekretaris dan Wakil Sekretaris KFI adalah Ir. Ning Pribadi, M.Sc dan Ir. Tetty H. Sihombing, MP, serta bendahara KFI adalah Atmarita MPH, Dr.PH.

KFI memiliki tim pakar yang ahli di bidangnya masing-masing diketuai oleh Prof. Dr. Ir. Purwiyatno Hariyadi dan beranggotakan Dr. Ir. Jenny Elisabeth, MS, Idrus Jusat, PhD, Dr. Sunarno Ranu Widjojo, Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, MS, Rizal Malik, MA, Ir. Adhi S. Lukman, dan Rozy Afrial Jafar, M.Sc.

Sebagai organisasi yang terus tumbuh, KFI akan selalu melanjutkan pencapaian saat ini dan terus berkembang di masa depan dengan melakukan *continous improvement* dan

berupaya menjadi lembaga advokasi gizi dan fortifikasi pangan skala luas yang bereputasi internasional berbasis pada kajian-kajian ilmiah terpercaya. Untuk itu KFI telah menyusun rencana strategis (*strategic plan*) organisasi untuk jangka menengah dan jangka panjang sebagai berikut:



Asosiasi Pendidikan Vokasi Gizi Indonesia (AIPVOGI)

Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi Gizi Indonesia (AIPVOGI) merupakan organisasi yang menjadi wadah dari 64 program studi vokasi gizi (Diploma Tiga dan Diploma Empat/ Sarjana Terapan) di Indonesia, yang berasal dari perguruan tinggi negeri maupun swasta. Pendirian AIPVOGI dilakukan di Makassar pada tanggal 2 Mei 2016 dan terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor: AHU-0057321.AH.01.07 tahun 2016.

AIPVOGI sebagai organisasi kemasyarakatan mempunyai program dalam pengembangan keilmuan dan pendidikan tinggi vokasi gizi dengan visi **“Menjadi asosiasi pendidikan tinggi vokasi gizi yang unggul dan mendunia tahun 2028”**. “Unggul” mencakup ruang lingkup dalam penerapan Tridharma Perguruan Tinggi Vokasi Gizi, dan “Mendunia” dalam lingkup kawasan Asia. Misi yang ditetapkan untuk mencapai visi tersebut adalah: 1) mengembangkan instrumentasi dokumen pendidikan vokasi gizi, 2) mengembangkan instrumentasi sistem uji kompetensi, 3) mengembangkan sistem penjaminan mutu, 4) mengembangkan teknologi informasi pendidikan vokasi gizi, 5) mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan 6) mengembangkan kerjasama.

Sampai saat ini kepengurusan AIPVOGI sudah dua periode masa bhakti. Kepengurusan periode pertama (2016–2020, Ketua Umum: Muchamad Rachmat, SKM, M.Kes) dilantik oleh Ka. Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI (drg. Usman Sumantri, M.Sc) di Jakarta pada tanggal 2 September 2016, sedangkan kepengurusan periode kedua (2020–2024, Ketua Umum: Joko Susilo, SKM, M.Kes) dilantik oleh PLT. Ka. Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI (Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS) pada tanggal 29 Desember 2020 secara virtual dikarenakan masa pandemi Covid-19.

AIPVOGI memiliki sekretariat yang berlokasi di Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Jakarta II, Jl. Hang Jebat III/F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120, dengan Telpn/WA: 0813-1162-6564, e-mail: ***aipvogi@gmail.com*** dan website: ***www.aipvogi.org***. Slogan ***"We Can Do The Best"*** merupakan semangat pengurus dan anggota dalam memajukan organisasi, institusi pendidikan tinggi vokasi gizi dan keilmuan gizi di Indonesia.

88 TAHUN
Prof Soekirman

**PENGABDIAN
PROF. (Em) SOEKIRMAN
SEBAGAI AHLI GIZI
(1961 – sekarang)**

ERRATA

Halaman xii Sambutan

Diterbitkan oleh PERSAGI-KFI-AIPVOGI 2024

1. Prof. Dr. Ir. Drajat Martianto, M.Si

*Guru Besar Ilmu Gizi Masyarakat IPB
Kepala Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, dan Kesehatan
Co-Director KFI*

2. Prof. Dr. dr. Abdul Razak Thaha, MSc, SpGK

Ketua Pengurus Yayasan Inisiatif Gizi Indonesia (IGI)

3. Ir. Franky Welirang

Ketua Dewan Pengawas KFI

4. Prof. dr. Endang L. Achadi, MPH., Dr.PH

*Guru Besar Purnabakti FKM UI
Ketua Stunting Resource Center FKMUI*

5. Prof. dr. Veni Hadju, MSc, PhD

*Guru Besar Ilmu Gizi, FKM UNHAS
Kaprodil S2 Ilmu Gizi, FKM UNHAS*

6. Dr. Minarto, MPS

*Direktur Bina Gizi Depkes 2010–2014
Ketua PERSAGI 2009–2019*

7. Joko Susilo, S.KM, M.Kes

Ketua AIPVOGI

88 *tahun*
Prof Soekirman

Pengabdian Prof. (Em)
Soekirman Sebagai Ahli Gizi
1961 - Sekarang

